



# RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN BATAM 2020-2024



**Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
dan Pelabuhan Bebas Batam**

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat ridho dan karuniaNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP-Batam) periode 2020-2024 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun dalam rangka upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor yang mempengaruhi dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pengembangan Kawasan Batam sesuai kewenangannya.

Renstra ini merupakan upaya tindak lanjut dari RPJPN 2004-2024 dan VISI serta MISI Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin serta memperhatikan *blueprint* dan *Roadmap* Pengembangan Batam yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam. Renstra ini juga diharapkan memudahkan para *stakeholders*, khususnya bagi para calon investor untuk memahami secara cepat tentang arah pengembangan Kawasan Batam, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kegiatan investasinya.

Penyusunan Renstra BP-Batam ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab dan yang berkelanjutan untuk mempertajam arah dan meningkatkan sasaran target dalam program dan kegiatan tahunannya baik substansi maupun pembiayaannya harus menjadi tolok ukur dalam setiap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BP-Batam.

Proses penyusunan Renstra ini bukanlah sesuatu yang *instan*, pimpinan dan seluruh jajaran yang ada di BP-Batam dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan proses perencanaan strategis dan secara konsisten memperhatikan pelaksanaan tujuan dalam pencapaian sasaran yang akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka secara berjenjang dokumen Renstra ini harus dijabarkan lebih lanjut demi tercapainya visi Presiden dan wakili Presiden di Kawasan Batam.

Akhirnya, dengan segala dukungan kerja yang optimal serta menjunjung tinggi nilai yang tertuang dalam *Spirit* BP-Batam (*service excellence, professional, innovative, integrity, entrepreneurship*), kami berharap agar seluruh target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat terpenuhi.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

MUHAMMAD RUDI



PERATURAN KEPALA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  
BATAM  
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  
BATAM TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  
BATAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan investasi di KPBPB Batam.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 109 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal

KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM

MUHAMMAD RUDI

# TIM PERUMUS

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

### TIM PERUMUS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2020 - 2024

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran kegiatan perumus penyusunan rencana strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menetapkan Tim Perumus Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Tim Perumus Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);
11. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim dan Standarisasi Honorarium Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG TIM PERUMUS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut sebagai Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah:  
Memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tersebut agar tercapai hasil yang maksimal.
  - b. Tim Pelaksana:
    1. Melaksanakan kegiatan penyusunan Renstra dan Renstra Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2020-2024, secara terencana, terpadu dan sinkron dengan memaparkan secara periodik progresnya kepada Pelindung/Pengarah untuk mendapat hasil akhir yang optimal;
    2. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Strategis Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Kementerian terkait.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber dalam Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dihitung mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan 30 April 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Para Anggota Badan Pengusahaan Batam;
4. Kepala Biro Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

MUHAMMAD RUDI

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 101 Tahun 2020  
Tanggal : 19 Mei 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
<b>I PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB</b>			
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
3.	Anggota 1 Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Batam	Penanggung Jawab
4	Plt. Anggota Bidang Kebijakan Strategis	Badan Pengusahaan Batam	Penanggung Jawab
5	Anggota Bidang Pengelolaan kawasan dan investasi	Badan Pengusahaan Batam	Penanggung Jawab
6	Anggota Bidang Pengusahaan	Badan Pengusahaan Batam	Penanggung Jawab
<b>II TIM PELAKSANA</b>			
1.	Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis	Pusat Perencanaan Program Strategis	Ketua
2.	Kepala Satuan Pemeriksa Intern	Satuan Pemeriksa Intern	Anggota
3.	Kepala Biro Umum	Biro Umum	Anggota
4.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum	Anggota
6.	Kepala Biro Keuangan	Biro Keuangan	Anggota
7.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi Dan Protokol	Biro Hubungan Masyarakat, Promosi Dan Protokol	Anggota
8.	Kepala Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan	Anggota

9.	Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan	Pusat Harmonisasi Kebijakan	Anggota
10.	Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB Dan KEK	Pusat Pengembangan KPBPBB Dan KEK	Anggota
11.	Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	Anggota
12.	Direktur Infrastruktur Kawasan	Direktorat Infrastruktur Kawasan	Anggota
13.	Direktur Pengelolaan Lahan	Direktorat Pengelolaan Lahan	Anggota
14.	Direktur Pengamanan Aset	Direktorat Pengamanan Aset	Anggota
15.	Direktur Restrukturisasi	Direktorat Restrukturisasi	Anggota
16.	Direktur Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan	Badan Usaha Fasilitas Dan Lingkungan	Anggota
17.	Direktur Badan Usaha Bandar Udara Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Badan Usaha Bandar Udara Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
18.	Direktur Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko	Direktorat Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko	Anggota
19.	Direktur Evaluasi Dan Pengendalian	Direktorat Evaluasi Dan Pengendalian	Anggota
20.	Direktur Badan Usaha Pelabuhan	Badan Usaha Pelabuhan	Anggota
21.	Direktur Badan Usaha Rumah Sakit	Badan Usaha Rumah Sakit	Anggota

### **III SEKRETARIAT**

1.	Kepala Bidang Perencanaan Program Pembangunan	Pusat Perencanaan Program Strategis	Anggota
2.	Kepala Bagian Anggaran	Biro Keuangan	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Belanja	Biro Keuangan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan	Anggota
6.	Rizki Rahadian	Pusat Perencanaan Program Strategis	Anggota
7.	Vivi Oktavia	Pusat Perencanaan Program Strategis	Anggota

<b>NARASUMBER</b>			
1.	a. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan; b. Kepala Sub Direktorat Kawasan Strategis.	Kementerian PPN/BAPPENAS	Narasumber – 1
2.	a. Direktur Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; b. Kepala Sub Direktorat Perekonomian dan Perdagangan.	Kemeterian Keuangan	Narasumber – 2
3.	Praktisi Hukum	Konsultan Hukum	Narasumber – 3

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

MUHAMMAD RUDI

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KEPUTUSAN KEPALA BP-BATAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>TIM PERUMUS RENSTRA BP-BATAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Pembentukan Kelembagaan BP Batam.....	1
1.1.2 Perkembangan Kondisi Masyarakat di Batam.....	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
1.2.1 Perkembangan Batam 2015-2019 .....	16
1.2.1.1 Perkembangan Investasi.....	16
1.2.1.2 Perkembangan Ekspor.....	18
1.2.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja.....	22
1.2.1.4 Pendapatan Regional.....	24
1.2.2 Kondisi Eksisting Kinerja Unit Kerja Layanan BP Batam.....	26
1.2.2.1 Kinerja Keuangan.....	27
1.2.2.2 Unit Kerja Layanan Pelabuhan Laut .....	30
1.2.2.3 Unit Kerja Layanan Bandar Udara .....	31
1.2.2.4 Kinerja RS-BP Batam .....	32
1.2.2.4.1 Permasalahan RS BP Batam.....	34
1.2.2.5 Unit Kerja Pengelolaan Air dan Limbah .....	35
1.2.2.5.1 Air Minum.....	35
1.2.2.5.2 Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3.....	37
1.2.2.6 Unit Kerja Pengelolaan Lahan .....	39
1.2.2.7 Kerja Direktorat Pemanfaatan Asset .....	41
1.2.2.8 Unit Kerja Kantor Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi/ IT Centre	42
1.2.2.9 Unit Kerja Direktorat Prasarana .....	44
1.2.2.10 Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	45
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>48</b>
2.1 Arahan RPJP Nasional 2005– 2025.....	48
2.2 Visi dan Misi BP Batam .....	51
2.3 Nilai-Nilai BP Batam.....	52
2.4 Tujuan BP-Batam .....	52
2.4 Sasaran Strategis BP-Batam .....	53

<b>III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	56
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam.....	60
3.2.1 Arah Kebijakan.....	61
3.2.2 Strategi.....	63
3.2.2.1 Arah Sektor Prioritas .....	63
3.2.2.2 Fokus Strategi.....	68
3.3 Peran BP Batam dalam Pengembangan Daerah Batam.....	73
3.4 Kerangka Regulasi .....	74
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	78
<b>IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>81</b>
4.1 Program dan Kegiatan .....	81
4.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	89
4.3 Kerangka Pendanaan.....	92
4.3.1 Kebutuhan Investasi dan Pendanaan 2020 – 2024.....	93
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
Lampiran 1 Tabel Evaluasi Target dan ,Realisasi Renstra BP Batam 2015-2019.	
Lampiran 2 Tabel Issue Kerangka Kelembagaan Tahun 2020-2024.	
Lampiran 3 Tabel Issue Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024.	
Lampiran 4 Tabel Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Program atau Kegiatan Tahun 2020-2024.	
Lampiran 5 Tabel Rencana Pembiayaan Program dan Kegiatan KPBPB Batam Tahun 2020-2024 Menurut Infrastruktur dan Non Infrastruktur.	
Lampiran 6 Tabel Rencana Pembiayaan Program dan Kegiatan KPBPB Batam Tahun 2020-2024 Menurut Sumber Pembiayaan.	
Lampiran 7 Tabel Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional).	
Lampiran 8 Tabel Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional dan Non-Operasional).	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Pembentukan Kelembagaan BP Batam

Awalnya Pulau Batam merupakan pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai PN Pertamina. Berdasarkan Keppres No. 74 tahun 1971 Pemerintah menjadikan Batu Ampar sebagai wilayah *entreport* partikular yang memberikan implikasi berdatangnya investor asing. Mereka mulai merelokasikan kegiatannya ke Batu Ampar, khususnya industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai. Di samping itu, dengan adanya legalitas tersebut, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan operasi dan logistik minyak mulai memiliki keleluasaan operasi karena banyak membutuhkan barang impor. Selanjutnya Pulau Batam dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Kawasan Batam mendapatkan insentif fiskal berupa bebas pajak PPN, PPnBM dan bea masuk. Selain itu pada kawasan tersebut dikenakan PPh tanpa *treatment* khusus.

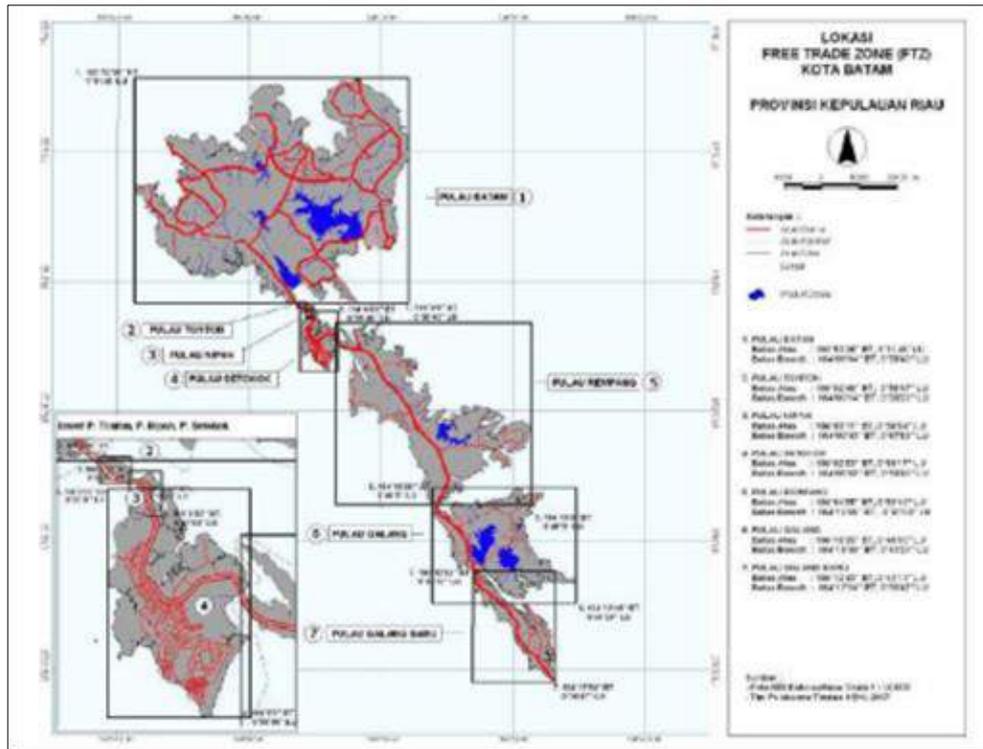
Kawasan Batam yang menjadi wilayah kerja Otorita Batam merupakan daerah *bonded zone* (kawasan berikat) yang ditetapkan dengan Keppres, tidak ada bea masuk dan pajak ekspor. Berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1974 tgl. 29 Juni 1974 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1972 tentang *Bonded Warehouse*, tiga kawasan di Pulau Batam (Batu Ampar, Sekupang dan Kabil) memperoleh status *Bonded Warehouse*. Akan tetapi berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 1978 seluruh wilayah Pulau Batam ditentukan sebagai Kawasan Berikat. Kedudukan Otorita Batam mulai berubah seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam sebagai Daerah Otonom dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengembangan Kawasan Batam, Otorita Batam bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Batam.

Kawasan Batam – Rempang – Galang memiliki posisi kekhususan secara geografis karena berbatasan dengan negara tetangga yang menjadi pintu masuk lintas batas di antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Posisi

tersebut menjadi lintasan strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri, dan investasi. Pada tahun 2007, kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Batam. Berdasarkan PP tersebut, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Kegiatan utama yaitu sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan melalui PP Nomor. 5 Tahun 2011 ditetapkan lagi Pulau Janda Berhias beserta gugusannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Terkait dengan potensi ekonomi dan posisi strategisnya, Batam telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRWN (PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2017) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bintan, Kawasan Batam, dan Kawasan Karimun.



Gambar 1.1 Peta Lingkup KPBPB-Batam

Sumber : PP Nomor 46 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2011

Untuk dapat mengembangkan Kawasan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diperlukan peran yang lebih deterministik kepada badan pengelola kawasan, antara lain:

1. Mengembangkan Badan Pengelola dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
2. Tuntutan pelayanan dan pengembangan bisnis dan investasi yang berskala nasional dan internasional.
3. Mewujudkan prinsip-prinsip dalam sebuah rencana kerja organisasi (*corporate plan*) yang berupa visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan penganggaran, yang mampu menjadi “tuntunan/alat” bagi seluruh pimpinan dan karyawan..
4. Mengembangkan pelayanan investasi *one stop services* serta fokus pada sektor industri kunci yang memberikan nilai tambah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, BP Batam perlu menyusun rencana pembangunan organisasi yang dibentuk dalam Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2020 - 2024. Renstra BP Batam tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang akan menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BP Batam serta akan dikukuhkan sebagai produk hukum, sehingga nantinya akan menjadi acuan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam.

Renstra yang disusun ini berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Penyusunan Renstra BP Batam ini tidak terlepas dari tahapan skala prioritas utama dan strategi Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

Berdasarkan hal tersebut menjadi 3 kata kunci yang dapat diambil selain percepatan pembangunan disegala bidang, sesuai dengan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu diharapkan dapat mewujudkan:

- a. Struktur perekonomian yang kokoh;
- b. Keunggulan kompetitif wilayah;
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

### 1.1.2 Perkembangan Kondisi Masyarakat di Batam

Selayaknya KPBPB Batam mempunyai karakteristik yang berbeda unik dan unggul dengan daerah lain dengan mengikuti penerapan KPBPB yang berlaku di Dunia. Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kota Batam itu sendiri, bahkan memiliki berbagai macam dampak bagi daerah sekitar (*multiple effects*). Di satu pihak diharapkan pertumbuhan nilai real investasi dalam pengembangan industri terus meningkat, tetapi di lain pihak dampak negatif terhadap peningkatan investasi saat ini adalah tingginya tingkat urbanisasi yang masuk ke Batam serta hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan KPBPB-Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang dibawah naungan pengelolaan BP-Batam. Beberapa aspirasi dari masyarakat / *stakeholders* yang dianggap mampu menjadi daya unkit KPBPB – Batam yaitu:

1. Pelayanan dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang baik, sehingga diharapkan mampu menghindari miskomunikasi, konflik, maupun permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan antar *stakeholder* serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan;
2. BP-Batam sebagai pengelola KPBPB – Batam diharapkan segera meningkatkan kapasitas kepelabuhanannya khususnya dalam hal bongkar muat barang, karena kapasitas yang ada saat ini dirasa kurang efektif dan waktu tunggu keluar masuk barang menjadi kurang efisien.
3. Pengembangan pusat logistik Bandara Hang Nadim harus dikembangkan secara terintegrasi dengan kawasan sekitar maupun kawasan lainnya karena di kawasan ini tidak hanya berkembang kegiatan transportasi saja, tapi juga kegiatan perdagangan, pergudangan, industri, dan lain sebagainya;

4. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat.
5. Profesionalisme pengelola KPBPB-Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder* yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparan.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara garis besar potensi dan permasalahan yang terkait dalam pengelolaan KPBPB-Batam diantaranya meliputi perkembangan investasi yang merupakan salah satu hal penting dalam percepatan pembangunan dan perbaikan bagi produktifitas kerja, disamping itu dapat memulihkan perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Upaya dalam mengoptimalkan nilai investasi di KPBPB-Batam adalah khususnya menarik investor PMA secara maksimal yang diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi KPBPB-Batam dan akibat dari *multiplier effects* yang dihasilkan baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Sebagai ilustrasi kenaikan jumlah real nilai investasi memang serta merta dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi penciptaan nilai real investasi tersebut akan berdampak positif dan memberikan nilai *multiplier effect* yang dramatis, bila ditopang dengan pengembangan sektor industri baru yang berkaitan dengan rantai nilai persediaan yang dapat dipenuhi oleh kebutuhan domestik di Batam sehingga pergerakan ekonomi dan investasi kearah *progressive* yang lebih cepat serta diikuti penurunan angka pengangguran tenaga kerja.

Hal ini dapat terlihat dari grafik indikator perkembangan nilai realisasi investasi PMA Batam di tahun 2015 hingga 2019 pertumbuhan sekitar rata-rata 15 persen per-tahun, sedangkan untuk tahun 2017 hingga 2019 tercatat senilai 1.809,15 juta USD dengan nilai rata-rata pengangguran sebesar 8.15 persen. Hingga tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat jumlah pengangguran sejumlah sekitar 54.018 orang. Dari jumlah pengangguran tersebut, terjadi peningkatan sebesar 8,93 persen atau sebanyak

6.654 orang dibanding jumlah pengangguran pada tahun 2017. Hal ini disebabkan umumnya berasal dari investasi yang masuk kurang menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup.

Selanjutnya secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia akan terus meningkat yang diprediksi mencapai 270 juta jiwa di tahun 2020 ini. Mc Kinsey memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia masuk pada kategori “*consuming class*” akan mencapai angka 85 juta jiwa ditahun yang sama, sebagai mayoritas golongan menengah. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan publik yang jauh lebih baik. Indikator *Ease of Doing Business* dari World Bank Tahun 2020 menempatkan Indonesia pada urutan 73 dibawah dari negara ASEAN lain seperti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunai (66) atau bahkan dibandingkan dengan Vietnam (70). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya urutan Indonesia dalam indikator tersebut adalah Indonesia adalah masih memberlakukan peraturan ketenagakerjaan yang kaku, khususnya tentang perekrutan. implementasi *Online Single Submission* (OSS) yang belum optimal, terutama di daerah.

Selain itu skor *logistic performance index* (LPI) Indonesia mencapai nilai 3,15 dari skala 1-5 yang artinya semakin mendekati angka 5 mengindikasikan daya saing logistik suatu negara semakin baik, sebaliknya kian mendekati 1 semakin buruk Indeks daya saing logistik Indonesia ini, berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22).

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya investasi di Indonesia adalah rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2018* skor pilar infrastruktur Indonesia berada di level 66,8 dari skala 0-100 dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke 5 di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,88 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan peringkat daya saing tertinggi di Asia Tenggara maupun di tingkat global. Jurnal akuntansi, ekonomi, dan manajemen bisnis 2018 menganalisis dalam pengukuran tingkat daya saing Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepri menyatakan bahwa Batam unggul pada variabel perekonomian daerah dan

SDM, namun lemah pada variabel infrastruktur, khususnya luas wilayah dan panjang jalan per luas wilayah. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur di Batam mutlak diperlukan.

Situasi diatas dapat menyebabkan tingginya biaya angkutan darat, ditambah lagi dengan jasa angkutan laut yang mahal. Akibatnya biaya logistik di Indonesia bahkan di Batam dengan lokasi pada jalur pelayaran dan perekonomian strategis tetap menjadi sangat tinggi dan tidak mendukung investasi.

Selain itu untuk mengembangkan integritasi konektivitas secara lokal perlu dilakukan integrasi jaringan transportasi dengan simpul transportasi disamping untuk mendukung konektivitas perlu pula dilakukan pengintegrasian jaringan komunikasi dan informasi serta hal yang mendukung pengelolaan KPBPB Batam dalam bidang teknologi informatika dan komunikasi seperti migrasi data menuju konvergensi, pemerataan akses dan layanan, peningkatan dan pengembangan jaringan *broadband*, peningkatan keamanan jaringan dan sistem informasi serta integrasi infrastruktur aplikasi dan data dengan nasional demi terbentuknya konektivitas secara global dan mendukung pembentukan konektivitas secara nasional.

Permasalahan tenaga kerja di Batam maupun di Indonesia pada umumnya terkait dengan upah tenaga kerja maupun aturan yang dinilai kurang berpihak pada tenaga kerja yang semakin lama semakin kompleks, tidak hanya sebatas permasalahan keterbatasan tenaga kerja secara kualitas, tapi juga secara kuantitas. Secara umum, kualitas tenaga kerja dianggap masih belum memenuhi standar, ini terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja asing (ekspatriat) yang menempati pos-pos kunci di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan industri yang ada.

Berbagai permasalahan lain yang perlu segera mendapat tindak lanjut untuk ditangani mulai dari penertiban rumah liar (ruli) maupun kios liar, kemacetan lalu lintas, serta perwujudan harmonisasi berbagai kewenangan dalam bagian dari pengembangan KPBPB- Batam termasuk pelaksanaan proses-proses perijinan dan kemudahan berinvestasi serta terkait dengan prosedur keluar masuk barang.

Pada Bulan Agustus 2019 BPS mencatat hanya sebesar 6,18 persen kontribusi ekspor dari Kepulauan Riau, meskipun Maret tahun 2020 kontribusi Batam dominan terhadap ekspor Kepri mencapai 78.45 persen dengan nilai terbesar melalui melalui Pelabuhan Batu Ampar US\$454,97 juta; diikuti Pelabuhan Sekupang US\$144,21 juta; dan Pelabuhan Kabil/Panau US\$115,32 juta;

Selain permasalahan yang bersifat operasional teknis dan kebijakan maka masalah terkait dengan kelangkaan air bersih pun menjadi issue penting dalam pengembangan Batam, mengingat kondisi hidrogeologi Batam yang hanya mampu menyerap air hujan sebesar 5 persen kedalam tanah dan sisanya akan terus melimpas dan mengalir ke laut.

Kondisi inilah menyebabkan Batam harus dapat mengantisipasi kelangkaan air bersih ditahun-tahun mendatang dengan memelihara waduk yang ada serta memanfaatkan estuari yang ada selain akan dimulainya kerjasama pemanfaatan sumber air dari luar Pulau Batam yaitu Pulau Lingga di Provinsi Kepri. Tidak hanya itu pula KPBPB-Batam pun mulai untuk merambah terkait analisis model potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan demi mengantisipasi kelangkaan energi bagi kawasan yang akan dikembangkan nantinya.

Beberapa tahun terakhir ini Batam mencatat pertumbuhan cukup baik, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2014, misalnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,16 persen. Namun, turun menjadi 6,87 persen di 2015, lalu turun lagi menjadi 5,43 persen pada 2016. Kemudian merosot di 2017 dengan angka 2,19 persen. Kemudian naik di 2018 hingga dua kali lipat yakni 4,56 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 mencapai 5,92 persen.

Pada Tahun 2020 ada kemungkinan terjadi perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonomi ini, karena di awal tahun dunia sedang diserang wabah virus covid-19 dan ini diperkirakan akan berpengaruh pada perekonomian Batam mengingat posisi ekspor Kepulauan Riau Berdasarkan data BPS Kepri yang terbesar adalah ke Singapura, disusul China dan Amerika Serikat.

Dampak dari mewabahnya virus corona tidak hanya mengganggu sektor industri di Singapura. Batam sebagai tumpuan investor Singapura juga mengalami kekhawatiran akan berkurangnya bahan baku industri yang diimpor, mengingat hampir 50 % bahan baku yang digunakan untuk beroperasi di Batam didatangkan dari China. Kondisi saat ini memang dilema bagi sektor industri, dikarenakan apabila pasokan raw material dari negara China terganggu dalam waktu relatif lama, maka kemungkinan beberapa perusahaan akan melakukan rasionalisasi terkait hubungan kerja.

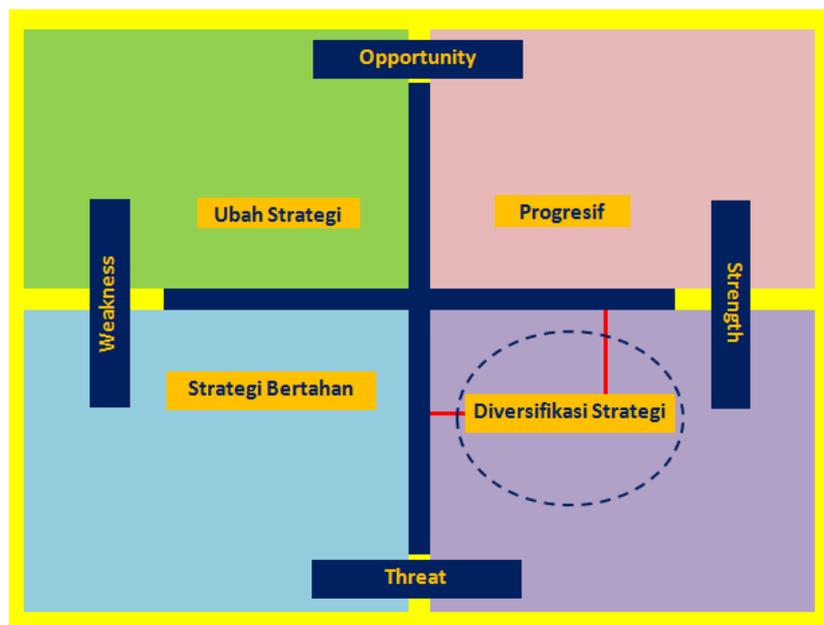
Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal menggunakan metodologi SWOT serta kesimpulan analisis dari faktor tersebut maka strategi yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategis di BP Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Analisis SWOT dan Faktor Internal serta Eksternal BP Batam

Internal	KEKUATAN / S		KELEMAHAN / W		
		<b>Asset yang besar (infrastruktur, gedung, bangunan, lahan)</b> Jumlah SDM yang banyak <b>Memiliki kewenangan/ Legalitas dalam pengelolaan KPBPB - Batam</b>	Jumlah SDM belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan <b>Adanya penempatan SDM belum sesuai dengan latar belakang pendidikan atau ketepatan kemampuan ( <i>right men on the right place</i> )</b> <b>Pengelolaan asset belum optimal sehingga salah satunya menyebabkan penerimaan belum optimal</b>		
External	STRATEGI S - O		STRATEGI W - O		
		Tersedianya Produk Perencanaan dan Penelitian yang dihasilkan Hubungan kerjasama yang baik dengan investor, asosiasi dan pemerintah Pelayanan ke Stakeholder sudah menggunakan sistem Online Single Submission Keterbukaan Publik / transparansi dalam penyampaian informasi Responsif terhadap keluhan stakeholders	Hasil Kordinasi dan komunikasi yang dilakukan belum optimal Kurangnya publikasi terhadap rencana program dan kegiatan <b>Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK)</b>		
PELUANG / O		STRATEGI S - T		STRATEGI W - T	
<b>Pengembangan Wilayah kewenangan KPBPB-Batam (Barelang dan sekitarnya)</b>		1. Penyediaan produk dan pengembangan produk perencanaan dan penelitian terkait investasi dalam bidang jasa, logistik dan kepariwisataan dalam wilayah pengelolaan KPBPB-Batam yang berkualitas dan dapat diterapkan.	1. Rotasi dan mutasi SDM di lingkungan BP- Batam sesuai dengan kompetensi		
<b>Tumbuhnya ASEAN menjadi blok ekonomi yang penting</b>		2. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan asset dalam peningkatan penerimaan dan pengembangan investasi dalam kawasan KPBPB Batam	2. Konsistensi publikasi rencana pengembangan dan marketing KPBPB - Batam melalui media		
<b>Potensi pengembangan jasa, logistik dan kepariwisata di kawasan KPBPB - Batam</b>		3. Optimalisasi SDM sesuai dengan kompetensinya dalam pengelolaan KPBPB - Batam	3. Optimalisasi penggunaan TIK oleh SDM dalam pengelolaan KPBPB- Batam		
Pemindahan lokasi perusahaan akibat globalisasi		4. Optimalisasi dan harmonisasi hubungan kerjasama dengan stakeholders dalam peningkatan kegiatan investasi di KPBPB- Batam			
Munculnya sektor ekonomi baru seperti industri hijau dan ICT		5. Peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan publik dalam penyampaian informasi untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan tumbuhnya <i>brand image</i> yang positif dalam pengelolaan KPBPB Batam			
Investasi yang dapat di kembangkan akibat dari perang dagang antara negara adikuasa (USA dan China)					
TANTANGAN / T					
<b>Kebijakan dan pergantian pimpinan internal KPBPB- Batam yang cukup sering berubah</b>		1. Peningkatan kualitas SDM, dalam mempersiapkan pengelolaan KPBPB - Batam yang profesional.	1. Meningkatkan skill dan wawasan SDM pengelola KPBPB-Batam dalam bidang TIK		
<b>Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan strategis</b>		2. Revisi dan evaluasi aturan/ regulasi yang mudah dilaksanakan dan diterapkan bagi pengembangan investasi dan penanaman modal.	2. Meningkatkan kinerja profesional pengelolaan KPBPB - Batam		
Globalisasi dan TIK yang cepat berubah dan berkembang		3. Sosialisasi aturan / regulasi pengembangan investasi dan modal di KPBPB-Batam kepada stakeholders	3. Sosialisasi dan publikasi yang berkala dalam kemajuan kegiatan pengelolaan KPBPB-Batam		
<b>Kompetisi kawasan industri lainnya di regional Asean / Asia Pasifik</b>		4. Peningkatan daya saing pengelolaan KPBPB - Batam melalui peningkatan infrastruktur dan infrastruktur yang berstandar internasional, pemberian insentif fiskal yang menguntungkan, pelayanan yang prima kepada stakeholders	4. Menempatkan SDM BP-Batam sesuai dengan kompetensinya		
Masih adanya aturan/ regulasi yang kurang berpihak terkait penanaman investasi / modal di KPBPB- Batam		5. Memfasilitasi kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi dengan pelaku industri, dalam peningkatan skill tenaga kerja di KPBPB-Batam	5. Kerjasama pengelolaan dan pengembangan investasi yang saling menguntungkan		
Publikasi negatif oleh media terkait dalam pengelolaan KPBPB - Batam.		6. Peningkatan kualitas dan target marketing serta promosi KPBPB- Batam.	6. Memfasilitasi BLK dan sekolah vokasi yang ada di KPBPB-Batam dalam sertifikasi profesi		
<b>Meningkatnya arus tenaga kerja asing ke Batam terkait diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</b>		7. Kerjasama yang menguntungkan dalam pengelolaan asset BP-Batam.			

Sumber: Analisis Pusrenpro, Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK. 2020

Adapun berdasarkan hasil pembobotan (+71, -39), peta kekuatan BP Batam ada pada matriks kuadran 2 yaitu “Diversifikasi Strategi”, hal ini menggambarkan situasi bahwa meskipun organisasi BP Batam menghadapi ancaman, namun ada kekuatan dari BP Batam yang dapat diandalkan. Untuk mengantisipasinya BP Batam bergerak dengan strategi diversifikasi atau strategi inovasi.



Gambar 1.2 Peta Kuadran Analisis SWOT BP Batam

Sumber : Analisis Pusrenpros, Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK. 2020

Selain hal diatas, dapat ditarik pula beberapa faktor penarik investasi yang dianggap mampu menciptakan peluang dalam pengelolaan KPBPB-Batam diantaranya pengembangan infrastruktur dan kawasan investasi ekonomi baru, pelayanan yang maksimal serta peningkatan konektivitas. Identifikasi dan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal BP Batam dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan KPBPB-Batam dalam lima tahun mendatang.

Setelah dilakukan identifikasi dalam lingkungan politik, ekonomi, social dan teknologi maka dapat disimpulkan faktor kunci (*key success factors*) yang dapat menjadi penguangkit yaitu:

1. Regulasi dan kemudahan fiskal dalam mendukung pengelolaan KPBPB Batam.
2. Pengembangan kawasan industri spesifik (*focus industry*).
3. Pengembangan bauran pemasaran (*marketing mix*).
4. Sistem Pelayanan dan informasi yang responsif dan cepat tanggap.
6. Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
7. Inovasi terhadap riset dan teknologi.
8. Infrastruktur dan infostruktur yang berstandar internasional.

Data Bulan Maret 2020 menyebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam dengan jumlah total 2.693 orang yang terdiri dari Pegawai Negri Sipil (PNS) sejumlah 1.650 orang dan Pegawai Non PNS sejumlah 582 orang. Disamping itu selain tenaga PNS dan Non PNS terdapat juga tenaga kontrak BP Batam yang kini berjumlah 438 orang dan Distribusi Potensi Pensiun Sumber Daya Manusia BP-Batam 2020 - 2024 sejumlah 266 Orang. Dengan penyebaran di Empat kedeputian dan satu (1) unit Satuan Pemeriksa Internal. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Penyebaran Sumber Daya Manusia BP-Batam

NO	UNIT KERJA									TOTAL
		CPNS DPB	NON	PNS DPB	PNS DPK	PNS TGS	POLRI	PK	SK	
1	BP BATAM	-	1	-	-	-	-	-	3	4
2	WAKIL KEPALA BP BATAM	-	-	-	1	-	-	-	2	3
3	ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	-	1	-	-	-	-	-	5	6
4	ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI	-	-	-	1	-	-	-	2	3
5	ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN	-	1	-	-	-	-	-	1	2
6	ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS	-	-	-	1	-	-	-	4	5
7	BADAN USAHA BAIK DARADAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI	-	72	276	10	-	-	224	-	582
8	BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN	-	47	129	5	-	-	21	-	202
9	BADAN USAHA PELABUHAN	1	19	154	-	-	-	35	1	210
10	BADAN USAHA RUMAH SAKIT	-	137	259	6	-	-	42	-	444
11	BIRO HUKUM	-	11	5	3	-	-	4	-	23
12	BIRO HUMAS, PROMOSI DAN PROTOKOL	-	16	28	2	-	-	14	-	60
13	BIRO KEUANGAN	-	15	21	2	-	-	3	-	41
14	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	-	34	34	5	-	-	3	-	76
15	BIRO UMUM	-	46	111	2	-	-	39	-	198
16	DIREKTORAT EVALUASI DAN PENGENDALIAN	-	4	7	1	-	-	-	1	13
17	DIREKTORAT INFRASTRUKTUR KAWASAN	-	31	86	4	-	-	3	-	124
18	DIREKTORAT PELAYANAN LALU LINTAS BARANG DAN PENANAMAN MODAL	-	22	34	1	1	-	3	-	61
19	DIREKTORAT PENGAMANAN ASET	-	27	266	10	-	2	4	-	309
20	DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN	-	41	71	5	-	-	21	-	138
21	DIREKTORAT PENINGKATAN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO	-	3	6	1	-	-	-	-	10
22	DIREKTORAT RESTRUKTURISASI	-	-	12	-	-	-	-	1	14
23	KANTOR PERWAKILAN	-	19	24	-	-	-	3	-	46
24	PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN	-	14	10	5	-	-	2	-	31
25	PUSAT PENGEMBANGAN KPBB DAN KEK	-	6	15	2	1	-	2	-	26
26	PUSAT PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS	-	11	18	1	-	-	7	-	37
27	SATUAN PEMERIKSAAN INTERN	-	4	14	-	-	-	7	-	25
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>582</b>	<b>1580</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>438</b>	<b>20</b>	<b>2693</b>

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam, 2020.

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia BP-Batam Menurut Pendidikan

NO	STATUS PEGAWAI	S3	S2	S1/D.IV	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
1	CPNS DPB	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	NON	-	12	181	119	-	3	214	18	35	582
3	PNS DPB	-	41	476	133	10	3	849	48	20	1580
4	PNS DPK	2	3	36	1	-	-	26	-	-	68
5	PNS TGS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6	POLRI DPK	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	<b>TOTAL I</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>695</b>	<b>253</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1090</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>2235</b>
1	P2K STRUKTURAL	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
2	STAF KHUSUS	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5
3	TENAGA AHLI	3	6	2	1	-	-	-	-	-	12
	<b>TOTAL II</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
1	P2K PELAKSANA	-	10	78	61	-	-	284	3	2	438
	<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>438</b>
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>776</b>	<b>315</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1374</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>2693</b>

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam, 2020.

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia BP-Batam Menurut Usia

NO	USIA	STATUS PEGAWAI								TOTAL
		CPNS DPB	NON	PNS DPB	PNS DPK	PNS TGS	POLRI	PZK	SK	
1	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	20	-	-	-	-	-	-	26	-	26
3	21	-	-	-	-	-	-	38	-	38
4	22	-	-	-	-	-	-	40	-	40
5	23	-	2	-	-	-	-	35	-	37
6	24	-	4	-	-	-	-	36	-	40
7	25	-	5	-	-	-	-	29	-	34
8	26	-	11	-	-	-	-	26	-	37
9	27	-	24	-	-	-	-	36	-	60
10	28	-	18	1	-	-	-	23	-	42
11	29	-	21	-	2	-	-	22	1	46
12	30	-	29	-	-	-	-	23	-	52
13	31	-	21	2	-	-	-	12	-	35
14	32	-	36	1	-	-	-	9	-	46
15	33	-	47	1	2	-	-	4	-	54
16	34	-	32	7	3	-	-	9	-	51
17	35	-	40	9	1	-	-	6	-	56
18	36	1	28	22	2	-	-	4	-	57
19	37	-	36	28	2	-	-	10	-	76
20	38	-	26	47	2	-	-	6	-	81
21	39	-	32	72	-	-	-	5	1	110
22	40	-	22	85	-	-	-	2	-	109
23	41	-	20	116	3	-	-	1	1	141
24	42	-	10	108	2	-	-	1	-	121
25	43	-	15	116	2	-	-	1	-	134
26	44	-	21	99	3	-	-	1	-	124
27	45	-	16	77	5	-	-	3	-	101
28	46	-	11	80	4	-	-	2	-	97
29	47	-	10	70	4	-	-	5	1	90
30	48	-	8	71	3	-	-	5	1	88
31	49	-	7	83	5	-	1	6	-	102
32	50	-	2	71	5	1	-	-	-	79
33	51	-	3	66	2	-	-	7	-	78
34	52	-	5	52	4	-	-	-	1	62
35	53	-	4	59	1	-	-	1	-	65
36	54	-	7	61	1	-	1	2	1	73
37	55	-	4	68	2	1	-	1	1	77
38	56	-	2	49	3	-	-	-	2	56
39	57	-	-	50	2	-	-	-	-	52
40	58	-	-	5	3	-	-	-	-	8
41	59	-	2	2	-	-	-	-	-	4
42	60	-	1	1	-	-	-	-	2	4
43	61	-	-	-	-	-	-	-	1	1
44	62	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1
46	64	-	-	1	-	-	-	-	2	3
47	65	-	-	-	-	-	-	-	1	1
48	66	-	-	-	-	-	-	-	-	0
49	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50	68	-	-	-	-	-	-	-	-	0
51	69	-	-	-	-	-	-	-	-	0
52	70	-	-	-	-	-	-	-	-	0
53	71	-	-	-	-	-	-	-	-	0
54	72	-	-	-	-	-	-	-	-	0
55	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0
56	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0
57	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0
58	76	-	-	-	-	-	-	-	-	0
59	77	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>582</b>	<b>1580</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>438</b>	<b>20</b>	<b>2693</b>

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam, 2020

Tabel 1.5 Distribusi Potensi Pensiun Sumber Daya Manusia BP-Batam

No	Tahun	Distribusi Potensi Pensiun SDM BP Batam (Orang)
1	2020	8
2	2021	52
3	2022	56
4	2023	77
5	2024	73

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam, 2020

### 1.2.1 Perkembangan Batam 2015 – 2019

Berdasarkan letak geografisnya yang strategis, yaitu berada di sisi jalur perdagangan internasional maka perkembangan pulau Batam sejak awal diarahkan untuk menjadi pintu masuknya investasi, perdagangan, dan jasa dari luar negeri. Sejak dicanangkannya kawasan Batam-Rempang-Galang sebagai FTZ tanggal 1 April 2009 berbagai kemudahan telah diberikan berkaitan dengan status tersebut dan telah berkembang menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi penanam modal, sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009 yang akan disempurnakan hingga mencapai suatu tatanan investasi yang kompetitif.

Dampak positif dari penerapan kebijakan tersebut diatas dapat dilihat dari meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Batam baik berupa kerjasama (*Joint Venture*) dan tanpa kerjasama (*Direct Investment*), selain itu dampak positif lainnya adalah adanya peningkatan nilai ekspor-impor, jumlah peningkatan tenaga kerja serta pertumbuhan perekonomian yang diatas rata-rata daerah lainnya.

#### 1.2.1.1 Perkembangan Investasi

Investasi sering juga disebut penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan hal yang penting dalam perekonomian.

Investasi di Batam dibagi menjadi 2, yaitu; investasi Penanaman modal asing (PMA) dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2019 akhir mencapai USD359,598.8. Terlebih dengan keluarnya aturan tentang *Online Single Submission (OSS)*, BP Batam tidak menemui kesulitan dalam mengakses sistem tersebut terkait dengan pelayanan dan pengurusan perizinan investasi guna mendorong investasi di Batam. Perkembangan persetujuan/pendaftaran investasi asing PMA baru dan dari 2015 sampai dengan akhir 2019 mencapai dengan total nilai investasi USD359,598.8. Grafik dan tabel pertumbuhan perkembangan pendaftaran investasi baru Tahun 2015 hingga akhir 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Pendaftaran Investasi Baru 2015– 2019

Tahun (US\$)	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Investasi (US\$) New/Baru	163.00	295.31	452.86	49.518.599	229,299.9
Nilai Investasi (US\$) Ekspansion/ Perluasan	128.46	168.42	165.88	4.309.839	130,298.9

Sumber: Buku Development Progress Of Batam Tahun 2019 edisi I

Investasi tersebut berasal dari Negara Singapura, Malaysia, India, Australia, China (RRC), Inggris, Italia, British Virgin Island, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Philipina, Jerman, Irlandia, Ukraina, Sri Langka dan Norwegia.

Bidang-bidang usaha yang diminati antara lain Industri pembuatan dan perbaikan kapal, industri bangunan terapung dan lepas pantai, industri pipa dan sambungan pipa, industri pengelolaan bahan plastik (daur ulang)

bukan logam, industri perakitan mesin, industri mesin metalurgi, dan mesin penambangan, industri pakaian jadi dan tekstil, perdagangan besar (distributor) ekspor dan impor, jasa industri berbagai pekerjaan khusus logam, angkutan barang peti kemas dan barang umum dan lainnya.

### 1.2.1.2 Perkembangan Ekspor

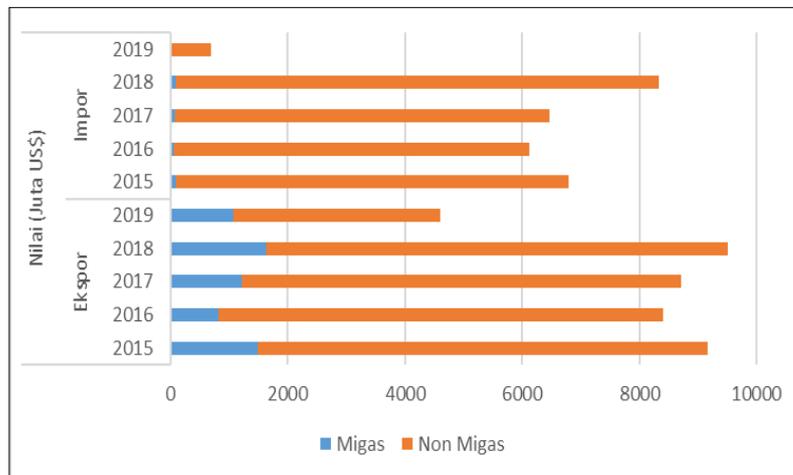
Perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antar negara termasuk Batam sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia, karena suatu negara atau wilayah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya hanya dengan mengandalkan produksi domestiknya. Batam, sejak era otorita Batam, melakukan perdagangan dengan banyak negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menyuplai kebutuhan negara lain.

Perhitungan data ekspor yang disajikan dalam laporan ini adalah ekspor- Kota Batam termasuk wilayah FTZ dan masih menganut perhitungan dengan standar yang berlaku nasional, yaitu menganggap ekspor adalah barang keluar dari daerah pabean Indonesia saja dan impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia saja, belum memperhitungkan sesuai dengan kondisi wilayah FTZ. Grafik perkembangan realisasi ekspor dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 1.7 Realisasi Ekspor Impor 2015 – 2019

	Nilai (Juta US\$)									
	Ekspor					Impor				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Migas	1493.99	816.25	1208.48	977.72	1064.81	100.57	59.08	73.31	40.65	4.91
Non Migas	7672.84	7595.92	7500.22	5263.82	3532.91	6697.42	6068.74	6388.52	5962.06	690.06
Total	9166.83	8412.17	8708.7	6231.54	4597.72	6797.99	6127.84	6461.83	6002.71	694.97

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik Kota Batam Semester I Tahun 2019



Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Ekspor Impor 2015 – 2019

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik Kota Batam Semester I Tahun 2019

Dari sisi ekspor impor di Kota Batam, secara umum ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Meskipun demikian, baik impor maupun ekspor terus mengalami kecenderungan penurunan.

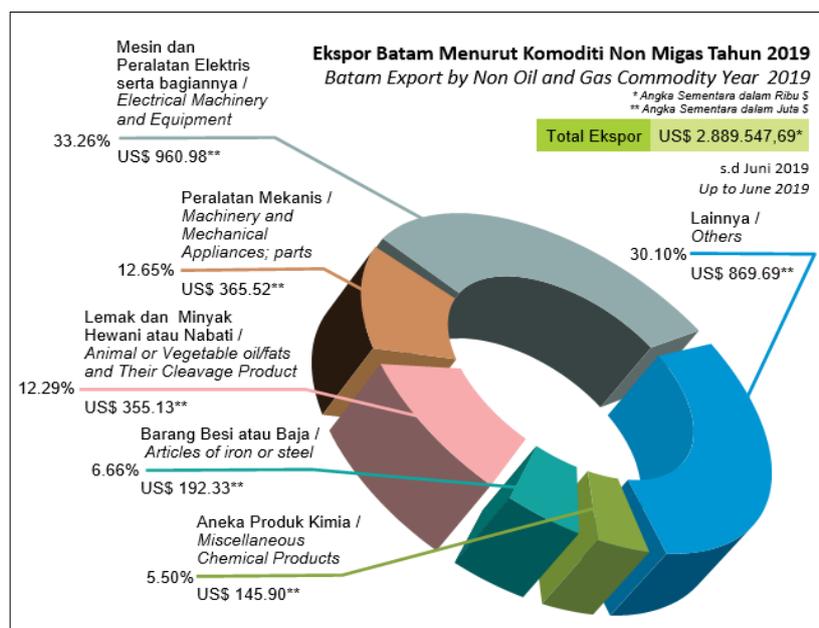
Adanya penurunan produksi sebagai imbas dari kinerja serta jumlah industri yang terus menurun berimplikasi pada penurunan impor terhadap mesin/ peralatan listrik, mesin – mesin / pesawat mekanik serta benda dari besi, sehingga ke depannya akan berpengaruh terhadap produktivitas industri di Kota Batam.

Meskipun Kota Batam sama – sama mengekspor mesin/peralatan listrik, mesin – mesin /pesawat mekanik, serta benda dari besi dan baja (Gambar 1.6 Perkembangan Impor Batam Menurut Komoditi Non Migas), tapi nilai tambahnya relatif lebih rendah dikarenakan ekspor Kota Batam dalam sektor tersebut hanya berupa komponen atau barang setengah jadi sementara barang yang diimpor merupakan barang jadi dan mesin – mesin yang menunjang produksi industri di Kota Batam. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa keunggulan kompetitif Kota Batam, baik dalam impor maupun ekspor masih rendah.

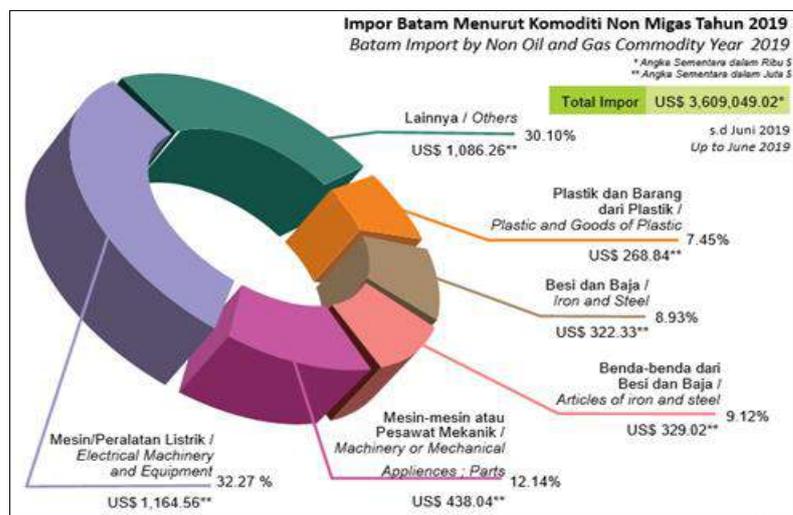


Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Ekspor Impor Beserta Distribusinya  
 Sumber: Development Progress of Batam 2019, edisi I Volume XXXV

Nilai ekspor Kota Batam pada tahun 2018 sebesar US\$ 9,507,434,579, terjadi penurunan ekspor menjadi US\$ 3,656,815.64 di bulan Juni tahun 2019. Tujuan ekspor terbesar yaitu menuju Singapura senilai US\$ 1,773.30 juta atau 48.49% dari total ekspor.



Gambar 1.5 Perkembangan Ekspor Batam Menurut Komoditi Non Migas Tahun 2019



Gambar 1.6 Perkembangan Impor Batam Menurut Komoditi Non Migas

Sumber: Development Progress of Batam 2019, edisi I Volume XXXV

Batam, sejak era otorita Batam, melakukan perdagangan dengan banyak negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menyuplai kebutuhan negara lain. Adapun impor kota Batam terhadap negara tujuannya berikut dilampirkan seperti tabel dibawah:

Tabel 1.8 Tabel Tujuan Negara Impor Kota Batam Tahun 2018

Negara Tujuan / Country of Destination	Berat Bersih / Net Weight (Ribu Ton)	Nilai FOB / FOB Value (Juta US\$)
1. Singapura	877.27	2717.21
2. Tiongkok	434.18	2440.33
3. Jepang	257.86	630.64
4. Malaysia	406.55	572.03
5. Amerika Serikat	34.38	339.96
6. Jerman	92.53	308.24
7. Perancis	19.14	267.16
8. Taiwan	42.58	163.96
9. Korea Selatan	40.87	140.72
10. Philipina	2.81	134.4
<b>Jumlah / Total</b>	<b>2208.62</b>	<b>7714.65</b>

Sumber: Buku Saku Data Strategis Kota Batam Tahun 201

Tabel 1.9 Tabel Ekspor Kota Batam menurut Golongan Barang HS 2 Digit Tahun 2018

<b>Golongan Barang / Commodity Group</b>	<b>Berat Bersih / Net Weight (Ribu Ton)</b>	<b>Nilai FOB / FOB Value (Juta US\$)</b>
1. Mesin/peralatan listrik	91.2	2690.20
2. Bahan bakar mineral	4180.12	1637.41
3. Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	62.43	1046.04
4. Benda-benda dari besi dan Baja	208.21	593.66
5. Minyak dan lemak hewan/nabati	1501.69	932.95
<b>Jumlah / Total</b>	<b>6043.65</b>	<b>6900.26</b>

S

Sumber : Buku Saku Data Strategis Kota Batam Tahun 2019

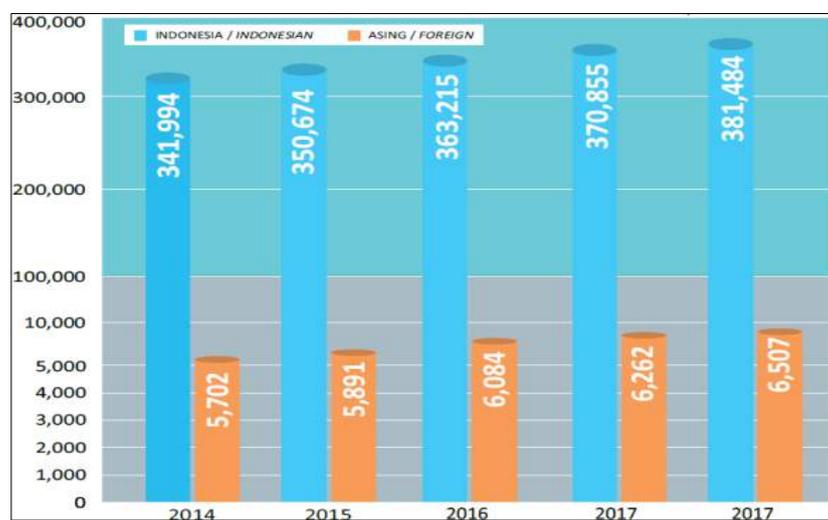
### 1.2.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari indikator strategis yang dicanangkan BP saat ini. Hal ini tidak terlepas dari salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, sebagaimana juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya, ialah laju pertumbuhan angkatan kerja meningkat dengan cepat, melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga berakibat bertambahnya jumlah pengangguran.

Untuk menyikapi kecenderungan tersebut, khususnya di Kota Batam, diperlukan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sekaligus sebagai bahan evaluasi atas pencapaian pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sampai dengan Desember tahun 2018 terdaftar sebanyak 387,991 orang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini meningkat sebesar 2.86% dibandingkan dengan keadaan Juni 2018 jumlah tenaganya sebanyak 377,177 Orang. Sebanyak 50.7 % tenaga kerja bekerja pada sektor industri; 15.73 % disektor jasa; 13.23 % disektor perdagangan; 10,65% disektor bangunan.

Jumlah tenaga kerja perempuan mencapai 152.115 orang (39,42 %) dan tenaga kerja laki-laki mencapai 235.876 orang (60,58%) dari total seluruh pekerja. Jumlah tenaga kerja asing tercatat sampai dengan Desember 2018 di Kota Batam sebanyak 6,507 Orang, terdiri dari 6,068 Orang pekerja laki-laki atau 93,25% dan 439 orang pekerja perempuan atau 6,74 %. Perbandingan antara tenaga kerja formal dengan jumlah penduduk adalah 1 : 3.64.



Gambar 1.7 Grafik pertumbuhan tenaga kerja Lokal dan Asing 2014 – 2018

Sumber: Development Progress of Batam 2018, edisi II Volume XXXIV

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Otonomi daerah melahirkan kebutuhan data hingga level Kabupaten/Kota. Data-data tersebut diperlukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan. Mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran

rumah tangga baik untuk komoditas makanan maupun non makanan. Dari data tersebut diperoleh rata-rata konsumsi dan pengeluaran rumah tangga serta rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita. Data konsumsi dan pengeluaran yang dirinci menurut kelompok komoditas dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Batam mencapai 65,25 persen. Sejalan dengan komposisi dalam piramida angkatan kerja, TPAK laki- laki lebih besar daripada TPAK perempuan, yaitu 84,28 persen berbanding 45,65 persen. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, TPAK akan semakin tinggi.

Tabel 1.10 Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Batam 2012 – 2018

No.	Jenis Kelamin	2012	2013	2014	2015	2017	2018
1	TPAK Laki-laki	90,14	88,67	88,13	89,10	82,16	84,28
2	TPAK Perempuan	49,91	47,81	46,26	44,90	52,54	45,65
<b>TPAK Total %</b>		<b>70,46</b>	<b>68,68</b>	<b>67,63</b>	<b>67,46</b>	<b>67,65</b>	<b>65,25</b>

Sumber: BPS Kota Batam, Sakernas 2018

#### 1.2.1.4 Pendapatan Regional

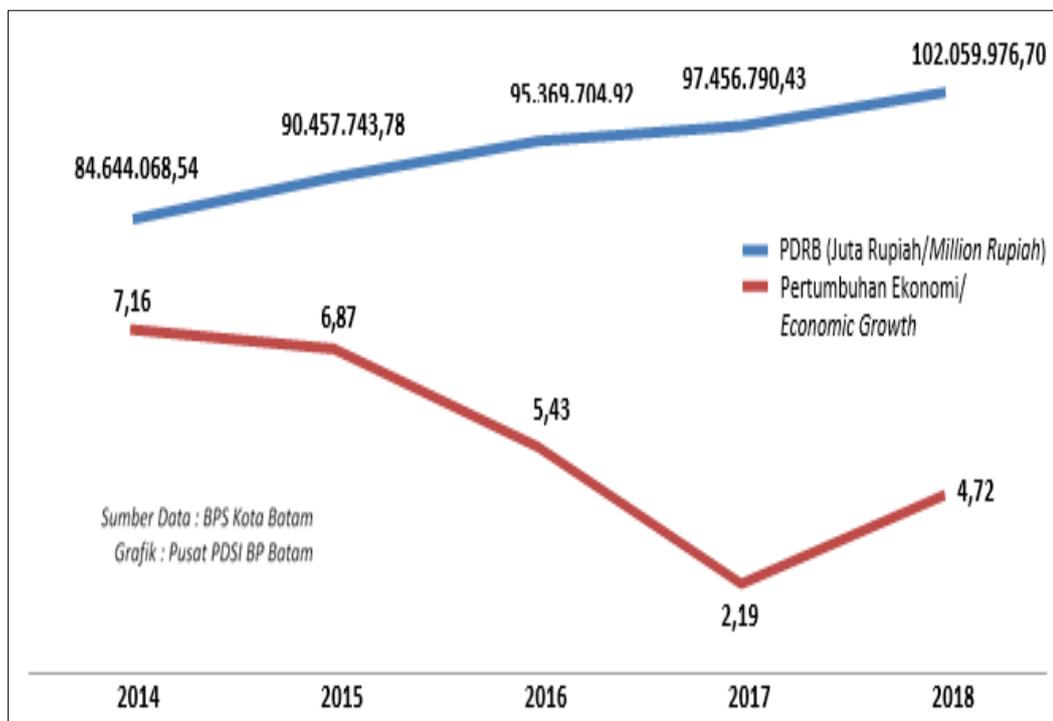
Berdasarkan data dari BPS kota Batam Perkembangan PDRB di Kota Batam menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam periode 2014-2018. Pada tahun 2014, PDRB sebesar 84,6 Triliun Rupiah, lalu meningkat sebesar 4,8 % menjadi 102,1 Triliun Rupiah pada tahun 2018.

Secara sektoral, sektor industri pengolahan (54,24%), konstruksi (19,61%), serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,61%) memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama perekonomian, yang ditandai dengan nilai PDRB tinggi. Sementara sektor yang kurang berperan dalam perekonomian Kota Batam adalah sektor

pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta jasa lainnya.

Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi merupakan prosentase yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dilihat dari rata – rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-2018, laju pertumbuhan Kota Batam mencapai 4,8%. Hal ini menunjukkan perekonomian di Kota Batam cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dari sisi besaran laju pertumbuhan ekonomi, secara umum perekonomian di Kota Batam cenderung mengalami perlambatan, yaitu dari 7,8% pada tahun 2011 menjadi sebesar 2,2% pada tahun 2017, yang merupakan titik terendahnya dalam satu dekade terakhir.



Gambar 1.8 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2014-2018

Sumber: Development Progress of Batam 2019, edisi I Volume XXXV

## 1.2.2 Kondisi Eksisting Kinerja Unit Kerja Layanan BP Batam

Kinerja BP Batam secara keseluruhan dalam Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11 Kinerja BP Batam Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Batam Secara Keseluruhan	6.3%	5.92%
2	Investasi pada kawasan pengusaha	Komitmen nilai investasi	900.000.000 (US\$)	461.044.862 (US\$)
Kurs 1 USD= Rp. 14.500				Rp. 6.685.150.499.000.-
3	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	-
4	Pertumbuhan Pendapatan Layanan yang signifikan	Realisasi jumlah PNBK tahun 2019	Rp. 1,273 Triliun	Rp. 1,330 Triliun
5	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pelayanan publik	≥ 76,61 (Skala 1-100) (Predikat Baik)	80,55 (Predikat Baik)
6	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	71%
7	Pengelolaan BP Batam yang bebas dari Korupsi	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	100%	77.5%
8	Utilisasi aset yang dikelola oleh BP Batam	Peningkatan realisasi utilisasi aset	10%	10%
9	Pengelolaan BP Batam yang akuntabel	Persentase penyelesaian pekerjaan fisik dari belanja modal	100%	89.99%
10	Transformasi dari Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase penyelesaian Pengusulan 4 (empat) KEK Kee Dewan Kawasan	100%	75%

Sumber Data : Pusat Harmonisasi Kebijakan, 2019

### 1.2.2.1 Kinerja Keuangan

Realisasi penerimaan BLU BP Batam dalam Semester I 2019 adalah sebesar Rp.627,45 miliar atau 49,28 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.273,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan kondisinya dalam periode yang sama TA 2018, terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 17,23%. Tiga urutan tertinggi penerimaan diperoleh dari unit layanan Pengelolaan Lahan, Pelabuhan Laut, dan Bandara.

Realisasi Belanja BP Batam dalam semester I tahun 2019 adalah sebesar Rp.466,97 miliar atau sebesar 25,65 % yang terdiri atas belanja PNBP sebesar 31,54 % dari alokasi sebesar Rp.1.273,3 miliar, belanja Rupiah Murni (RM) sebesar 9,25% dari alokasi sebesar Rp.340 miliar, belanja Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 17,28% dari alokasi Rp.193,6 miliar, dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP– PHLN) sebesar 3,13 % dari alokasi sebesar Rp.13,9 miliar.

Memperhatikan data realisasi penerimaan dan belanja yang bersumber dari PNBP/BLU hingga periode akhir bulan Juni 2019, masih menunjukkan surplus anggaran BLU BP Batam sebesar Rp.225,82 miliar, sehingga saldo kas sampai dengan Semester-I tahun 2019 adalah sebesar Rp.812 miliar.

Mengacu pada realisasi belanja yang secara keseluruhan lebih linier dari kondisi tahun 2018, untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan realisasi penerimaan BLU akan mencapai Rp.1.296,4 miliar.

Tabel 1.12 Kinerja Penerimaan PNBP BP Batam Tahun 2015 s.d 2019

NO.	KETERANGAN	2015			2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		Juta Rp	Juta Rp		Juta Rp	Juta Rp	
<b>I</b>	<b>Kantor Pusat</b>	<b>18,803.95</b>	<b>62,832.30</b>	<b>334.14</b>	<b>41,245.00</b>	<b>80,277.00</b>	<b>194.63</b>
a	Direktorat Pemanfaatan Aset	8,846.91	11,467.34	129.62	16,178.00	16,576.99	102.47
b	Direktorat Pembangunan Prasarana & Sarana	-	6,083.27		3,000.00	1,786.72	59.56
c	Pusat Data & Sistem Informasi	795.91	6,106.05	767.17	12,176.50	9,938.36	81.62
d	Direktorat Lalu Lintas Barang	306.12	39.00	12.74	150.00	89.62	59.75
e	Biro Keuangan	8,855.00	39,136.64	441.97	9,740.50	51,885.31	532.68
<b>II</b>	<b>Unit Mandiri</b>	<b>740,168.05</b>	<b>922,076.24</b>	<b>124.58</b>	<b>793,624.20</b>	<b>859,024.31</b>	<b>108.24</b>
a	Kantor Pengelolaan Lahan	296,172.05	452,007.73	152.62	330,469.20	352,015.20	106.52
b	BUBU Hang Nadim	113,855.00	149,764.57	131.54	123,584.00	172,572.13	139.64
c	Badan Pengelola Pelabuhan	210,855.00	204,814.94	97.14	214,050.00	240,072.43	112.16
d	Rumah Sakit BP Batam	90,245.00	89,470.85	99.14	95,717.00	62,370.42	65.16
e	Kantor Pengelolaan Air & Limbah	26,541.00	24,455.74	92.14	27,744.00	30,996.86	111.72
f	Kantor Perwakilan Jakarta	2,500.00	1,562.40	62.50	2,060.00	997.27	48.41
<b>III</b>	<b>Jumlah (I+II)</b>	<b>758,972.00</b>	<b>984,908.54</b>	<b>129.77</b>	<b>834,869.20</b>	<b>939,301.31</b>	<b>112.51</b>

NO.	KETERANGAN	2017			2018		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		Juta Rp	Juta Rp		Juta Rp	Juta Rp	
<b>I</b>	<b>Kantor Pusat</b>	<b>61,742.45</b>	<b>77,019.76</b>	<b>124.74</b>	<b>54,513.43</b>	<b>56,025.71</b>	<b>102.77</b>
a	Direktorat Pemanfaatan Aset	21,947.45	16,397.71	74.71	24,085.13	16,803.31	69.77
b	Direktorat Pembangunan Prasarana & Sarana	2,500.00	3,594.81	143.79	3,630.00	5,119.31	141.03
c	Pusat Data & Sistem Informasi	9,995.00	7,480.39	74.84	12,158.14	7,450.74	61.28
d	Direktorat Lalu Lintas Barang	50.00	70.22	140.44	90.00	487.35	541.50
e	Biro Keuangan	27,250.00	49,476.62	181.57	14,550.16	26,165.00	179.83
<b>II</b>	<b>Unit Mandiri</b>	<b>1,096,455.38</b>	<b>897,073.09</b>	<b>81.82</b>	<b>1,467,829.91</b>	<b>1,198,750.05</b>	<b>81.67</b>
a	Kantor Pengelolaan Lahan	541,605.72	167,509.21	30.93	575,932.92	449,434.31	78.04
b	BUBU Hang Nadim	192,966.06	237,592.16	123.13	262,117.88	247,485.73	94.42
c	Badan Pengelola Pelabuhan	235,557.22	397,967.15	168.95	480,000.00	401,496.58	83.65
d	Rumah Sakit BP Batam	96,217.00	65,144.17	67.71	100,946.00	72,554.49	71.87
e	Kantor Pengelolaan Air & Limbah	28,409.38	28,222.66	99.34	47,133.11	26,776.47	56.81
f	Kantor Perwakilan Jakarta	1,700.00	637.75	37.51	1,700.00	1,002.47	58.97
<b>III</b>	<b>Jumlah (I+II)</b>	<b>1,158,197.83</b>	<b>974,092.85</b>	<b>84.10</b>	<b>1,522,343.34</b>	<b>1,254,775.76</b>	<b>82.42</b>

NO	UNIT PENGHASIL	TA 2019			
		Target (Juta Rp)	Target	Realisasi (Juta Rp)	%
<b>I</b>	<b>KANTOR PUSAT</b>	<b>61,650.00</b>	<b>61,650.00</b>	<b>74,560.90</b>	<b>120.94</b>
1	Direktorat Pemanfaatan Aset	22,000.00	22,000.00	16,050.98	72.96
2	Direktorat Prasarana & Sarana	5,500.00	5,500.00	4,802.05	87.31
3	Pusat Data dan Sistem Informasi	15,000.00	15,000.00	8,426.53	56.18
4	Direktorat Lalu Lintas Barang	150.00	150.00	1,191.27	794.18
5	Biro Keuangan	19,000.00	19,000.00	44,090.08	232.05
<b>II</b>	<b>UNIT MANDIRI</b>	<b>1,211,657.50</b>	<b>1,211,657.50</b>	<b>1,256,024.30</b>	<b>103.66</b>
1	Kantor Pengelolaan Lahan	300,000.00	300,000.00	575,687.78	191.90
2	BUBU Hang Nadim	278,007.50	278,007.50	201,893.46	72.62
3	Badan Pengelola Pelabuhan Batam	530,450.00	530,450.00	359,220.28	67.72
4	Rumah Sakit BP Batam	60,000.00	60,000.00	88,625.81	147.71
5	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	42,000.00	42,000.00	29,628.60	70.54
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1,200.00	1,200.00	968.37	80.70
<b>III</b>	<b>JUMLAH (I+II)</b>	<b>1,273,307.50</b>	<b>1,273,307.50</b>	<b>1,330,585.21</b>	<b>104.50</b>

Sumber Data : Biro Keuangan; Pusrenpros, 2019

Dari tabel 1.12 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa unit kerja yang pencapaiannya relatif masih kurang di tahun 2019 yaitu :

1. Unit Bandara Hang Nadim, disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang pesawat yang datang/pergi dari Batam hal ini diakibatkan adanya dampak kenaikan tiket pesawat sehingga penurunan pendapatan dari PJP2U.
2. Unit kerja Pelabuhan Laut dalam hal bongkar muat dikarenakan adanya kerusakan dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar. Penanganan terkait masalah ini akan dilakukan percepatan proses pelelangan dengan metode Penunjukan Langsung atau dengan menggunakan metode design and built.

3. Unit kerja Kantor PPDSI disebabkan beberapa hal, diantaranya:
  - a) Adanya proses pembayaran salah satu *tenan* yang gagal bayar, kemudian menjadi piutang;
  - b) Terdapat penurunan penerimaan disebabkan adanya *tenan* potensial yang tidak lagi bekerjasama dengan *Data Center* BP Batam dikarenakan instansi tersebut akan membangun data centre sendiri dan anggaran IT dikurangi;
  - c) Adanya beberapa kendala (kekurangan SDM, keterbatasan standarisasi Data Centre BP Batam);
  - d) Permintaan calon *tenan* yang belum bisa diakomodir (harga diskon, fasilitas aplikasi monitoring jaringan yang belum tersedia).

Kinerja Keuangan BP Batam sampai Oktober Tahun 2019 sebagai berikut, realisasi belanja BP Batam sebesar Rp. 1.021,9 miliar atau sebesar 49,51% dari target belanja BP Batam tahun 2019 sebesar Rp. 2.064,19 miliar.

Tabel 1.13 Postur Anggaran BP Batam Tahun 2015 Hingga Oktober 2019

NO.	KETERANGAN	2015			2016			2017		
		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		Juta Rp	Juta Rp	%	Juta Rp	Juta Rp	%	Juta Rp	Juta Rp	%
I	PNBP	909,048.96	840,785.29	92.49	1,458,858.93	1,312,488.86	89.97	1,478,495.16	1,154,322.46	78.07
II	Rupiah Murni	200,728.73	145,166.71	72.32	146,723.81	97,008.17	66.12	283,617.60	256,003.81	90.26
III	Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	123,555.60	32,746.76	26.50	164,444.25	-	-	286,240.00	111,174.57	38.84
IV	Belanja Rupiah Murni Pendamping	13,950.67	10,561.27	75.70	11,073.88	7,692.43	69.46	22,750.00	11,993.26	52.72
	Jumlah	1,247,283.96	1,029,260.03	82.52	1,781,100.87	1,417,189.46	79.57	2,071,102.76	1,533,494.09	74.04

NO.	KETERANGAN	2018			2019			
		PAGU	REALISASI		PAGU (AWAL)	PAGU (REVISI)	REALISASI (s.d. Oktober)	
		Juta Rp	Juta Rp	%	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	%
I	PNBP	1,522,343.34	1,110,638.46	72.96	1,273,307.50	1,516,611.49	780,723.83	51.48
II	Rupiah Murni	150,014.62	139,152.44	92.76	340,000.00	340,000.00	157,088.52	46.20
III	Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)	334,551.43	102,459.36	30.63	193,621.57	193,621.57	83,018.91	42.88
IV	Belanja Rupiah Murni Pendamping	39,250.14	16,607.85	42.31	13,961.90	13,961.90	1,146.19	8.21
Jumlah		2,046,159.53	1,368,858.10	66.90	1,820,890.96	2,064,194.95	1,021,977.45	49.51

Sumber Data : Biro Keuangan; Pusrenpros, 2019

### 1.2.2.2 Unit Kerja Layanan Pelabuhan Laut

Letak Pulau Batam yang strategis ditengah jalur transportasi antara Eropa dan Asia Timur tidak hanya menjadikan Batam sebagai pintu masuk barang dan jasa untuk wilayah Indonesia namun juga dapat menjadi tempat transit ketujuan berikutnya. Hal ini sejalan dengan salah satu Misi BP Batam yaitu menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia.

Pelabuhan di Batam dibagi berdasarkan wilayah kerja, ada 5 (lima) wilayah kerja pelabuhan laut, yaitu :

1. Terminal Sekupang;
2. Terminal Batu Ampar;
3. Terminal Nongsa-Batam Center;
4. Terminal Kabil/Panau;
5. Rempang-Galang & Perairan.

Selama tahun 2019 Kantor Pelabuhan Laut BP Batam mencatat kunjungan kapal penumpang, kapal barang, pelayanan terminal penumpang, pelayanan terminal konvensional, pelayanan terminal peti kemas yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel. 1.14 Rekapitulasi Kinerja di Pelabuhan Batam

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
<b>Badan Pengelola Pelabuhan / Badan Usaha Pelabuhan</b>										
<b>a. Kunjungan Kapal Laut</b>	<b>99,675</b>	<b>calls</b>	<b>70,577</b>	<b>calls</b>	<b>75,941</b>	<b>calls</b>	<b>71,728</b>	<b>calls</b>	<b>31,104</b>	<b>calls</b>
- Pergerakan Kapal Penumpang	75,430	calls	48,298	calls	48,351	calls	48,973	calls	19,934	calls
- Pergerakan Kapal Barang	24,245	calls	22,279	calls	27,590	calls	22,755	calls	11,170	calls
<b>b. Bongkar/Muat Barang</b>	<b>6,089,000</b>	<b>ton</b>	<b>6,583,000</b>	<b>ton</b>	<b>5,809,000</b>	<b>ton</b>	<b>5,118,000</b>	<b>ton</b>	<b>2,679,975</b>	<b>ton</b>
- Bongkar Domestik	5,139,000	ton	5,425,000	ton	4,992,000	ton	4,509,000	ton	2,258,234	ton
- Muat Domestik	950,000	ton	1,158,000	ton	817,000	ton	609,000	ton	421,741	ton
<b>c. Ekspor/Impor Barang</b>	<b>4,295,000</b>	<b>ton</b>	<b>4,306,000</b>	<b>ton</b>	<b>6,480,000</b>	<b>ton</b>	<b>2,850,000</b>	<b>ton</b>	<b>1,413,107</b>	<b>ton</b>
- Ekspor	1,782,000	ton	1,652,000	ton	3,732,000	ton	1,945,000	ton	916,763	ton
- Impor	2,513,000	ton	2,654,000	ton	2,748,000	ton	905,000	ton	496,344	ton
<b>d. Penumpang Domestik</b>	<b>2,734,000</b>	<b>orang</b>	<b>2,697,000</b>	<b>orang</b>	<b>2,860,000</b>	<b>orang</b>	<b>3,323,000</b>	<b>orang</b>	<b>1,649,621</b>	<b>orang</b>
- Kedatangan	1,430,000	orang	1,423,000	orang	1,466,000	orang	1,654,000	orang	819,717	orang
- Keberangkatan	1,304,000	orang	1,274,000	orang	1,394,000	orang	1,669,000	orang	829,904	orang
<b>e. Penumpang Luar Negeri</b>	<b>5,920,000</b>	<b>orang</b>	<b>5,956,000</b>	<b>orang</b>	<b>6,290,000</b>	<b>orang</b>	<b>7,026,000</b>	<b>orang</b>	<b>3,795,079</b>	<b>orang</b>
- Kedatangan	2,909,000	orang	2,840,000	orang	3,098,000	orang	3,517,000	orang	1,963,272	orang
- Keberangkatan	3,011,000	orang	3,116,000	orang	3,192,000	orang	3,509,000	orang	1,831,807	orang

Sumber Data : Kantor Pelabuhan Laut; Pusrenpros, 2019

Dari data yang disajikan didalam tabel 1.14 tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perlambatan dalam capaian kinerja pelabuhan laut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya kerusakan dermaga Batu Ampar, operasional di lapangan kemungkinan akan mengalami perlambatan, disebabkan adanya pekerjaan perbaikan longsor dermaga tersebut.

### 1.2.2.3 Unit Kerja Layanan Bandar Udara

Bandara Udara Hang Nadim merupakan pelabuhan udara internasional yang mulai dioperasikan tahun 1983. Pelabuhan udara ini memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia sepanjang 4.025 m, memiliki ukuran apron seluas 130.500 m<sup>2</sup>.

Tabel 1.15 Rekapitulasi Kinerja di Bandara Hang Nadim BP Batam

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
<b>BUBU Hang Nadim / Badan Usaha Bandara dan Teknologi Informasi</b>										
<b>a. Penumpang Datang/Berangkat</b>	<b>6,647,785</b>	<b>orang</b>	<b>6,136,339</b>	<b>orang</b>	<b>6,373,949</b>	<b>orang</b>	<b>3,357,615</b>	<b>orang</b>	<b>4,543,255</b>	<b>orang</b>
- Datang	2,513,125	orang	3,036,646	orang	2,894,134	orang	1,611,157	orang	2,166,599	orang
- Berangkat	2,338,020	orang	2,776,524	orang	2,840,227	orang	1,501,001	orang	2,044,328	orang
- Transit	1,796,640	orang	323,169	orang	639,588	orang	245,457	orang	332,328	orang
<b>b. Pergerakan Pesawat</b>	<b>40,424</b>	<b>flights</b>	<b>48,147</b>	<b>flights</b>	<b>45,051</b>	<b>flights</b>	<b>24,738</b>	<b>flights</b>	<b>35,960</b>	<b>flights</b>
- Datang	20,214	flights	24,074	flights	22,527	flights	12,370	flights	17,976	flights
- Berangkat	20,210	flights	24,073	flights	22,524	flights	12,368	flights	17,984	flights
<b>c. Kargo</b>	<b>33,596</b>	<b>ton</b>	<b>35,942</b>	<b>ton</b>	<b>44,977</b>	<b>ton</b>	<b>55,018</b>	<b>ton</b>	<b>43,559</b>	<b>ton</b>
- Bongkar	23,963	ton	23,944	ton	25,998	ton	27,142	ton	18,316	ton
- Muat	9,633	ton	11,998	ton	18,979	ton	27,876	ton	25,243	ton

Sumber Data : Bublik; Pusrenpros, 2019

Dalam rangka peningkatan pelayanan di Bandar Udara pada tahun 2019 akan dilaksanakan pengembangan Terminal-2 dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sedang dari sumber DIPA BP Batam tahun anggaran 2019 sedang dilaksanakan pengembangan paralel *taxiway* arah *run way* 04 dan pembangunan apron cargo tahap-1 dalam rangka peningkatan adanya pertumbuhan kargo pesawat sekaligus mengakomodasikan rencana pengembangan Bandara Hang Nadim sebagai *logistic hub* dan pusat *Repair Maintenance and Overhaul* (MRO) di Batam.

#### 1.2.2.4 Kinerja RS-BP Batam

Kunjungan pasien RSOB-BP Batam periode Januari s.d Juni 2019 mencapai 6.377 kunjungan, dimana pada periode yang sama tahun 2018 mencapai 9.179 kunjungan. Kontributor jumlah kunjungan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.16 Kinerja Rumah Sakit BP Batam Tahun 2015-2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
<b>Rumah Sakit BP Batam</b>										
a. Pasien Rawat Jalan	99,481	orang	110,640	orang	113,525	orang	130,172	orang	91,928	orang
b. Pasien Rawat Inap	9,762	orang	8,801	orang	8,409	orang	9,173	orang	9,192	orang
c. BOR <sup>(1)</sup>	75.79	%	73.04	%	63.75	%	76.99	%	153	%
d. LOS <sup>(2)</sup>	3.98	hari	4.02	hari	3.65	hari	3.50	hari	6	hari
e. TOI <sup>(3)</sup>	1.50	hari	1.85	hari	2.64	hari	1.35	hari	3	hari

Sumber Data : RSBP; Pusrenpros, 2019

Berdasarkan tabel diatas hampir semua mengalami perlambatan pertumbuhan, hal ini disebabkan karena :

1. Pemberlakuan sistem rujukan yang berlaku pada pasien BPJS, dimana pasien tidak bisa langsung menuju rumah sakit tipe B tetapi harus melewati pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas pelayanan tingkat 1 seperti klinik, puskesmas melalui fasilitas rujukan tingkat 2 Rumah Sakit tipe C.
2. Perubahan pola pelayanan kesehatan secara nasional dengan berlakunya BPJS yang memberlakukan sistem *reveral*, sehingga terjadi pergeseran pasien-pasien dan penumpukan pasien di RS tipe C (fasilitas pelayanan tingkat 2)
3. Kerusakan alat CT Scan yang terjadi sejak awal tahun 2019.

Indikator yang digunakan oleh rumah sakit BP Batam berkaitan dengan tingkat Hunian Rawat inap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17 Indikator Kinerja & Mutu Pelayanan RS BP Batam  
Tahun 2018-2019

Indikator Efisiensi RS	Satuan	Indikator Kinerja & Mutu		
		Standar Efisiensi (menurut Kemenkes)	2018	2019 (Semester I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BOR	%	65-85	76,99	55,94
LOS	Hari	6-9	3,50	3,03
TOI	Hari	1-3	1,35	4,10
BTO	Per-Tahun	40-50	53,02	24,45
	Per-Bulan	3,33-4,16	4,42	3,68

Sumber Data : RSBP; Pusrenpros, 2019

Keterangan :

1. *Bed Occupancy Rate (BOR)* / persentase pemakaian tempat tidur
2. *Bed Turn Over (BTO)* / frekuensi pemakaian tempat tidur
3. *Turn Over Intensive (TOI)* / rata – rata ketersediaan tempat tidur
4. *Gross Death Rate (GDR)* / tingkat kematian
5. *Length Of Stay (LOS)* / lamanya rawat inap

Dari tabel 1.17 diatas dapat dilihat terjadi penurunan untuk BOR dikarenakan jumlah tempat tidur bertambah, yang semula 200 unit menjadi 300 unit dengan dimulai operasional Gedung B.

#### 1.2.2.4.1 Permasalahan RS BP Batam

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM )

1. Kebutuhan penambahan tenaga yang sebagian besar belum terealisasi (dokter spesialis, perawat, tenaga penunjang, Farmasi dan Umum).
2. Tingkat kesadaran SDM dalam hal kedisiplinan, kerapian, kepedulian yang masih rendah.

**b. Fasilitas Sarana Fisik**

1. Masih kurangnya jumlah ruangan rawat inap;
2. Perlunya peremajaan peralatan furnitur rumah sakit

**c. Fasilitas Peralatan Medik Dan Penunjang**

Banyak peralatan medik dan penunjang diagnostik yang perlu peremajaan karena adanya perkembangan teknologi

**d. Fasilitas Umum**

Fasilitas ruangan parkir yang masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah. Dari beberapa permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan yang sudah dapat diatasi di tahun 2019 ini, kegiatan tersebut antara lain :

1. Telah teralokasikannya anggaran untuk revitalisasi peralatan medik dan penunjang.
2. Telah dilakukan rotasi internal di lingkungan BP Batam guna memenuhi kekurangan tenaga penunjang di RSBP, sedangkan untuk tenaga medis masih dalam proses penjajakan kerjasama dengan Rumah Sakit lain.
3. Telah selesainya pembangunan Gedung-B RSBP untuk mengakomodir kebutuhan ruang rawat inap serta pemenuhan kelengkapan sarana penunjang bangunan antara lain parkir.

**1.2.2.5 Unit Kerja Pengelolaan Air dan Limbah**

**1.2.2.5.1 Air Minum**

Dalam proses penyediaan air minum di Batam, BP Batam sejak tahun 1974 dan sampai dengan tahun 2008 telah selesai membangun 6 (enam) bendungan /waduk di Pulau Batam dan 1 (satu) waduk di Pulau Rempang, disamping itu terdapat pula waduk dengan tipe sederhana eks pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang dibangun oleh UNHCR. Tahun 2009 BP Batam mulai melaksanakan pembangunan waduk Sei Tembesi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan air minum sekaligus meningkatkan kapasitas penyediaan air minum di Pulau Batam sehingga Bendungan/Waduk yang ada di Barelang berjumlah 8 (delapan) yang terdiri

dari, Bendungan/Waduk Sei Harapan, Bendungan/Waduk Sei Baloi, Bendungan/Waduk Nongsa, bendungan/Waduk Sei Ladi, Bendungan/Waduk Muka Kuning, Bendungan/Waduk Duriangkang, Bendungan/Waduk Rempang dan Bendungan/Waduk Sei Gong (Galang).

Sampai dengan tahun 2019, jumlah satuan sambungan aktif air minum (pelanggan) yang tercatat di ATB adalah sebanyak 234.572 pelanggan. Adapun kapasitas air minum rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 3.165,76 lt/det dari 7 (tujuh) kapasitas instalasi Penolahan Air Bersih (IPAB) yang terpasang sebesar 3.535 lt/det. Dalam rangka optimalisasi waduk telah dilakukan beberapa modifikasi sehingga IPAB dapat ditingkatkan dari kapasitas dasarnya.

Tabel 1.18 Penggunaan Air Baku BP Batam 2015 – 2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan	Realisasi	Satuan
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah / Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan										
a. Pemakaian Air Baku (BIC dan ATB)	100,680,578	M <sup>3</sup>	100,266,869	M <sup>3</sup>	98,361,770	M <sup>3</sup>	101,844,611	M <sup>3</sup>	105,767,875	M <sup>3</sup>
b. Pendapatan Air Baku (BIC dan ATB)	17,010	miliar Rp	16,952	miliar Rp	16,915	miliar Rp	17,934	miliar Rp	19,618	miliar Rp
c. Pendapatan sewa lahan Limbah B3	410.00	juta Rp	269.00	juta Rp	739.00	juta Rp	503.00	juta Rp	600	juta Rp
d. Limbah domestik	38,820	M <sup>3</sup>	42,822	M <sup>3</sup>	20,407	M <sup>3</sup>	19,547	M <sup>3</sup>	22,516	M <sup>3</sup>
e. Pendapatan limbah domestik	378	juta Rp	437	juta Rp	420	juta Rp	364	juta Rp	463	juta Rp

Sumber Data : Kantor Air; Pusrenpros, 2019

Dari tabel 1.18 diatas jika terjadi rencana peningkatan kebutuhan air baku sebesar 1.193.798 m<sup>3</sup> atau 1,17 % hal disebabkan karena ada kebutuhan air bersih melalui penyambungan konsumen baru.

BP Batam telah mempunyai program air minum yang langsung dapat dikonsumsi, hanya saja masih di tingkat WTP, artinya air yang di WTP sekarang kondisinya sudah langsung layak diminum. Telah ada upaya penyediaan air minum yang langsung layak diminum yaitu di fasilitas publik secara gratis (seperti di beberapa masjid, alun – alun engku putri, di beberapa kantor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik) dan itu langsung dapat diminum, hanya saja distribusi air minum yang langsung layak minum di rumah tangga/konsumen masih belum karena harus melakukan *flushing*

pipa – pipa distribusi seluruh Batam sepanjang kurang lebih 4000 Km, dan juga harus melakukan perawatan dan penggantian pipa secara periodik untuk mendapatkan air yang langsung dapat diminum ditingkat konsumen.

#### **1.2.2.5.2 Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3**

Merujuk Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang sampah dan limbah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah. Hampir semua sampah bisa didaur ulang baik untuk pupuk atau lainnya.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.
3. Sampah identik dengan kegiatan manusia secara individu maupun berkelompok. Limbah lebih identik dengan suatu kegiatan atau proses yang lebih kompleks seperti yang ada di lingkungan industri. Hasil kegiatan atau aktivitas atau proses industri yang tidak dapat digunakan kembali dapat disebut limbah, tetapi beberapa limbah industri kini dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, urusan persampahan di Kota Batam adalah kewenangan dari Pemerintah Kota Batam. Hal ini diatur didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Batam.

#### **a. Limbah Domestik**

BP Batam telah membangun sarana pengolahan air limbah domestik/instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jumlah air limbah terkelola selama 2018 sebesar 18.544 m<sup>3</sup>, dengan spesifikasi instalasi pengolahan sebagai berikut :

1. Kapasitas pengolahan sebesar 33 lt/det;
2. Jaringan pipa air limbah sepanjang 10.198 meter;
3. Jumlah rekanan sebanyak 11 perusahaan;
4. Metode pengolahan yang digunakan *Biological Treatment + Chemical Treatment*, dengan kemampuan penurunan BOD 300 mg/liter ke 20 mg/liter.

#### **b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan pada fasilitas kawasan pengelolaan limbah industri (KPLI-B3) seluas 19,7 Ha dan bekerjasama dengan 26 *tenant*. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh KPLI-B3 adalah fasilitas TDLI-B3 yang berupa gudang tertutup seluas 390 m<sup>2</sup> (1 unit) dan gudang terbuka seluas 390 m<sup>2</sup> (1 unit) dan untuk fasilitas yang telah tersedia untuk pengolahan limbah B-3 terdiri dari *incinerator, destilasi (solvent), waste water treatment plant, cooper slag, dan karbid, oil & sludge treatment* sedangkan fasilitas yang direncanakan dimasa mendatang terdiri dari *metal recovery*, daur ulang limbah cair dan pengolahan plastik. Selama 2018 telah terealisasi pengelolaan limbah B3 melalui TDLI/KPLI-B3, limbah cair 2.316.795 liter, limbah padat 10.363.397 Kg, sludge 622.920 Kg.

Tabel. 1.19 Perkembangan Limbah B3 Tahun 2012 – 2018 di KPLI  
B3 Kabil

TAHUN	JENIS LIMBAH		
	CAIR/Lt	PADAT/Kg	SLUDGE/Kg
2012	5,980,959	30,369,107	1,923,249
2013	5,343,237	29,078,633	2,905,261
2014	4,399,732	27,967,375	1,545,302
2015	3,730,943	40,371,643	1,563,530
2016	5,544,102	42,340,266	4,544,102
2017	9,995,603	50,383,782	5,875,496
2018	12,283,676	67,399,595	6,134,853
<b>TOTAL</b>	<b>47,278,252</b>	<b>287,910,401</b>	<b>24,491,793</b>

Sumber Data : Kantor Air; Pusrenpros, 2019

Kinerja limbah B3 diukur dari total limbah yang dikelola. Hal ini merepresentasikan kapasitas dari luasan wilayah yang tersedia di KPLI. Berdasarkan banyaknya volume dan jenis limbah yang ada harus diolah saat ini maka perluasan lahan KPLI dipandang diperlukan.

#### 1.2.2.6 Unit Kerja Pengelolaan Lahan

Tujuan pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BP Batam adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha maupun untuk menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak tertentu yang dituangkan dengan surat perjanjian hukum. Dalam hal ini, hak pihak ketiga harus dilindungi sampai hak itu berakhir oleh Badan Pemegang HPL. Selama tidak terjadi pelanggaran atas persyaratan pemberian hak, maka hak pengelolaan dari badan tersebut tetap berjalan. Hingga semester I tahun 2019 kinerja Kantor Pengelolaan Lahan dapat dilihat pada tabel 1.20 berikut ini:

Tabel 1.20 Perbandingan Kinerja Layanan Lahan Tahun 2015-2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
Kantor Pengelolaan Lahan / Direktorat Pengelolaan Lahan										
a. Penerimaan UWT	405.99	miliar Rp	343.84	miliar Rp	131.06	miliar Rp	437.29	miliar Rp	288	miliar Rp
b. Administrasi Peralihan	5.75	miliar Rp	2.90	miliar Rp	5.81	miliar Rp	7.15	miliar Rp	6	miliar Rp
c. Perpanjangan UWT	172.22	ha	186.96	ha	134.93	ha	405.20	ha	227	ha
d. Alokasi Lahan Baru		ha								

Sumber Data : Direktorat Lahan; Pusrenpros, 2019

Tabel 1.21 Realisasi Alokasi Lahan s.d. Semester I Tahun 2019

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Luas Lahan / M <sup>2</sup>	
		Total (Perpres BBK 87/2011)	Realisasi Alokasi BP Batam
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00	117.412.841,18
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67	17.753.170,00
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13	4.524.353,77
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65	9.369.001,09
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31	1.129.488,25
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41	16.175.714,20
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30	60.754.331,89
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41	23.242.076,90
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82	-
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65	2.858.682,42
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68	998.521,59
12	Danau	26.270.713,55	11.599.922,88
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33	697.933,02
14	Sungai	393.158,53	393.158,53
<b>Total Luas Keseluruhan</b>		<b>457.788.953,44</b>	<b>266.909.195,72</b>

Sumber Data : Direktorat Lahan; Pusrenpros, 2019

### 1.2.2.7 Unit Kerja Direktorat Pemanfaatan Asset

Tolak ukur kinerja Direktorat Pemanfaatan Asset terbagi dalam hunian Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja yang terbagi dalam 5 lokasi rumah susun yang tersebar di berbagai daerah di Batam yaitu Sekupang, Batu Ampar, Muka Kuning dan Kabil. Selain itu pendapatan sewa gedung/ bangunan baik ruangan maupun gudang merupakan bagian dari pendapatan dan tolok ukur bagi kinerja pada Direktorat ini. Adapun perkembangan jumlah hunian Rusun hingga semester 1- 2019 mencapai 19.549 penyewa, serta pendapatan sewa gedung pada semester yang sama mencapai Rp. 6.875 juta yang diharapkan dapat tercapai pada akhir 2019 sebesar Rp.14.966 juta. Perkembangan kinerja dari Direktorat Pemanfaatan Asset dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.22 Kinerja Direktorat Pemanfaatan Asset Tahun 2015 – 2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
Direktorat Pemanfaatan Asset/ Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan										
a. Hunian Rusun BIDA (Okupansi)	37,065	penyewa	45,327	penyewa	40,128	penyewa	33,158	penyewa	41,339	penyewa
b. Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	10,509.35	juta Rp	12,804.59	juta Rp	15,310.56	juta Rp	16,180.51	juta Rp	16,067	juta Rp

Sumber Data : Direktorat Asset; Pusrenpros, 2019

Hingga semester I tahun 2019 BP Batam telah membangun 19 TW rumah susun berikut fasilitas sosial dan fasilitas umum di beberapa lokasi yaitu Batu Ampar, Muka Kuning, Sekupang, dan Kabil. Jumlah hunian rusun sampai dengan semester I tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.23 Kinerja Pengelolaan Rusun (Jumlah penghuni) Tahun 2018 – 2019

No	Lokasi Rusun	Jumlah Penghuni (Orang)	
		2018 (Sem I)	2019 (Sem I)
1	Sekupang	2.288	2.926
2	Batu Ampar	4.323	5.073
3	Muka Kuning	7.355	9.266
4	Kabil	2.001	2.227
<b>TOTAL</b>		<b>15.967</b>	<b>19.492</b>

Sumber Data : Direktorat Asset; Pusrenpros, 2019

#### 1.2.2.8 Unit Kerja Kantor Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi/ IT Center

Salah satu kebijakan reformasi birokrasi di BP-Batam adalah dengan penerapan teknologi informasi, peran ini awalnya hanya sebagai *supporting platform* bertransformasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *business process* yang ada di BP-Batam. Konsep pengembangan *e-government* di BP-Batam ini sejalan dengan fungsi BP-Batam itu sendiri yaitu fungsi pelayanan dan perusahaan yang dijabarkan dalam bidang pelayanan investasi (*e-public*), pelayanan administrasi (*e-admin*), pelayanan bidang usaha (*e-bisnis*) dan penyediaan *data center*.

Layanan IT yang dilakukan dari tahun 2015 diharapkan hingga akhir tahun 2019 dapat menghasilkan Rp. 38.43 miliar, melalui peningkatan jumlah *tenant* sebesar 83 *tenant*. Adapun perkembangan jumlah pendapatan layanan IT dan jumlah Tenan pertahun hingga semester 1-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.24 Realisasi Layanan PDSI Tahun 2015 - 2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
Pusat Pengelolaan Data dan SI / Badan Usaha Bandara dan Teknologi Informasi										
a. Layanan IT	6.11	miliar Rp	9.94	miliar Rp	7.48	miliar Rp	7.45	miliar Rp	2	miliar Rp
b. Jumlah Tenant	15	tenant	15	tenant	17	tenant	18	tenant	17	tenant

Sumber Data : PDSI; Pusrenpros, 2019

Dapat disampaikan pula realisasi PNBPN TA 2018 dan perkiraan realisasi PNBPN TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.25 Realisasi PNBPN per Layanan PDSI Tahun 2018 – 2019

LAYANAN	2018	2019 ( Semester I )
Colocation	31.200.000	1.711.505.000
Cloud	-	-
Managed Service	-	427.680.000
Training Centre	42.986.800	54.318.400
Lain-lainnya	-	-
<b>Total</b>	<b>74.186.800</b>	<b>2.193.503.400</b>

Sumber Data : PDSI; Pusrenpros, 2019

**Justifikasi terkait peningkatan realisasi PNBPN TA. 2019 yaitu:**

1. Penambahan *tenant*/langganan baru;
2. Penambahan layanan yang digunakan oleh *existing tenant*;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pemanfaatan IT Centre BP Batam;
4. Rencana revisi tarif.

**Adanya beberapa permasalahan terkait realisasi PNBP PDSI yaitu:**

1. Adanya proses pembayaran salah satu *tenan* yang gagal bayar, kemudian menjadi piutang;
2. Terdapat penurunan penerimaan disebabkan adanya *tenan* potensial yang tidak lagi bekerjasama dengan Data Centre BP Batam dikarenakan instansi tersebut akan membangun *data center* sendiri dan anggaran IT dikurangi;
3. Adanya beberapa kendala (kekurangan SDM, keterbatasan standarisasi Data Centre BP Batam);
4. Permintaan calon *tenan* yang belum bisa diakomodir (harga diskon, fasilitas aplikasi monitoring jaringan yang belum tersedia).

**1.2.2.9 Unit Kerja Direktorat Prasarana**

Beberapa Infrastruktur yang telah dibangun BP Batam diantaranya yaitu: jalan, drainase dan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton, Pulau Tonton dengan Pulau Nipah, Pulau Nipah dengan Pulau Setokok, Pulau Setokok dengan Pulau Rempang, Pulau Rempang dengan Pulau Galang, Pulau Galang dengan Pulau Galang Baru, jalan arteri dan kolektor, saluran air, waduk, sarana pendidikan, balai Agribisnis, instalasi pengolahan air limbah, fasilitas umum, fasilitas sosial dan berbagai infrastruktur lainnya.

Infrastruktur yang ada di Bareleng yang telah dibangun tersebut, beberapa diantaranya tetap dikelola oleh BP Batam, sebagian telah diserahkan kepada pihak ketiga untuk pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan beberapa aset lainnya dihibahkan kepada instansi lain serta pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada instansi tersebut.

Hingga April 2019 BP Batam sudah membangun jalan dengan panjang total 438,46 km, yang terdiri dari jalan Kotamadya Arteri 195,50 km, jalan Kotamadya Kolektor 155,94 km, jalan Kotamadya Lokal 87,02 km.

Jembatan yang telah dibangun BP Batam sebanyak 70 unit, yang terdiri dari jembatan pada jalan Kotamadya Arteri 35 unit, Jembatan pada jalan Kotamadya Kolektor 19 unit dan jembatan pada jalan Kotamadya Lokal 16 unit. Seluruh jembatan tersebut hingga saat ini berada dalam kondisi terawat baik dan dapat dimanfaatkan.

Pada Direktorat Prasarana dan Sarana, terdapat potensi pendapatan yang terbagi dalam pendapatan sewa titik lahan reklame, perizinan pematangan lahan serta pendapatan dari pemanfaatan *Right Of Way (ROW)*. Berikut disampaikan tabel pendapatan dari Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 1.26 Pendapatan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2015 – 2019

URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Realisasi	Satuan								
<b>Direktorat Prasarana &amp; Sarana / Direktorat Infrastruktur Kawasan</b>										
<b>a. Sewa Titik Lahan Reklame</b>										
- Pendapatan dari Sewa Titik Lahan Reklame	1,554.90	juta Rp	1,623.66	juta Rp	1,616.95	juta Rp	2,952.59	juta Rp	2,939.46	juta Rp
- Izin Sewa Titik Lahan Reklame	218	dok	512	dok	212	dok	368	dok	353	dok
<b>b. Perizinan Pematangan Lahan</b>										
- Pendapatan Pematangan Lahan		juta Rp		juta Rp	1,080.82	juta Rp	1,024.00	juta Rp	1,010.00	juta Rp
- Izin Pematangan Lahan	145	dok	133	dok	98	dok	84	dok	62	dok
<b>c. Pemanfaatan ROW Jalan</b>										
- Pendapatan Row Jalan		juta Rp		juta Rp	703.44	juta Rp	489.24	juta Rp	37.94	juta Rp
- Izin Row untuk Pertamanan	105	dok	239	dok	216	dok	285	dok	14	dok
- Jumlah Volume	195,905	m <sup>2</sup>	283,556	m <sup>2</sup>	261,412	m <sup>2</sup>	216,157	m <sup>2</sup>	18,720	m <sup>2</sup>
<b>d. Pemanfaatan ROW untuk Utilitas</b>										
- Pendapatan Row untuk Utilitas		juta Rp		juta Rp	178.08	juta Rp	404.27	juta Rp	792.37	juta Rp
- Izin Row untuk Utilitas		dok		dok	48	dok	105	dok	103	dok
- Jumlah Volume		m <sup>1</sup>		m <sup>1</sup>	178,079	m <sup>1</sup>	404,268	m <sup>1</sup>	642,216	m <sup>1</sup>

Sumber Data : Prasarana dan Sarana; Pusrenpros, 2019

#### 1.2.2.10 Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Implikasi keberadaan PTSP BP-Batam sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai yang di amanahkan Undang-Undang 25/2007 dan Perpres 27/2009 bahwa Badan Pengusahaan Batam berperan serta memberikan perhatian dan perkembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada para *stakeholder* dikawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Batam baik para pelaku usaha, investor, maupun masyarakat luas pada umumnya. Perijinan yang diberikan oleh BP-Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.27 Perijinan yang dikeluarkan BP-Batam

No	Unit Kerja BP Batam	Dokumen/Perijinan yang Ditandatangani
(1)	(2)	(3)
1	Direktorat Investasi & Pemasa	1 Pendaftaran Penanaman Modal 2 Ijin Pembukaan Kantor Cabang 3 Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal 4 Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal 5 Perubahan Ijin Usaha Penanaman Modal 6 Perubahan Ketentuan Penanaman Modal 7 Ijin Usaha Penanaman Modal 8 Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal 9 Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal ( <i>Merger</i> ) 10 Pembatalan Pendaftaran/Persetujuan Penanaman Modal 11 Pencabutan Ijin Usaha Penanaman Modal 12 Pembinaan Pelaporan Penanaman Modal 13 Penerbitan Angka Pengenal Importir
2	Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang	1 Ijin Usaha (registrasi Usaha) 2 Penerapan sebagai Importir Terdaftar Produk Terpadu (ITPT) 3 Ijin Pemasukan Barang dan Barang Modal Bukan Baru 4 Penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol 5 Pelayanan Penerapan sebagai Importir Terdaftar Kendaraan Bermotor 6 Penetapan sebagai Importir Terdaftar Alat Pertanian 7 Penetapan sebagai Importir Terdaftar Produsen Plastik 8 Ijin Surat Keterangan Asal (ASKA)
3	Direktorat Pengolahan Lahan	1 Perijinan Pengelolaan Lahan 2 Perijinan Alokasi Lahan 3 Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah 4 Pelayanan Revisi Penetapan Lokasi 5 Pelayanan Legalitas Dokumen Lokasi 6 Pelayanan Pecah dan Penggabungan Lahan 7 Penetapan Lahan 8 Pelayanan Ijin Peralihan Hak 9 Pelayanan Peralihan Dokumen 10 Pelayanan Perpanjangan UWT0
4	Direktorat Perencanaan & Pembangunan	1 Pelayanan Perijinan Pematangan Lahan 2 Pelayanan Perijinan Fatwa Planologi
5	Direktorat Kimling & Agribisnis	1 Perijinan Penetapan Lokasi

Sumber Data : Direktorat PTSP BP Batam, 2019

Penyelenggaraan PTSP BP-Batam yang juga merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam juga terdapat instansi vertikal terkait lainnya yang memberikan pelayanan perijinan dalam bidang penanaman modal seperti; Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Instansi vertikal yang terkait pelayanan investasi terpadu di Batam yang menempatkan perwakilannya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.28 Perijinan yang dikeluarkan Instansi

No (1)	Instansi (2)	Dokumen/Perijinan yang Ditandatangani (3)
1	Pemko Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>- Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bagunan (SBPMB)</li> <li>- Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)</li> <li>- Ijin Undang-Undang Gangguan(UUG)/HO</li> <li>- AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya</li> <li>- Pemantauan Lingkungan (UPL)</li> <li>- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>- Tanda Daftar Industri (TDI)</li> <li>- Tanda Daftar gudang (TDG)</li> <li>- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>- Ijin Usaha Industri (IUI)</li> <li>- Ijin Perluasan (IP)</li> <li>- Pemindahan Lokasi</li> <li>- Persetujuan Prinsip</li> <li>- Ijin Pemasangan reklame</li> </ul>
2	Kementerian Hukum dan HAM	
	a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Divisi Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpanjangan Visa Tinggal Terbatas (C.312)</li> <li>- Persetujuan Perpanjangan ITAS</li> <li>- Surat Keputusan DAHSUSKIM</li> <li>- Pengambilan Surat Perijinan Keimigrasian</li> </ul>
	b. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Visa On Arrival (VOA)</li> <li>- Perpanjangan Ijin Khusus (Visa Sosial Budaya 221)</li> <li>- Permohonan KITAS BARU</li> <li>- Perpanjangan KITAS</li> <li>- Permohonan KITAP BARU</li> <li>- Perpanjangan KITAP</li> <li>- Re-entry Permit</li> <li>- Affidavit</li> <li>- EPO</li> <li>- ERP</li> <li>- Mutasi</li> <li>- Pengambilan Surat Perijinan Imigrasi</li> </ul>
	c. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Kewarganegaraan</li> <li>- Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>- Permohonan Pelantikan Notaris Baru</li> <li>- Sekretariat MPD Notaris</li> </ul>
3	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</li> <li>- RPTKA 01</li> <li>- Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)</li> </ul>

Sumber Data : Direktorat PTSP BP Batam, 2019

# BAB 2

**VISI**

**MISI**

**TUJUAN**

**SASARAN STRATEGIS**

## 2.1 Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Pencapaian Visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, diterjemahkan dalam 5 (lima) arahan utama Presiden untuk tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

1. Pembangunan SDM  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

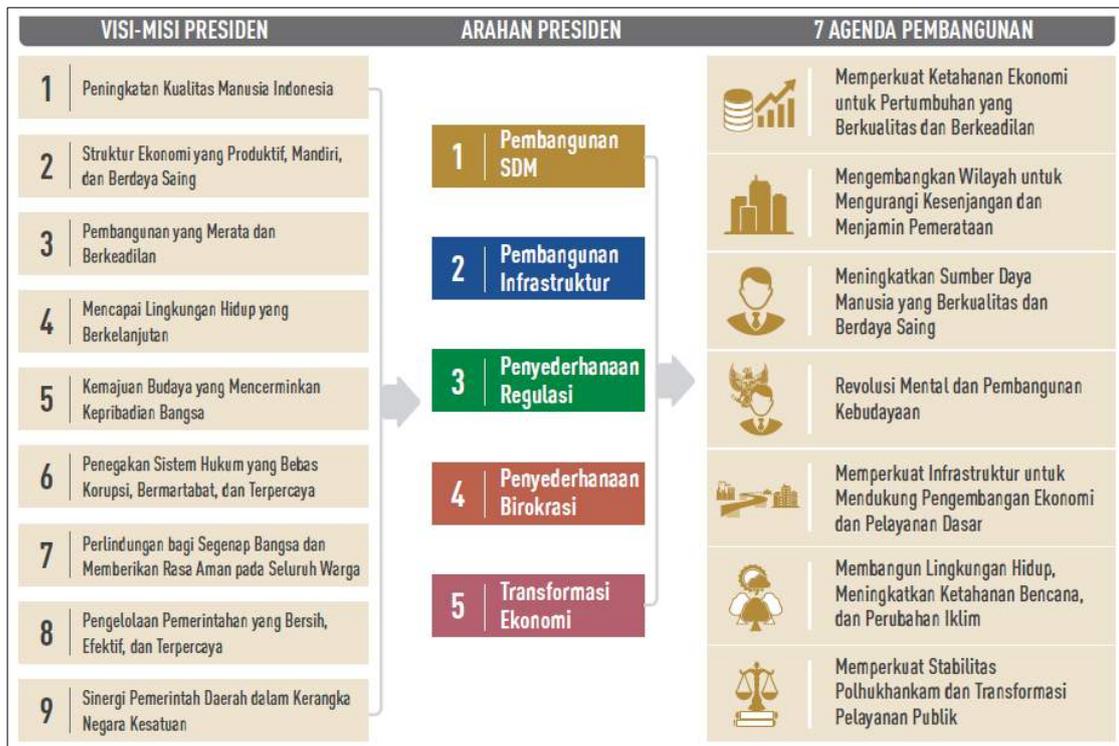
2. **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima arahan utama Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berikut disampaikan visual Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024. Serta sasaran pembangunan yang hendak di capai pada tahun 2020-2024.



Gambar 2.1 Visi Misi , Arahan dan Agenda Pembangunan Presiden RPJMN

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Bappenas



Gambar 2.2 Sasaran Pembangunan 2020 – 2024

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Bappenas

## 2.2 Visi dan Misi

Dalam menunjang Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu 2020-2024 maka Visi BP Batam dalam 5 tahun kedepan yaitu: BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong.

Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan nomor 4 (mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan). Berdasarkan hal tersebut, BP Batam menguraikan sebagai berikut :

- a) Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif
- b) Memberi dukungan dan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif.

- c) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.
- e) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang berkesinambungan
- f) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Bebas ( KPBPB ) Batam.

### 2.3 Nilai – Nilai BP Batam

Budaya Kerja Organisasi tercermin dari nilai-nilai (*values*) yang ada di dalam suatu organisasi dan nilai (*values*) tercermin dari kepatuhan anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi (*the behavior guidance*). Berikut adalah adalah nilai-nilai (*Values*) BP Batam yang disingkat “SPIRIT” :

- a) *Service Excellence* : Memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- b) *Profesional* : Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab secara kompeten serta berkomitmen.
- c) *Innovative* : Menggunakan dengan maksimal semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan yang berkelanjutan.
- d) *Integrity* : Konsisten dalam perkataan dan perbuatan.
- e) *Entrepreneurship* : Memiliki jiwa dan perilaku yang berani dalam menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan resiko.

### 2.4 Tujuan BP Batam

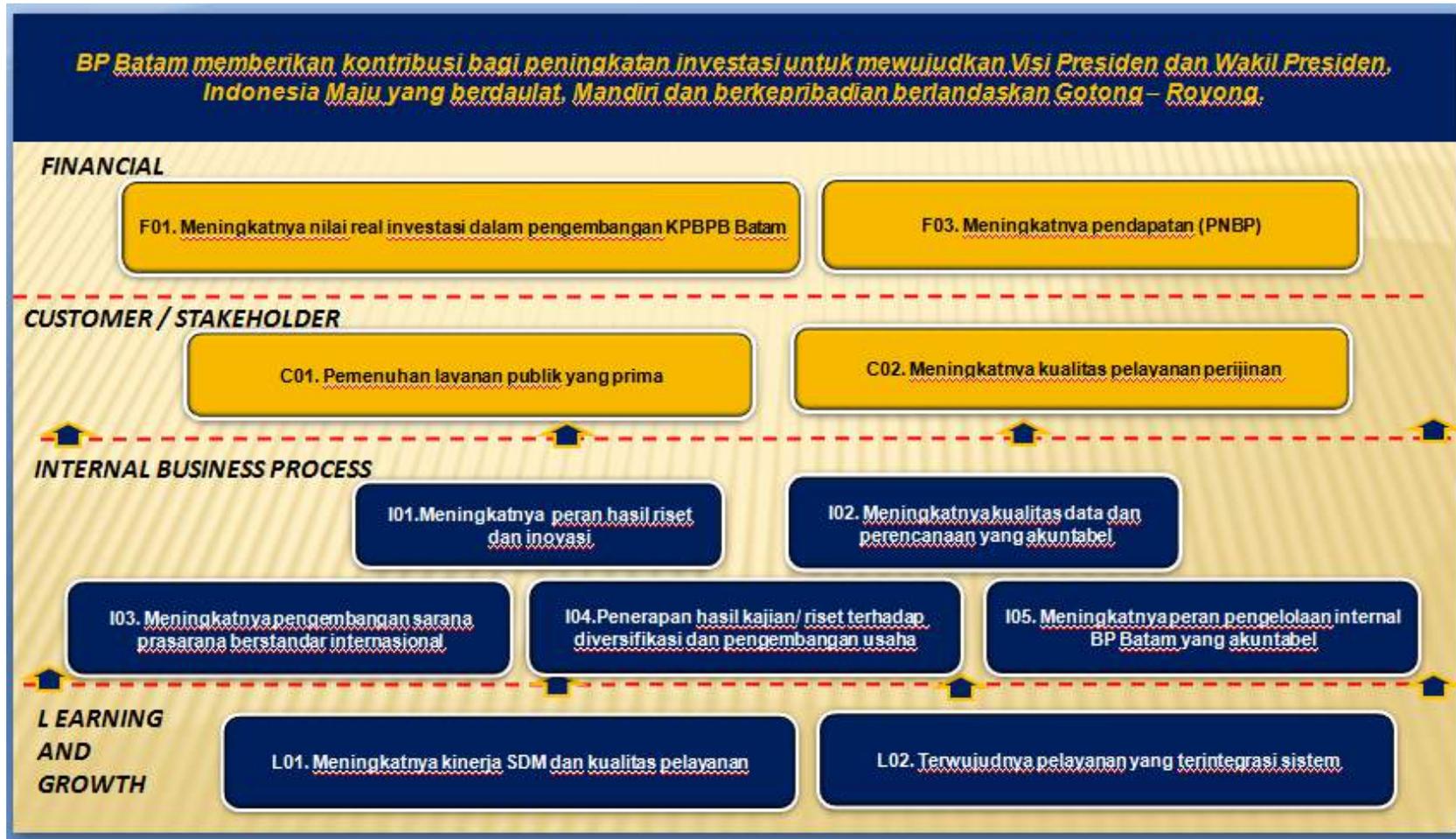
Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden tersebut, BP Batam menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: Meningkatkan investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah KPBPB Batam.

## 2.5 Sasaran Strategis BP-Batam

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, ditetapkan sasaran strategis BP-Batam yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu meningkatnya investasi pada sektor industri, jasa, hub logistik, dan pariwisata di wilayah KPBPB Batam yang diukur dari:

1. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan yang akuntabel.
2. Meningkatnya kinerja Sumber daya Manusia (SDM) BP Batam dan kualitas pelayanan.
3. Meningkatnya peran hasil riset/ studi dan inovasi terhadap pengembangan usaha
4. Meningkatnya nilai real investasi riil dalam pengembangan KPBPB Batam.
5. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana berstandar internasional.

Guna mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan misi dan pencapaian visi BP Batam, ditetapkan sasaran strategi diatas yang terbagi ke dalam empat perspektif. Sasaran strategi yang telah ditetapkan tergambar dalam peta langkah strategi sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Peta Strategi BP Batam

Sumber : Analisis Pusrenpros, 2020

Dari masing-masing strategis di atas, ditetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran. KPI pada masing-masing sasaran dan tujuan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Tabel Indikator Kinerja

Ref.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	KPI
<b>Prespektif Customer / Stakeholder</b>		
C.01	Pemenuhan Layanan Publik yang Prima	Survey kepuasan pelanggan predikat Baik
C.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	% Jumlah Layanan yang Terintegrasi
<b>Prespektif Internal Business Process</b>		
I.01	Meningkatnya Peran Hasil Riset dan Inovasi	% Hasil riset dan Inovasi
I.02	Meningkatnya Kualitas Data dan Perencanaan yang akuntabel	% Unit kerja yang memiliki dokumen dan tata perencanaan yang berkualitas
I.03	Meningkatnya Pengembangan Sarana Prasarana Berstandar Internasional	Sertifikasi sarana prasarana yang berstandar internasional
I.04	Penerapan Hasil Kajian / Riset Terhadap Diversifikasi dan Pengembangan Usaha	% Hasil riset dan Inovasi yang dilaksanakan
I.05	Meningkatnya Peran Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan BP Batam
<b>Prespektif Learning and Growth</b>		
L.01	Meningkatnya Kinerja SDM dan Kualitas Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan
		Nilai akuntabilitas kinerja / SKP
L.02	Terwujudnya Pelayanan yang Terintegrasi Sistem	% Peningkatan pendapatan
<b>Prespektif Financial</b>		
F.01	Meningkatnya nilai real investasi dalam pengembangan KPBPB Batam	% Peningkatan nilai real investasi
F.02	Meningkatnya pendapatan (PNBP)	% Peningkatan nilai pendapatan PNBP

Sumber: Analisis Pusrenpros, 2020

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran strategi, program dan kegiatan serta target dari masing –masing kegiatan dapat dilihat pada matrik kinerja dan pendanaan.

# BAB 3

**A**RAH KEBIJAKAN

**S**TRATEGI

**K**ERANGKA REGULASI

**K**ERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam program dan kegiatan BP Batam yang mengacu pada aturan perundangan dan aturan resmi lainnya yang mendasari tugas pokok dan fungsi BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan. Empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas.2020

Selain hal tersebut diatas, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Berikut disampaikan 4(empat) pilar RPJMN IV tahun 2020-2024.



Gambar 3.2 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024, Bappenas.2020

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Adapun visual dan penjelasan terkait agenda diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini



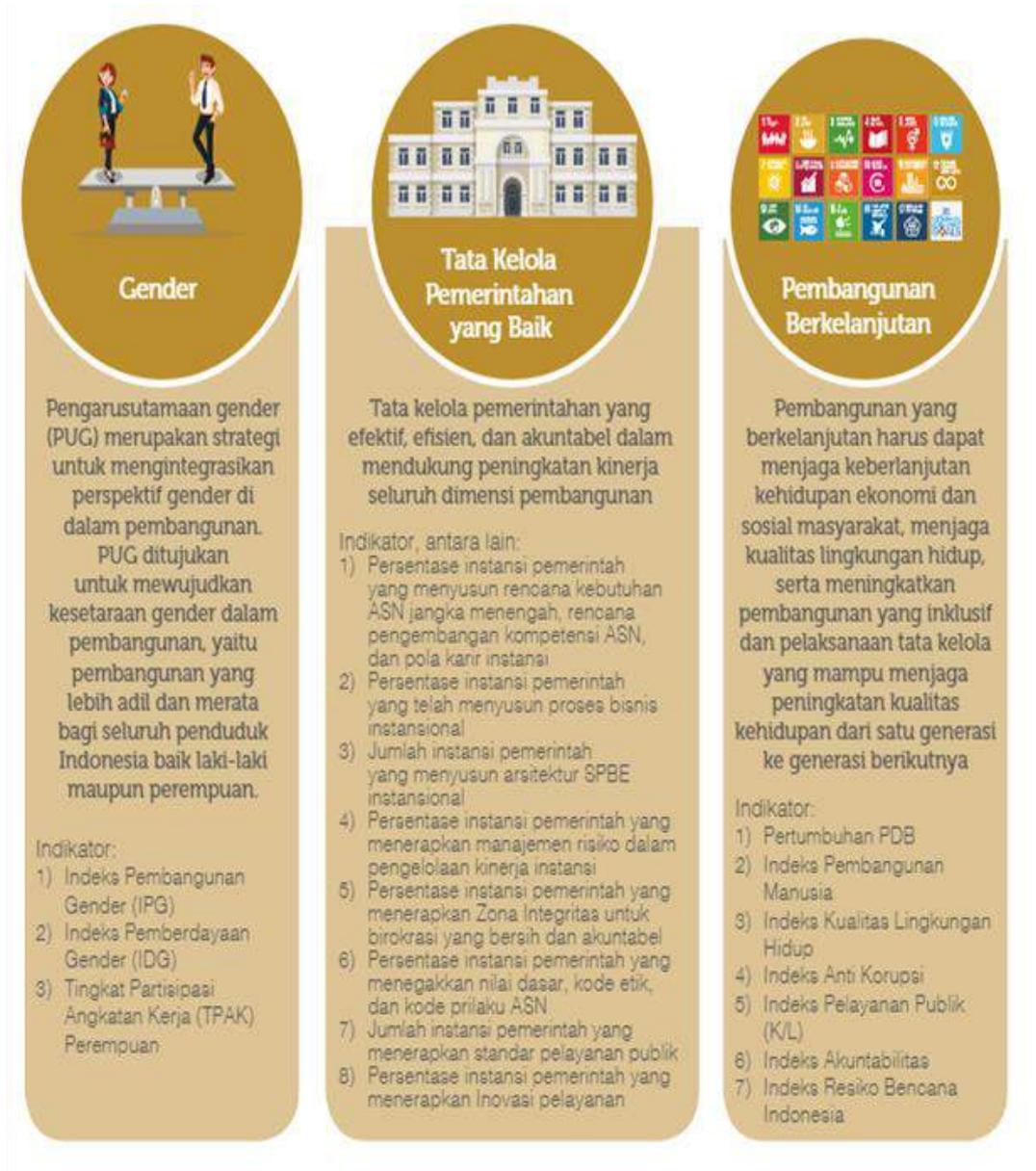


Gambar 3.3 Rancangan dalam RPJMN IV 2020-2024

Sumber: Rancangan RPJMN 2020-2024, Bappenas.2020

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengurusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dan mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan

meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Gambaran terkait pengarusutamaan dapat dilihat di bawah ini.





Gambar 3.4 Rancangan dalam RPJMN IV 2020-2024

Sumber: Rancangan RPJMN 2020-2024, Bappenas.2020

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP Batam

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional bagi pencapaian sasaran dan prioritas nasional, maka strategi dan arah Kebijakan BP Batam 5 tahun kedepan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan investasi dalam membentuk iklim usaha yang sehat serta penerapan reformasi birokrasi yang utuh dalam upaya menjadi penghela ekonomi nasional.

Untuk itu BP Batam telah menyusun agenda pembangunan yang diharapkan dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan baik bagi pihak *stakeholders* maupun melakukan pembenahan kedalam (internal) dengan berpedoman pula pada roadmap pengembangan kawasan Batam Bintan Karimun tahun 2010-2020.

Adapun arah kebijakan dan strategi BP Batam yang tertuang dalam agenda pembangunan BP Batam sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.
- b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- c) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- d) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan akibat adanya perubahan iklim
- e) Memperkuat dan mempercepat transformasi pelayanan publik.
- f) Memberikan dampak bagi pengembangan kawasan disekitarnya yaitu untuk Bintan dan Karimun.

### **3.2.1 Arah Kebijakan**

Keberadaan BP Batam yang awalnya bernama Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pulau Batam yang semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000. Sesuai dengan Bab Ketentuan Peralihan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemko Batam yang berada di KPBPB-Batam beralih kepada Badan Pengusahaan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007, tidak ada lagi hak pengelolaan atas tanah yang diberikan kepada selain Badan Pengusahaan.

Pengelolaan dan pengembangan KPBPB-Batam yang dilakukan BP Batam diarahkan tidak hanya difokuskan kepada pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi yang handal akan tetapi menjadi salah satu kontributor pembangunan

ekonomi nasional dengan memperhatikan suatu pengembangan wilayah ekonomi dan investasi yang terencana. Oleh karena itu pengelolaan KPBPB-Batam perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan ekonomi dan investasi terpadu oleh seluruh sektor yang mengacu pada segala aspek aktifitas ekonomi, investasi, sosial, lingkungan, potensi kewilayahan dan perairan serta daya dukung kawasan wilayah KPBPB-Batam.

Dalam konteks pengembangan kawasan pengembangan ekonomi dan investasi, maka untuk memudahkan dalam merencanakan memonitor dan mengevaluasi pengembangan pengelolaan KPBPB-Batam, arah kebijakan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan BP Batam dengan strategi pelaksanaan yang mengacu pada beberapa hal:

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam
2. Melaksanakan peningkatan kapabilitas aparatur/ SDM BP Batam yang berbasis kompetensi
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparatur/ SDM BP Batam pada pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Melaksanakan sistem pelayanan perizinan investasi dalam satu unit dan berbasis teknologi informasi
5. Melaksanakan pembuatan *database* berupa big data di Batam
6. Melaksanakan pola *marketing mix* yang terarah dan terfokus pada bidang prioritas
7. Melaksanakan pola praktek bisnis yang sehat dalam memanfaatkan aset-aset yang ada.
8. Melaksanakan pembangunan dengan terencana yang mengacu pada rencana induk yang berstandar internasional dan berwawasan lingkungan.

### 3.2.2 Strategi

#### 3.2.2.1 Arah Sektor Prioritas

Pengembangan Bareleng tidak hanya berfokus kepada Batam saja, tetapi harus memberikan dampak pembangunan bagi kawasan sekitarnya yaitu Bintan dan Karimun sehingga Batam berkembang untuk industri yang bernilai tambah tinggi sedangkan industri yang masih menggunakan tenaga kerja yang low skill dan medium dapat dikembangkan kepada kedua daerah tersebut. Adapun sektor prioritas yang akan direncanakan KPBPB-Batam hingga 2024 mendatang dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

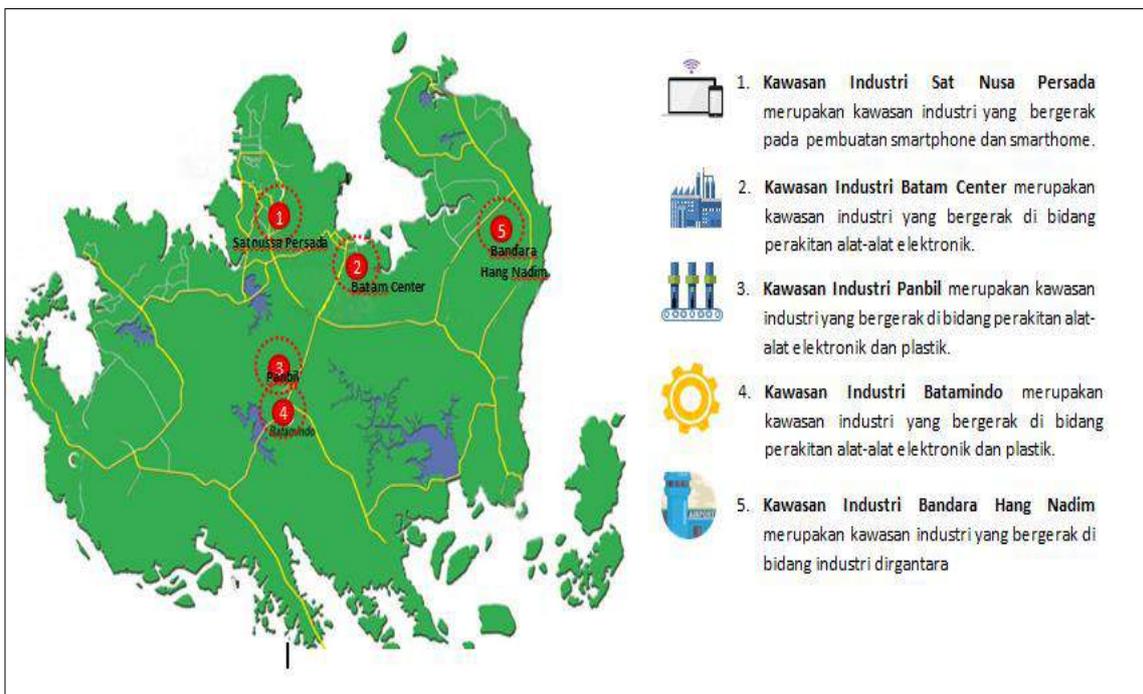


Gambar 3.5 Sektor Prioritas Pengembangan Batam 2020 -2024

Sumber : Pusrenpros, 2019

Arah sektor prioritas diatas, dipilih berdasarkan menunjang arah diversifikasi strategi serta identifikasi lingkungan yang merupakan salah satu kunci faktor sukses yaitu mengembangkan kawasan industri spesifik. Pemilihan industri *manufacture* yang berkonsentrasi pada *smartphone* dan teknologi informasi dilatar belakangi teknologi *smartphone* masih memiliki perkembangan yang pesat. Menurut IDC (*The International Data Corporation*) meskipun dikuartal pertama 2018 *shipment* dari produk ini menurun, namun prediksi dari IDC untuk *shipment smartphone* secara global dapat mencapai 1.646 Miliar di

tahun 2022, sehingga industri ini, masih menjadi investasi yang besar. Melihat berbagai hal tersebut, industri *smartphone* akan menjadi stabil, sebagai fokus industri yang akan dikembangkan di Batam, maka fokus industri yang akan mengarah ke penyedia *chipset* atau konduktor sebagai salah satu peningkatan di teknologi informasi. Direncanakan tahap pertama masuknya industri perakitan *smartphone* di Batam serta tahap selanjutnya adalah menjaring industri pembuat *smartphone* untuk membuka usahanya di Batam.



Gambar 3.6 Peta Pengembangan Sektor Industri Manufaktur

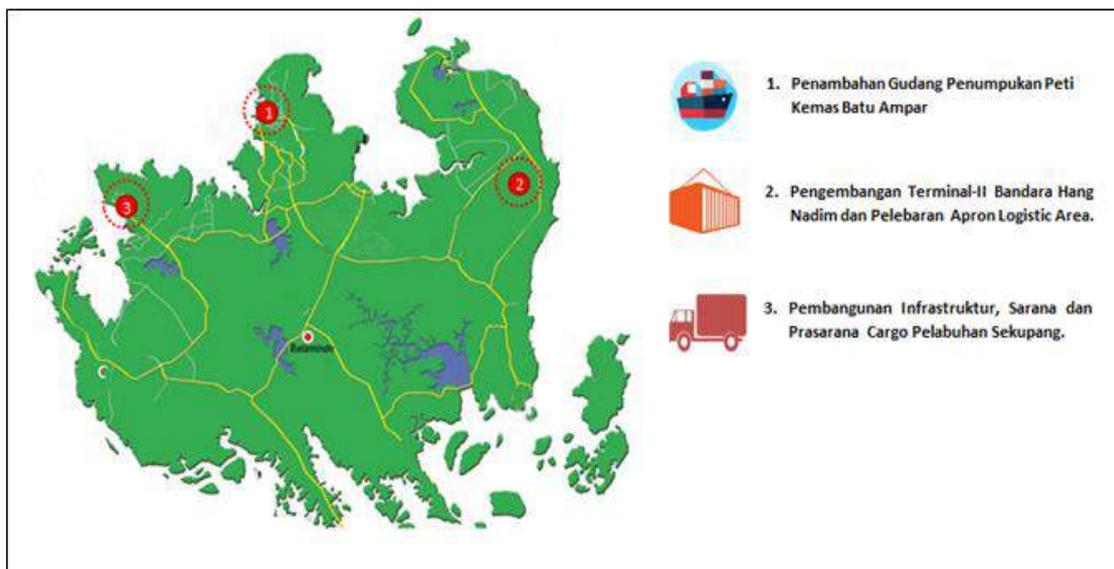
Sumber : Pusrenpros, 2019

Selain itu KPBPB Batam, mencoba menangkap peluang terkait adanya perang dagang antara Amerika dan China diprediksi bahwa para investor atau pengusaha akan memindahkan pabrik ke negara berkembang di Asia, hal ini akan berdampak pada penambahan jumlah eksportir dalam negeri, diversifikasi produk ekspor, pengembangan pasar baru, pengembangan ekosistem ekspor, hingga peluang menggenjot sektor pariwisata yang berdampak ekspor.

Industri *software* diprediksi merupakan industri terbesar bagi ICT (*Information and Communication Technology*), *Forrester Research Firm* memprediksi pertumbuhan industri ini bisa mendapai 7,5% atau sekitar 700 juta US\$, *trend* pengeluaran secara

global untuk IT dan komunikasi diprediksi akan naik sebesar 5%, dimana 6% pertumbuhan di Amerika, 10% di India dan 8% di Cina, yang mana pemerintah Cina menargetkan untuk sektor komputer sistem *cloud* akan naik dan sistem *cloud* akan mengambil alih atas sepertiga dari pengeluaran ITC dengan kecepatan pertumbuhan *software as service (SaaS)*. Pasar untuk *SaaS* ini diprediksi akan mengalami lompatan 100 juta US\$.

Hingga saat ini (2019) jumlah pergerakan kapal kontainer tercatat mencapai lebih dari 100 ribu kapal dengan mengangkut 90 juta TEUs Kontainer pertahun. Sedangkan pergerakan kapal kontainer sekitar 258,5 juta TEUs per tahun, dimana 87% dari pergerakannya menuju ke Asia dan 54,3 juta TEUs per tahun melewati selat malaka dan hal ini dilayani oleh sebagian besar negara Singapura dan Malaysia. Berdasarkan hal ini lokasi Batam yang terletak pada jalur tersebut juga mendesak untuk mengembangkan infrasturktur pendukung pelabuhan guna menarik kegiatan perekonomian yang lebih besar ke Batam Indonesia.

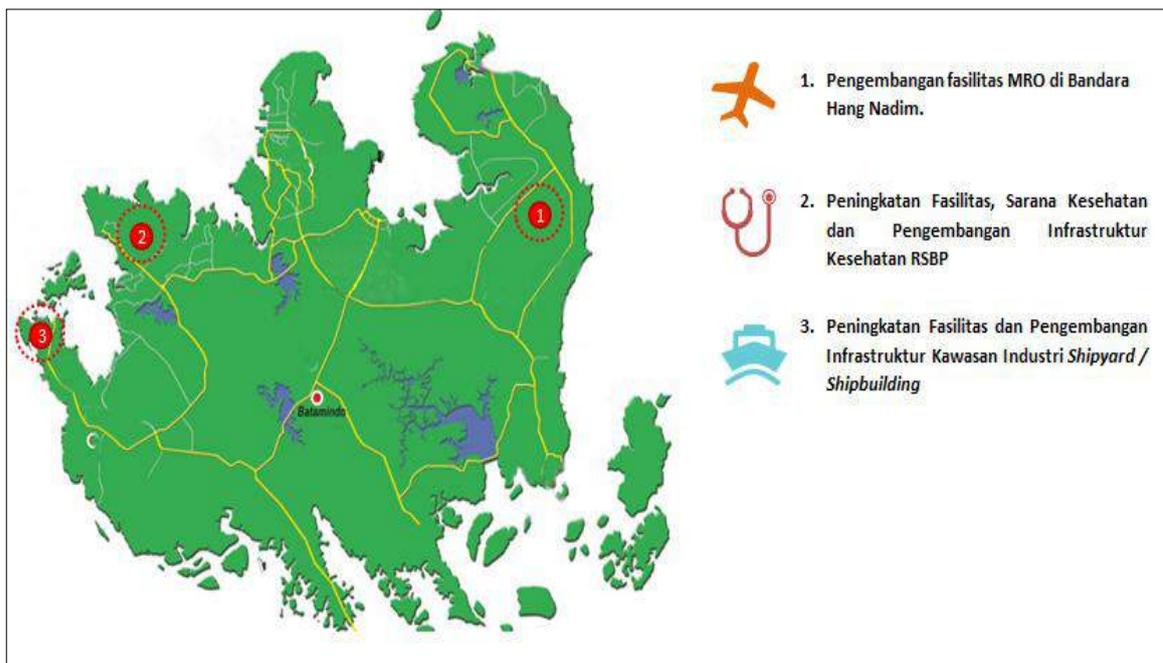


Gambar 3.7 Peta Pengembangan Sektor Logistik Hub

Sumber : Pusrenpros, 2019

Sektor industri jasa yang akan dikembangkan merupakan diversifikasi maupun sektor eksisting yang akan dikembangkan, salah satunya pengembangan jasa kesehatan mengingat salah satu unit penghasil PNBPN dari BP Batam adalah rumah sakit. Kesehatan secara global tidak terlalu mengalami perkembangan secara signifikan terkait bisnisnya, sehingga diversifikasi pelayanan jasa baru dan kerjasama

dengan rumah sakit berstandar internasional diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan di jasa industri kesehatan. Selain itu perkembangan industri MRO (*Maintenance Repair and Operation*) juga merupakan salah satu sektor prioritas yang akan di kembangkan di KPBPB Batam mengingat cakupan industri dari jasa MRO sangat luas yang terbagi kedalam *construction, material handling, laboratorium and chemical, tools and cleaning, safety and security, measuring and testing, serta heavy equipment and vehicle*.



Gambar 3.8 Peta Pengembangan Sektor Jasa

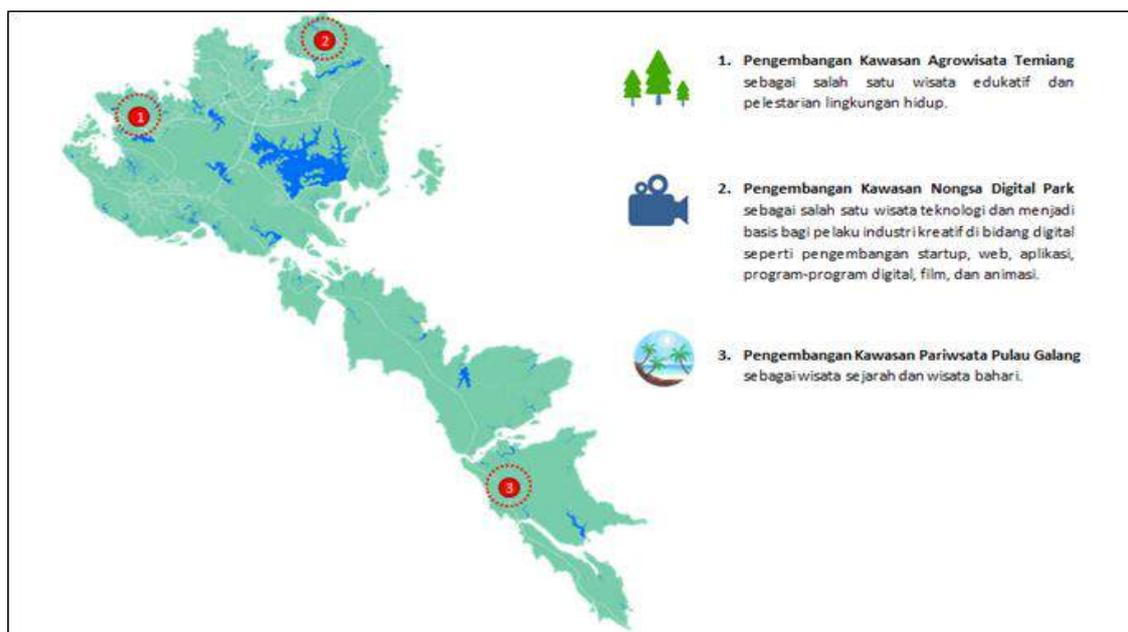
Sumber : Pusrenpros, 2019

Pada era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Kota Batam yang merupakan sebagai pintu masuk terbanyak ke 3 di Indonesia setelah Bali. Maka, Kota Batam pun melakukan pembenahan terhadap semua potensi pariwisata yang ada selama ini.

Pada awalnya Batam dikembangkan sebagai kota industri dan sektor alih kapal. Selain terkenal dengan industrinya, Kota Batam juga terkenal dengan potensi wisatanya. 5 pelabuhan internasional dan 8 pelabuhan domestik, serta ditunjang dengan adanya 1 bandara Internasional yakni Bandara Intenasional Hang Nadim yang memiliki 17 akses domestik ke berbagai daerah di Indonesia dan 1 akses

internasional yakni akses ke Bandara Sultan Aziz Shah Malaysia. BPS merilis, setiap wisman mengeluarkan uang di Batam sekitar 543 dolar AS dalam setiap kunjungan, lama tinggal wisatawan mancanegara di Kota Batam Kepulauan Riau pun meningkat dari rata-rata 2,8 hari per kunjungan pada 2018 menjadi rata-rata 3,35 hari pada 2019.

Berdasarkan hal tersebut pengembangan industri pariwisata di KPBPB Batam akan dikembangkan melalui pengembangan infrastruktur dan pengembangan obyek wisata seperti agrowisata, wisata sejarah maupun pelaksanaan *event* yang berskala internasional, guna meningkatkan lama waktu tinggal wisatawan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah.



Gambar 3.9 Peta Pengembangan Sektor Pariwisata

Sumber : Pusrenpros, 2019

Arah 4 (empat) sektor prioritas diatas, tidak terlepas dari sistem Perkotaan Nasional, dimana kawasan perkotaan Batam termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang disebutkan, kawasan Batam diarahkan sebagai Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan; Pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi; kawasan industri yang berdaya saing; Pusat pariwisata bahari; Pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; Peningkatan keterkaitan PKN dan antar PKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata; Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar; Pengembangan PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jala lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan jasa yang berskala internasional; Pengembangan PKN, PKW dan PKSNI yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai; dan Percepatan pengembangan PKSNI sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara.

### 3.2.2.2 Fokus Strategi

Untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi dapat dicapai, disusun fokus strategi sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur pendukung dalam peningkatan iklim investasi di sektor industri, jasa, logistik hub dan pariwisata yang berstandar internasional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan diatas, maka kegiatan yang hendak dicapai, diantaranya:

- a) Pengembangan jaringan dan infrastruktur darat untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat aktivitas sektor prioritas berupa:
  - i. Pembangunan dan pelebaran jalan-jalan arteri menuju kawasan pusat aktivitas di seluruh wilayah Bareleng sepanjang 70,4 km bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk meningkatkan waktu tempuh rata-rata per koridor jalan arteri utama dari 30 km/jam menjadi 40 km/jam.

- ii. Pembangunan dan pelebaran jalan-jalan kolektor menuju kawasan pusat aktivitas di seluruh wilayah Bareleng sepanjang 96,6 km.
  - iii. Pembangunan dan pelebaran jalan-jalan lokal menuju kawasan pusat aktivitas di seluruh wilayah Bareleng sepanjang 66,3 km berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam.
  - iv. Pembangunan jalan layang di Simpang Kabil, Simpang UIB dan Simpang Bandara; serta jembatan Sambau.
  - v. Pengembangan jaringan drainase untuk mengurangi potensi banjir dan menambah potensi air baku, pembangunan jaringan drainase primer di kawasan industri Kabil, Tanjung Uncang, Batam Center, Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil serta jaringan drainase sekunder di kawasan Batu Aji dan Bengkong berkoordinasi dengan pemerintah kota.
- b) Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam yang merupakan salah satu akses utama ke KPBPB Batam berupa:
- i. Mengevaluasi Master Plan Bandara Hang Nadim untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terbaru atas pengembangan bandara Hang Nadim.
  - ii. Menyiapkan RDTR untuk kawasan jasa bandara dan kawasan industri bandara.
  - iii. Penyiapan lahan untuk kawasan industri *high tech* terutama industri dirgantara .
  - iv. Pengembangan terminal-2 Bandara Hang Nadim untuk meningkatkan pelayanan bandara.
  - v. Pengembangan terminal *cargo* Bandara Hang Nadim dengan rencana luas pengembangan untuk bangunan seluas 9.600 m<sup>2</sup>, sehingga dapat menampung *cargo* dengan kapasitas dari 120.000 ton menjadi 600.000 ton
  - vi. Pembangunan dan peremajaan infrastruktur pendukung bandara.

- c) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan laut di KPBPB Batam berupa:
- i. Pengembangan pelabuhan domestik Sekupang dengan rencana pengembangan terminal seluas 1350 m<sup>2</sup>, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penumpang dari 650 ribu orang per-tahun menjadi 2 juta orang per-tahun.
  - ii. Pengembangan dermaga *general cargo* pelabuhan Sekupang, rencana pengembangan dermaga hingga 691 m dan *trestle* sepanjang 84 m, yang diharapkan dapat menampung kapasitas 200.00 ton *cargo* pertahun.
  - iii. Pengembangan dan revitalisasi Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar dan fasilitas pendukungnya untuk meningkatkan kapasitasnya hingga 5.000.000 TEUs.
  - iv. Pembangunan dermaga utama dan sarana *pontoon* atau *wharf* dan mempercepat waktu sandar dan bongkar buat operasional terminal curah Kabil.
  - v. Pengembangan terminal penumpang internasional Batam Center yang merupakan salah satu akses utama turis dari negara tetangga ke Pulau Batam untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan.
- d) Pengelolaan air baku dan limbah di KPBPB Batam untuk menunjang pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:
- i. Pemanfaatan potensi air baku pada Sei. Gong hingga 150 liter/detik dan Sungai Rempang hingga 320 liter/detik, sebagai cadangan air minum bagi pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang.
  - ii. Menjaga dan meningkatkan potensi ketersediaan air baku yang saat ini pertumbuhannya sekitar 4 hingga 5 % pertahun dengan memanfaatkan tujuh waduk *existing* sebagai sumber air bersih serta menjaga kualitas dan kuantitas pengembangan air di Batam serta mencari potensi-potensi sumber daya air baku baru.
  - iii. Peningkatan potensi ketersediaan air baku dengan rencana oprasional waduk tembesi yang diharapkan mampu melayani sekitar 250 ribu jiwa dengan kapasitas 600 liter/ detik serta penyempurnaan operasional waduk.

- iv. Pembangunan WTP Tembesi dan Rempang serta jaringan distribusi primer Sei Gong-Sei Rempang Tembesi dan Tembesi-Batu Aji.
- v. Peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari 2.850 m<sup>3</sup>/ hari menjadi 20.000 m<sup>3</sup>/ hari.
- vi. Perluasan dan penataan Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil untuk meningkatkan kapasitas layanan.

2. Pengelolaan kawasan yang profesional dan inovatif

Agenda pembangunan ini berkaitan dengan tujuan BP Batam dalam rangka Terwujudnya pengelolaan KPBPB-Batam secara profesional dan inovatif ; serta Terwujudnya peningkatan hasil riset dan inovasi pengembangan usaha yang sejalan dengan sektor pembangunan manusia, sektor pembangunan ekonomi, sektor pembangunan kewilayahan serta sektor pembangunan politik, hukum dan pertahanan keamanan.

Memperhatikan semua hal tersebut maka fokus agenda pembangunan BP Batam adalah :

- a. Melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi yang searah antara Pusat dan Daerah yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi kawasan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dengan dukungan layanan teknologi informatika dan komunikasi;
- c. Memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional berbasis kompetensi;
- d. Membangun budaya organisasi yang akuntabel dan inovatif;
- e. Meningkatkan kontribusi PDRB kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Mengembangkan klaster industri unggulan, berbasis pengetahuan dan inovasi serta penelitian pengembangan.
- g. Meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- h. Menurunkan biaya-biaya dalam berinvestasi;
- i. Meningkatkan kemandirian keuangan dan pendapatan unit kerja penghasil.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan diatas, maka kegiatan yang hendak dicapai, diantaranya:

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan internal, melalui strategi penyempurnaan system dan manajemen serta pelaporan dalam pengelolaan KPBPB seperti pementapan implementasi SAKIP, LAKIP, E-Monev dan sebagainya;
- b. Penerapan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi guna mendukung bisnis proses yang efektif, efisien dan transparan, melalui strategi penguatan kebijakan dalam IT yang mendukung *e-government* dan *e-corporate* ataupun *e-investment*;
- c. Penyempurnaan kelembagaan KPBPB Batam, mencakup penataan tugas, fungsi dan sumber kewenangan serta harmonisasi antar lembaga, institusi maupun instansi, dengan strategi penyempurnaan desain struktur pengelolaan KPBPB Batam yang lebih efisien;
- d. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008, melalui strategi pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas oleh pengelola KPBPB Batam;
- e. Mendorong publik untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan KPBPB Batam, melalui strategi pemanfaatan media sosial dan layanan website BP Batam untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi antara pengelola KPBPB Batam dengan pemerintah maupun masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan dasar bagi investor melalui strategi sinkronisasi dan atau harmonisasi kerangka regulasi serta kebijakan pemerintah terutama dalam aturan perdagangan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor;
- g. Membuka kesempatan kerja pada sektor industri dengan strategi meningkatkan iklim investasi teknologi dan inovasi;
- h. Meningkatkan hasil penerapan penelitian dan pengembangan;
- i. Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan wilayah Bareleng (Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru) secara rinci.

- j. Penyempurnaan rencana tata ruang dan rencana detail KPBPB-Batam yang diminati investor yang berwawasan maritim dan lingkungan;
- k. Mengembangkan pemberdayaan usaha melalui strategi pemberdayaan dan perluasan akses permodalan baik dalam maupun luar negeri;
- l. Mendorong pembiayaan infrastruktur, dengan pola strategi KPS/ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU) dan *creative financing* lainnya; serta memberlakukan mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif;
- m. Meningkatkan aktivitas perdagangan melalui strategi mendorong pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta lalu lintas barang terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional;
- n. Kegiatan promosi investasi yang potensial dalam mendukung 4 sektor prioritas pembangunan.
- o. Optimalisasi Pemanfaatan Aset dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan

### 3.3 Peran BP Batam dalam Pengembangan Daerah Batam

Merujuk dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang telah menetapkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dimana BP Batam diberi tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya, maka dalam lima tahun kedepan BP Batam mengambil peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan investasi PMA yang kompetitif dan lingkungan bisnis yang sehat di Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone (FTZ)* yang meliputi:

1. Pemantapan dalam manajemen pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (KPBPB-Batam), melalui penciptaan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat serta peningkatan profesionalisme sumber daya pengelola KPBPB-Batam;

2. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan PBBP – Batam, serta pengelolaan pengamanan lahan dan aset investasi;
3. Percepatan pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, Bandar udara serta transportasi darat;
4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan pemasaran;
5. Membangun kontinuitas jaringan teknologi informasi nasional, melalui pembangunan fasilitas pusat data/ *data centre* dan pemulihan data/ *data recovery centre*;
6. Membangun infrastruktur prasarana dasar, meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan serta pemukiman dan perumahan pekerja;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang berkualitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan umum.
8. Penurunan biaya logistik dalam rangka memperkuat daya saing investasi dan perdagangan.

### **3.4 Kerangka Regulasi**

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Salah satu yang membuat Batam menjadi perhatian khusus Pemerintah sejak dahulu hingga sekarang adalah karena kawasan ini memiliki potensi untuk memberi kontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional maupun daerah disekitar kawasan Batam, posisinya yang sangat strategis dengan negara Singapura yang menjadi pusat jasa dan keuangan dunia, membuat kawasan ini sangat berpotensi untuk saling bersinergi dengan kawasan tersebut.

Berkaitan dengan perkembangan Batam maka beberapa regulasi yang telah disusun terkait dengan pengelolaan KPBBPP- Batam, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pulau Batam.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukkan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* di Daerah Industri Pulau Batam.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*).

12. Keputusan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
13. Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
14. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jom Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2016
15. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16. Surat Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. KPTS/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan wilayah dan politik, keterbukaan pengelolaan serta akuntabilitas, maka dirasakan bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan diatas, perlu dilakukan penambahan dan harmonisasi beberapa peraturan khususnya dalam bidang-bidang investasi, kelembagaan dan tata kelola, wilayah pengembangan dan penataan ruang (tata ruang), pariwisata dan Industri.

Dalam bidang tata ruang, terkait dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan regulasi resmi lainnya untuk memasukan pulau Tanjung Sauh dan pulau Ngenang – Kepulauan Riau sebagai bagian dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Pemasukan daerah tersebut menjadi bagian KPBPB-Batam dari rencana pembangunan pelabuhan transshipment peti kemas yang diharapkan melalui target kapasitas mencapai sampai 7 juta TEUs sehingga dapat mengambil potensi lalu lintas perdagangan di selat Malaka dan pengembangan industri penunjang lainnya, disamping itu perlu direvisi Peraturan Presiden No 87 / 2011 tentang Tata Ruang

Kawasan Strategis Nasional Batam, sehingga tata ruang tersebut dapat mengkomodasikan rencana pengembangan kawasan Batam kedepan.

Selain itu perlu diterbitkan peraturan tentang penetapan hak pengelolaan lahan (HPL) terhadap Pulau Rempang hingga Pulau Galang Baru untuk masuk dalam pengelolaan KPBPB Batam, mengingat sejak bulan Januari 2015 lahan-lahan pada kawasan tersebut masih dalam status quo sehingga berbagai aktivitas investasi dan pengembangan di Pulau Rempang hingga Pulau Galang Baru belum bisa dilakukan secara optimal padahal dilain sisi Pemerintah telah membangun prasarana jalan dan air yang cukup memadai. Diharapkan melalui Peraturan Pemerintah dan regulasi yang mendukung KPBPB Batam pada pulau-pulau tersebut akan menghapus hambatan terhadap rencana pengembangan dan investasi yang akan tumbuh meningkat bagi daerah dan kegiatan ekonomi disekitarnya.

Bidang industri pariwisata dan kreatif di Batam saat ini cukup berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan tidak hanya tingginya jumlah kunjungan mancanegara yang melakukan kegiatan wisata di Batam akan tetapi peningkatan industri pariwisata di Batam berkembang seiring dengan meningkatnya teknologi informasi digitalisasi dalam industri kreatif Batam yang cukup dikenal oleh mancanegara, melihat hal ini KPBPB Batam memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah yang mengatur regulasi industri pariwisata dan kreatif yang ada di wilayah KPBPB Batam, yang diharapkan regulasi yang mendukung pada KPBPB Batam tidak hanya memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran disamping tetap melestarikan lingkungan alam dan sumberdaya serta hak cipta atas karya bangsa yang lahir pada kawasan PBPB di Batam ini yang dapat menjadi pedoman pengembangan industri pariwisata dan kreatif pada PBPB Batam.

Untuk bidang industri eksisting, PBPB Batam masih perlu mengeluarkan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala PBPB Batam, yang memuat mengenai harmonisasi antara para stakeholders dan investor guna penciptaan iklim investasi yang kondusif di KPBPB Batam yang menanamkan investasinya di Batam baik jangka pendek maupun jangka panjang, melalui harmonisasi dan pemberian

intensif serta ruang kebijakan fiskal yang berpihak pada para investor diharapkan roda pergerakan ekonomi dapat berjalan secara dinamis dan progresif sehingga mampu melampaui target ril investasi yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya pemberian insentif yang lebih besar terhadap industri yang berada dalam kawasan industri dibandingkan industri yang berada diluar kawasan industri dengan pemberian *tax holiday* lebih dari 30% selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau hal lain yang dianggap saling menguntungkan bagi pemerintah maupun investor.

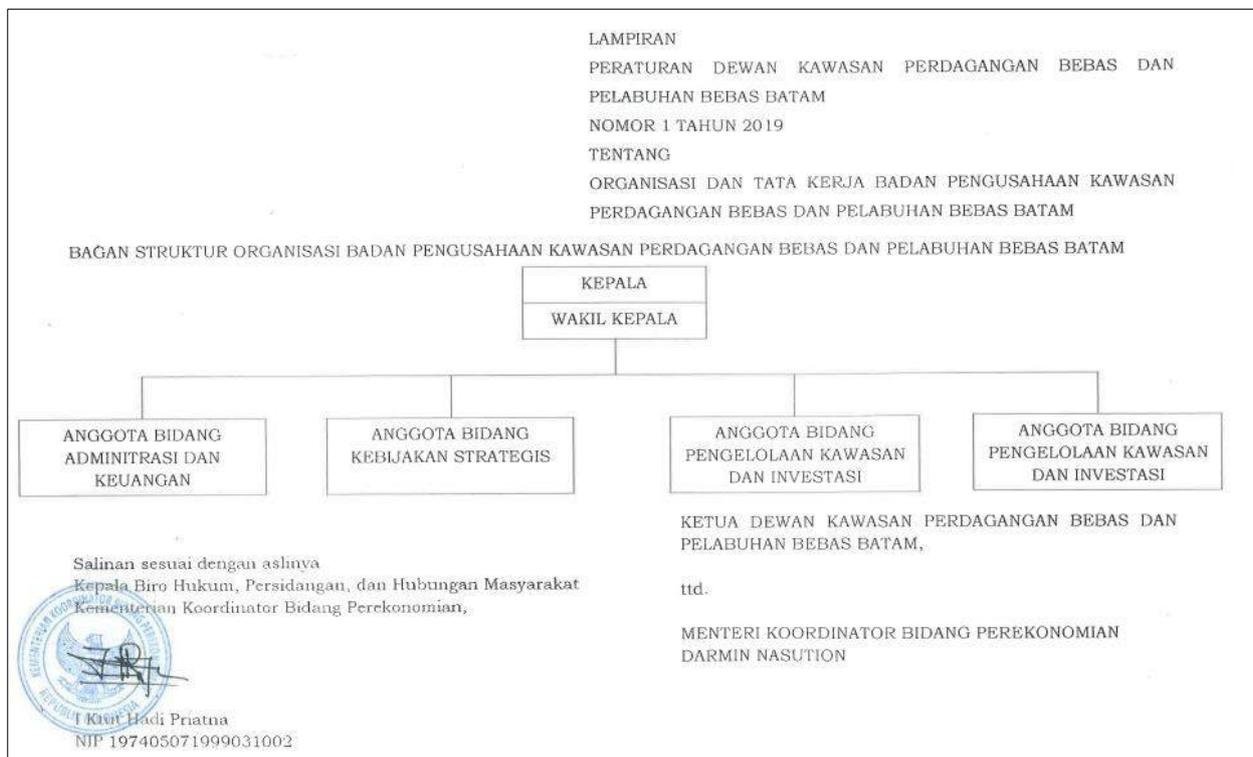
Selain hal diatas PBPB Batam memandang perlu melakukan harmonisasi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang telah menetapkan Kawasan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan langkah untuk segera menetapkan rancangan perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011, dimana PBPB Batam diberi tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya, yang mana perlu disempurnakan kembali hal yang berkaitan dengan tarif, renumerasi dan pembentukan serta tindak lanjut mengenai badan usaha yang berkaitan dengan bandara dan pelabuhan laut. Hal terkait dengan rancangan kerangka regulasi dapat dilihat pada lampiran kerangka regulasi.

### **3.5 Kerangka Kelembagaan**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka struktur kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang disingkat Badan Pengusahaan Batam (BPKPBP – Batam) atau BP Batam.

Tugas-tugas Badang Pengusahaan Batam telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Pebruari 2011, yang antara lain meliputi; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Dengan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan bebas Batam.

Penetapan organisasi baru sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan No. 1 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terdiri dari Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Anggota Bidang Pengusahaan. Setelah itu diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bahwa Kepala BP Batam dijabat secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.



Gambar 3.10 Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Sumber : BP Batam, 2019

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan lingkungan yang cepat, posisi unsur pimpinan di KPBPB Batam yang dibawah Dewan Kawasan dirasa kurang dapat menjawab tantangan lingkungan eksternal yang dinamis, mengingat jalur kebijakan maupun keputusan dan koordinasi tertumpu pada Dewan Kawasan yang perlu berkoordinasi dengan struktur di atasnya yaitu Dewan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk kelembagaan KPBPB Batam, akan lebih efektif dan efisien bila langsung dibawah Pemerintah Pusat yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, dengan anggota dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Propinsi Kepri dan Walikota Batam, sehingga segala bentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi dan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Adapun fungsi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap melekat melalui fungsi-fungsi koordinasi bidang perencanaan dan teknis. Adapun hal lain yang akan dilakukan dalam restrukturisasi kelembagaan di BP Batam diantaranya :

1. Peningkatan kualitas aparatur negara/ SDM BP Batam terhadap reformasi birokrasi yang berkarakter.
2. Membangun tata kelola yang transparan efektif, dan efisien yang sesuai dengan fungsi institusi BP Batam.
3. Menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan fungsi jenjang struktural sehingga pelaksanaan pengelolaan di BP Batam berjalan efektif.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada layanan yang ada di BP Batam guna peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders.
5. Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merujuk Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014.

Dengan restrukturisasi organisasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi dimasa akan datang yang serba cepat dan lebih efektif sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden.

# BAB 4

**T**ARGET KINERJA

**K**ERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Program dalam penyusunan rencana strategik BP-Batam didefinisikan sebagai gabungan dari berbagai rencana kegiatan pengelolaan dan alokasi pendanaan yang telah dihubungkan dengan visi dan misi serta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang akan dilaksanakan unit-unit kerja dilingkungan BP-Batam guna menghasilkan barang maupun jasa yang memiliki nilai manfaat. Nomenklatur program di BP-Batam secara umum dibagi menjadi 2(dua) jenis program, sesuai arahan dari pemerintah pusat yaitu :

1. Program Generik; program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap Kementerian/ Lembaga.
2. Program Teknis; program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (eksternal).

Berdasarkan pembagian nomenklatur diatas, maka program dan kegiatan di BP-Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen; merupakan program yang bersifat internal BP-Batam untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan BP-Batam. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dan Anggota Bidang Kebijakan Strategis yang meliputi unit kerja Eselon II di Biro Umum; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Keuangan; Biro Hukum; Kantor Perwakilan Jakarta; Biro Humas dan Promosi; Pusat Perencanaan Program Strategis; Pusat Harmonisasi Kebijakan; Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK.
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis ; merupakan program pembangunan BP-Batam yang ditujukan untuk menghasilkan pelayanan bagi masyarakat dan stakeholders. Program ini dijalankan oleh 2 (dua) Keanggotaan yaitu Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Anggota Bidang Pengusahaan dengan unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Pengelolaan Lahan; Direktorat Infrastruktur Kawasan; Direktorat Layanan Penanaman Modal dan

Lalu Lintas Barang; Direktorat Pengamanan Aset; Direktorat Restrukturisasi ; Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian serta Unit Usaha (Badan Usaha) di BP Batam.

Rincian Kegiatan dan indikator output dari Program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis, dengan output yang dihasilkan :
  - a) Layanan perencanaan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen perencanaan.
  - b) Layanan pemantauan dan evaluasi, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
  - c) Layanan penelitian dan pengembangan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
  - d) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  
2. Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa.
  - a) Layanan sarana dan prasarana internal, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah layanan pengadaan kebutuhan peralatan internal.
  - b) Layanan manajemen barang milik negara (BMN) , yang diukur dari indikator kinerja output jumlah kegiatan pengelolaan BMN.
  - c) Layanan umum, yang diukur dari indikator kinerja output Jumlah pelaksanaan layanan umum dan kerumahtanggaan.
  - d) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
  - a) Layanan manajemen sumber daya manusia (SDM), yang diukur dari indikator kinerja output jumlah kegiatan pengelolaan SDM yang dilaksanakan.
  - b) Layanan Manajemen Organisasi, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah kegiatan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan.
  - c) Layanan pendidikan dan pelatihan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah layanan Diklat.
  - d) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.
  - a) Layanan pemantauan dan evaluasi, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
  - b) Layanan Manajemen Keuangan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen keuangan yang terselesaikan.
  - c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah pengadaan peralatan dan perangkat data dan komunikasi
  - d) Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN), yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen pengelolaan BMN.
  - e) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  
5. Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum.
  - a) Layanan Hukum, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah penyusunan regulasi yang dihasilkan.
  - b) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.

6. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta.
  - a) Layanan Sarana dan Prasarana Internal , yang diukur dari indikator kinerja output jumlah layanan pengadaan kebutuhan peralatan internal
  - b) Layanan Kerjasama International, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah kegiatan kerjasama internasional yang dilakukan.
  - c) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  
7. Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi
  - a) Layanan pemantauan dan evaluasi, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
  - b) Layanan data dan informasi, yang diukur dari indikator jumlah sistem dan aplikasi yang dikembangkan.
  - c) Layanan penelitian dan pengembangan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
  - d) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  
8. Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan.
  - a) Layanan Penelitian dan Pengembangan, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah dokumen pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan
  - b) Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran
  
9. Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol.
  - a) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang diukur dari indikator kinerja kegiatan publikasi dan kehumasan BP Batam.
  - b) Layanan Protokoler , yang diukur dari indikator kinerja output jumlah kegiatan pelaksanaan layanan keprotokolan.

- c) Promosi Investasi, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah promosi investasi.
  - d) Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
10. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan.
- a) Layanan Audit Internal, yang diukur dari indikator kinerja jumlah dokumen rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengaduan.
  - b) Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.

Rincian Kegiatan dan indikator output dari ***Program Pengembangan Kawasan Strategis*** adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB Batam.
  - a. Penyediaan Lahan, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembebasan lahan.
  - b. Layanan sarana dan prasarana internal, yang diukur dari indikator kinerja jumlah layanan pengadaan kebutuhan peralatan internal
  - c. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
  - a. Fasilitas Bongkar Muat Cargo Pelabuhan, yang diukur dari indikator kinerja Kegiatan pelayanan bongkar muat pelabuhan yang terlaksana.
  - b. Fasilitas Bongkar Muat Container Pelabuhan, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah kapasitas bongkar Muat.
  - c. Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah pelabuhan penumpang domestik yang dikelola.
  - d. Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas di Pelabuhan Batu Ampar, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah fasilitas yang ditingkatkan dan diadakan di pelabuhan Batu Ampar.

- e. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang diukur dari indikator kinerja *output* Jumlah layanan pengadaan kebutuhan internal.
  - f. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
3. Pengelolaan Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- a. Fasilitas Bandar Udara, yang diukur dari indikator kinerja terkelolanya fasilitas Bandar Udara Hang Nadim Batam.
  - b. Fasilitas Data dan *Training Centre*, yang diukur dari indikator kinerja Jumlah Sarana dan prasana yang dipelihara.
  - c. Layanan Data dan Informasi, yang diukur dari indikator jumlah sistem dan aplikasi yang dikembangkan.
  - d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah layanan pengadaan kebutuhan peralatan internal.
  - e. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan.
- a. Fasilitas Gedung Rumah Sakit, yang diukur dari indikator kinerja jumlah gedung yang dipelihara.
  - b. Layanan Rumah Sakit, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah pelayanan yang dilakukan.
  - c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah layanan pengadaan kebutuhan internal.
  - d. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan.
- a. Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase, yang diukur dari indikator kinerja Panjang Jalan, Jembatan dan drainase yang dikelola.
  - b. Pengawasan Infrastruktur, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan.

- c. Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara, yang diukur dari indikator kinerja jumlah pembangunan infrastruktur di pelabuhan dan bandara.
  - d. Infrastruktur Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup, yang diukur dari indikator jumlah pembangunan fasilitas wisata dan agribisnis serta kinerja luas areal pertamanan, area wisata, agribisnis , reklame yang dipelihara.
  - e. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
6. Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.
- a. Layanan Perizinan Lalu Lintas Barang, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kegiatan pembinaan industri besar dan kecil.
  - b. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output jumlah bulan layanan perkantoran.
  - c. Perijinan Terpadu Satu Pintu, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kegiatan Pelayanan yang Dilakukan.
  - d. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan.
- a. Fasilitas Air Baku, yang diukur dari indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Air Baku yang dilaksanakan.
  - b. Fasilitas Air Limbah, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kegiatan Pengelolaan fasilitas limbah yang dilaksanakan.
  - c. Asset Kawasan Agribisnis, yang diukur dari indikator kinerja jumlah kawasan agribisnis yang dikelola.
  - d. Asset Rumah Susun, yang diukur dari indikator kinerja Jumlah Rumah Susun yang dikelola.
  - e. Asset Asrama Haji, yang diukur dari indikator kinerja jumlah aset yang Dikelola.
  - f. Asset Guest House dan PKO Batam, yang diukur dari indikator kinerja jumlah aset yang Dikelola.
  - g. Asset Sport Hall dan Lapangan Bola, yang diukur dari indikator kinerja jumlah aset yang Dikelola.

- h. Fasilitas Balai Latihan Kerja, yang diukur dari indikator kinerja jumlah aset yang Dikelola.
  - i. Asset Kawasan Wisata Galang, yang diukur dari indikator kinerja jumlah aset yang Dikelola.
  - j. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
8. Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam.
- a. Strategi Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, yang diukur dari indikator kinerja jumlah dokumen strategi peningkatan kinerja dan manajemen risiko.
  - b. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
9. Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Unit Usaha BP Batam
- a. Evaluasi dan Pengendalian, yang diukur dari indikator kinerja jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi dan pengendalian perusahaan dan kerjasama perusahaan.
  - b. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.
10. Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam.
- a. Strategi Restrukturisasi dan Budaya Unit Usaha, yang diukur dari indikator kinerja jumlah dokumen rekomendasi restrukturisasi dan pembinaan budaya unit usaha.
  - b. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.

11. Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi.

- a. Keamanan dan Keselamatan Aset BP Batam, yang diukur dari indikator kinerja Jumlah kegiatan pengamanan aset BP Batam yang dilakukan.
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal , yang diukur dari indikator kinerja Jumlah layanan pangadaan kebutuhan peralatan internal.
- c. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja *output* jumlah bulan layanan perkantoran.

**4.2 Target Indikator Kinerja Utama**

Target indikator kinerja utama BP Batam dalam 5 tahun kedepan sebagaimana yang ditampilkan dalam 6 indikator utama dibawah ini, investasi sebesar US\$ 6,7 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp 11,5 triliun sebagaimana Gambar dibawah ini :



Gambar 4.1 Target Indikator Kinerja Utama BP-Batam 2020-2024

Sumber: Pusrenpros, 2019

Tabel 4.1 Program dan Target BP-Batam 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program					Satuan	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel	Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran	80	80	80	80	80	Persen	Pengelolaan Manajemen yang Efisien dan Efektif	Kesesuaian Perencanaan Program dan Anggaran	80	80	80	80	80	Persen
		Pencapaian kinerja laporan keuangan BP Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai Laporan Keuangan		Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi	80	80	80	80	80	Persen
										Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	80	85	85	85	90	Nilai monev
	Meningkatnya Kinerja SDM	Nilai Kinerja SDM BP Batam	90	90	90	90	90	Nilai SKP	Peningkatan Nilai Kinerja SDM	Nilai Kinerja SDM BP Batam	90	90	90	90	90	Nilai SKP
	Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha	Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit kerja	75	75	75	75	75	Persen	Penerapan hasil riset/kajian ke dalam rencana kerja unit BP Batam	Jumlah dokumen hasil kajian yang diterapkan oleh unit kerja	4	4	4	4	4	Dokumen
	Pelaksanaan Promosi dan Business Gathering	Jumlah Kegiatan Promosi dan Business Gathering	5	5	5	5	5	Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Business Gathering	Jumlah Kegiatan Promosi dan Business Gathering	5	5	5	5	5	Kegiatan

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program					Satuan	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengembangan Kawasan Strategis	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam	Presentasi peningkatan nilai Investasi di Batam	10	10	10	10	10	Persen	Tersedianya Lahan bagi Investasi di Batam	Luas Lahan	50	50	50	50	50	Ha
	Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem	Persentase peningkatan Pendapatan BP Batam	20	20	20	20	20	Persen	Terselesaikan dan Terintegrasi seluruh aplikasi layanan BP Batam	Jumlah Aplikasi Layanan BP Batam yang terintegrasi	9	9	9	9	9	Aplikasi
										Jangkauan akses IT dalam mendukung layanan	1	1	1	1	1	GB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam	Jumlah layanan yang terintegrasi	9	9	9	9	9	Aplikasi	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Batam	Laporan dan Pers Release	3	3	3	3	3	Kegiatan
										Jumlah dokumen perijinan yang terselesaikan di Pelayanan terpadu BP Batam	1000	1000	1000	1000	1000	Dokumen
	Meningkatnya Pendapatan BP Batam	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perijinan Terpadu BP Batam	95	95	95	95	95	Nilai Kepuasan	Terpenuhinya kelengkapan fasilitas dan Infrastruktur pendukung Investasi	Peningkatan aksesibilitas antar kawasan industri dengan pelabuhan	40	40	40	40	40	Km/Jam
										Waktu Tunggu Kapal	3	3	3	3	3	Hari
										Waktu Pelayanan Pesawat	30	30	30	30	30	Menit
										Length of Stay (LOS)	4	4	4	4	4	Hari
	Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha	Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit usaha	75	75	75	75	75	Persen	Penerapan hasil riset/kajian ke dalam rencana kerja unit BP Batam	Jumlah dokumen hasil kajian yang diterapkan oleh unit kerja	3	3	3	3	3	Dokumen

Sumber: IKU dan Nomenklatur SOTK BP Batam, 2019

### 4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan KPBPB Batam adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip secara efektif dan efisien.

Pendapatan BP Batam adalah penerimaan yang bersumber dari beberapa unit usaha yang dikelola dalam bentuk PNBPN yang meliputi :

1. Pengelolaan data center dan system informasi;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan PBPB – Batam;
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut;
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan Bandar udara;
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan umum;
6. Pelayanan lalu lintas barang ke kawasan PBPB-Batam;
7. Pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan;
8. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemukiman dan perumahan pekerja;

Sedangkan sumber pendanaan lain berasal dari sumber Rupiah Murni(RM), dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendanaan yang berasal dari swasta dalam rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU ) atau pola Kerjasama Operasi (KSO) atau Kerjasama Pemanfaatan asset (KSP).

Kerangka pendanaan dalam kaitannya pengelolaan keuangan dan pendanaan di BP-Batam diarahkan pada :

1. Peningkatan pendapatan BP-Batam yang *sustainable*, yang tertuang dalam peningkatan PNBPN rata-rata sebesar 25% hingga tahun 2021 yang terfokus pada; intensifikasi potensi pendapatan BP-Batam, penyesuaian tarif jasa layanan, peningkatan fasilitas pelayanan, sarana prasarana, perubahan bisnis model menjadi kemitraan, perubahan

bisnis proses dengan menggunakan Informatika Teknologi (IT), peningkatan kualitas SDM, mengembangkan asset yang ada (pelabuhan laut, bandara, kawasan KPLI), *redevelopment* kawasan yang berpotensi.

2. Peningkatan nilai kemampuan BP-Batam dalam pengelolaan asset yang dimilikinya dalam menghasilkan laba/ keuntungan, melalui perbaikan nilai *Return on Asset (ROA)*, melalui langkah: revitalisasi asset, *review system* kerjasama operasional (KSO) yang ada, peningkatan kualitas SDM, perbaikan management pengelolaan, mengubah budaya kerja ke *interpreneurship*, peningkatan infrastruktur dan menyusun rencana bisnis/ *business plan* dari asset yang secara keekonomiannya dapat dikerjasamakan.
3. Pengembangan pengelolaan bisnis maupun kerjasama dan peningkatan sarana prasarana, melalui metode struktur pendanaan yang saling menguntungkan, seperti melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership (PPP)*.

#### 4.3.1 Kebutuhan Investasi dan Pendanaan 2020 – 2024

Merujuk rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, sasaran makro pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5.4 sampai 6 % pertahun dan pertumbuhan PDB perkapita sebesar 4.0 +/- 1%, seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Narasi RPJMN 2020-2024

Sumber : Rancangan Teknoratik RPJMN 2020-2024 Bappenas

Perhitungan kebutuhan investasi tahun 2020-2024 dihitung mulai dengan pendekatan pertumbuhan PDRB Kota Batam baik harga konstan maupun harga berlaku dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dihitung proyeksi PDRB dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan hal diatas, maka ICOR untuk kota Batam yaitu 10, selain itu data-data tersebut dapat menghasilkan perhitungan Indeks Harga Implisit (IHI) senilai 1,51. Hasil analisis perhitungan yang diperoleh per-tahun diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan yang ditargetkan hingga tahun 2024 sesuai dengan skenario tipe sedang dalam RPJMN pada gambar 4.2 sebesar 5.72% +1% bagi KPBPB-Batam yaitu menjadi sebesar 6.72% skenario ini juga diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan bagi pengembangan Batam dan Bintan oleh nasional sebesar 5,37%. Sehingga dapat diketahui rencana proyeksi jumlah kebutuhan investasi (PMTB) yang dibutuhkan untuk pengembangan KPBPB-Batam hingga tahun 2024 sebesar Rp. 675.570,67 (Miliar Rp) yang diperhitungkan terbagi berdasarkan kontribusi seperti pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Proyeksi Kebutuhan Investasi Di KPBPB- Batam 2020 - 2024

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	JUMLAH
Perkiraan Kebutuhan Investasi (PMTB) Dengan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6,72% ( Miliar Rp)	95,441.85	98,766.70	141,170.54	158,081.59	182,109.99	675,570.67
Perkiraan Kebutuhan Investasi PMA dan PMDN ( Miliar Rp)	15,658.90	16,204.40	23,161.49	25,936.04	29,878.32	110,839.15
Perkiraan Kebutuhan Investasi PMA ( Miliar Rp)	13,303.80	13,767.26	19,678.00	22,035.26	25,384.62	94,168.95
Perkiraan Kebutuhan Investasi PMA (Juta US\$)	950.27	983.38	1,405.57	1,573.95	1,813.19	6,726.35
Perkiraan Kebutuhan Investasi PMDN ( Miliar Rp)	2,355.10	2,437.14	3,483.49	3,900.78	4,493.70	16,670.21

Keterangan : Konversi US Dollar ke Rupiah dengan Asumsi 1 USD = Rp 14.000

Sumber: Analisis Pusrenpros- BP Batam,2020

Selain hal tersebut diatas, berikut disampaikan beberapa pilihan daftar rencana kegiatan atau proyek strategis yang dianggap dapat menarik investor untuk menanamkan modal investasinya di kawasan Barelang, dengan tujuan mengungkit pertumbuhan ekonomi diatas 6.72%.

Tabel 4.3 Project Forthcoming Strategis BP Batam

NO	PROJECT	Nilai Investasi	
		USD (Dalam Ribuan)	RP (Dalam Jutaan)
<b>A. KPBU</b>		<b>1,573,950</b>	<b>22,035,300</b>
1	General Cargo Port Sekupang	36,600	512,400
2	Waterfront CBD Batam Centre	15,000	210,000
3	Batam LRT	836,350	11,708,900
4	Marina City	600,000	8,400,000
5	Batam E-Governmnet Phase 2	86,000	1,204,000
<b>B. SWASTA</b>		<b>12,247,808</b>	<b>171,469,312</b>
1	Batam Toll Road	131,808	1,845,312
2	Sea Eagle Resort	600,000	8,400,000
3	New Nagoya	16,000	224,000
4	Power Plant Barelang	11,000,000	154,000,000
5	Batam China Town Complex	500,000	7,000,000
<b>C. PEMERINTAH</b>		<b>857,217</b>	<b>12,001,038</b>
1	Batam Waste Water Treatment Plan Phase 2	157,217	2,201,038
2	Water Dam Pulau Galang Baru	400,000	5,600,000
3	Water Dam Pulau Galang	300,000	4,200,000
<b>TOTAL</b>		<b>14,678,975</b>	<b>205,505,650</b>

Keterangan : Konversi US Dollar ke Rupiah dengan Asumsi 1 USD = Rp 14.000

Sumber : Pusrenpros - BP Batam, 2020

Berikut disampaikan tabel matriks indikasi rencana pembangunan pendanaan prioritas, rencana kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional dan Non-Operasional) dan Rencana Penerimaan BP Batam Tahun 2020-2024.

Tabel 4.4 Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga

Indikasi Target Dan Pendanaan Prioritas

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPE-Batam</b>							<b>5.664,7</b>			
<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut</b>							<b>816,6</b>			
Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil	Jumlah kapasitas bongkar muat barang di pelabuhan Kabil (ton/jam)		1000				250,8		Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Penumpang Pelabuhan Domestik (dan internasional)	Jumlah penumpang pelabuhan domestik (Orang/Tahun)	4000000		8000000			565,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara</b>							<b>909,8</b>			
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah kapasitas terminal kargo (Ton/Tahun)			350000		650000	909,8	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Penumpang (Orang/Tahun)		6000000	6500000	6700000	7000000	0,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan</b>							<b>284,0</b>			
Pengembangan pusat kesehatan berbasis internasional	Jumlah baik bangunan (unit)			1			84,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Pengembangan pusat kesehatan berbasis internasional	Jumlah peralihan kesehatan (Lot)		5				200,0	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
<b>Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Perairan dan Sorotan</b>							<b>1.572,1</b>			
Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase	Jumlah sarana prasarana jalan dan jembatan kawasan yang dibangun (km)	60	50	30	40	4	1.572,1	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah</b>							<b>2.072,2</b>			
Fasilitas air baku	Tambahan volume air baku yang tersedia (L/detik)	600	230			1000	1.644,9	Kota Batam, Borelang	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
Fasilitas air limbah (Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3)	Luas kawasan pengelolaan limbah B3 (Ha)			20			427,3	Kota Batam	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	02
<b>JUMLAH</b>							<b>5.664,7</b>			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Para Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

Sumber; RPJMN 2020-2024

Tabel 4.5 Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional)

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024				
<b>KEMENTERIAN / LEMBAGA</b>													<b>2,226,885,004</b>	<b>1,384,826,543</b>	<b>1,384,826,543</b>	<b>1,384,826,543</b>	<b>1,384,826,543</b>
	<b>1. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan yang akuntabel</b>								188,086,677	126,145,665	126,145,665	126,145,665	126,145,665				
	- Presentase unit kerja yang memiliki dokumen dan tata perencanaan yang berkualitas baik		80	80	80	85	85	Persen									
	<b>2. Meningkatnya kinerja SDM BP Batam dan kualitas pelayanan</b>								694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161				
	- Nilai survey kepuasan pelanggan masyarakat		>4	>4	>4	>4	>4	Skala Predikat (Baik)									
	<b>3. Meningkatnya peran hasil riset dan inovasi terhadap pengembangan usaha</b>								27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187				
	- Presentasi hasil riset dan inovasi pengembangan usaha yang berhasil dikembangkan, ditindaklanjuti dan dilaksanakan		50	50	50	75	90	Persen									
	<b>4. Meningkatnya nilai real investasi dalam pengembangan KPBPB Batam</b>								1,317,448,979	537,331,530	537,331,530	537,331,530	537,331,530				
	- Presentasi hasil peningkatan real investasi yang berhasil merealisasikan investasi di daerah KPBPB Batam		10	10	10	10	10	Persen									
	<b>5. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana berstandar internasional</b>																
	- Hasil peningkatan pengembangan sarana prasarana yang berstandar		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	Sertifikasi									
<b>PROGRAM 01: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>													<b>856,910,147</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>
	<b>1. Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel</b>								188,086,677	178,671,543	178,671,543	178,671,543	178,671,543				
	- Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran		80	80	80	80	80	%									
	- Pencapaian kinerja laporan keuangan BP Batam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai Laporan Keuangan									
	<b>2. Meningkatnya Kinerja SDM</b>								641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283				
	- Nilai Kinerja SDM BP Batam		90	90	90	90	90	Nilai SKP									
	<b>3. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>								27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187				
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit kerja		75	75	75	75	75	Persen									
<b>PROGRAM 06: PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS</b>													<b>1,369,974,857</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>
	<b>1. Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam</b>								1,317,448,979	484,805,652	484,805,652	484,805,652	484,805,652				
	- Presentasi peningkatan nilai Investasi di Batam		10	10	10	10	10	Persen									
	<b>2. Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem</b>								52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878				
	- Presentase peningkatan Pendapatan BP Batam		20	20	20	20	20	Persen									
	<b>3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam</b>																
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		9	9	9	9	9	Aplikasi									
	<b>4. Meningkatnya Pendapatan BP Batam</b>																
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		95	95	95	95	95	Nilai Kepuasan									
	<b>5. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>																
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit usaha		75	75	75	75	75	Persen									

Sumber; Analisis Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, 2019

Tabel 4.6 Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional dan Non-Operasional)

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENTERIAN / LEMBAGA</b>								<b>3,626,885,004</b>	<b>3,084,826,543</b>	<b>2,635,426,543</b>	<b>2,185,626,543</b>	<b>1,879,126,543</b>		
	<b>1. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan yang akuntabel</b>							188,086,677	126,145,665	126,145,665	126,145,665	126,145,665		
	- Presentase unit kerja yang memiliki dokumen dan tata perencanaan yang berkualitas baik		80	80	80	85	85	Persen						
	<b>2. Meningkatnya kinerja SDM BP Batam dan kualitas pelayanan</b>							694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161		
	- Nilai survey kepuasan pelanggan masyarakat		>4	>4	>4	>4	>4	Skala Predikat (Baik)						
	<b>3. Meningkatnya peran hasil riset dan inovasi terhadap pengembangan usaha</b>							27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187		
	- Presentasi hasil riset dan inovasi pengembangan usaha yang berhasil dikembangkan, ditindaklanjuti dan dilaksanakan		50	50	50	75	90	Persen						
	<b>4. Meningkatnya nilai real investasi dalam pengembangan KPBPB Batam</b>							2,717,448,979	2,237,331,530	1,787,931,530	1,338,131,530	1,031,631,530		
	- Presentasi hasil peningkatan real investasi yang berhasil merealisasikan investasi di daerah KPBPB Batam		10	10	10	10	10	Persen						
	<b>5. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana berstandar internasional</b>													
	- Hasil peningkatan pengembangan sarana prasarana yang berstandar		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	Sertifikasi						
<b>PROGRAM 01: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								<b>856,910,147</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>		
	<b>1. Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel</b>							188,086,677	178,671,543	178,671,543	178,671,543	178,671,543		
	- Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran		80	80	80	80	80	%						
	- Pencapaian kinerja laporan keuangan BP Batam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai Laporan Keuangan						
	<b>2. Meningkatnya Kinerja SDM</b>							641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283		
	- Nilai Kinerja SDM BP Batam		90	90	90	90	90	Nilai SKP						
	<b>3. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>							27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187		
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit kerja		75	75	75	75	75	Persen						
<b>PROGRAM 06: PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS</b>								<b>2,769,974,857</b>	<b>2,237,331,530</b>	<b>1,787,931,530</b>	<b>1,338,131,530</b>	<b>1,031,631,530</b>		
	<b>1. Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam</b>							2,717,448,979	2,184,805,652	1,735,405,652	1,285,605,652	979,105,652		
	- Presentasi peningkatan nilai Investasi di Batam		10	10	10	10	10	Persen						
	<b>2. Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem</b>							52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878		
	- Persentase peningkatan Pendapatan BP Batam		20	20	20	20	20	Persen						
	<b>3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam</b>													
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		9	9	9	9	9	Aplikasi						
	<b>4. Meningkatnya Pendapatan BP Batam</b>													
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		95	95	95	95	95	Nilai Kepuasan						
	<b>5. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>													
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit usaha		75	75	75	75	75	Persen						

Sumber; Analisis Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, 2019

Tabel 4.7 Rencana Penerimaan BP Batam Tahun 2020-2024

NO.	KETERANGAN	2019			2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET (DIPA)	Δ %	OUTLOOK	Δ %	OUTLOOK	Δ %	OUTLOOK	Δ %	OUTLOOK	Δ %
		Juta Rp	Juta Rp		Juta Rp		Juta Rp		Juta Rp		Juta Rp		Juta Rp	
I	<b>Kantor Pusat</b>	<b>61.650,00</b>	<b>74.265,89</b>	<b>120,46</b>	<b>69.463,12</b>	<b>(6,47)</b>	<b>160.000,05</b>	<b>130,34</b>	<b>193.286,22</b>	<b>20,80</b>	<b>212.937,93</b>	<b>10,17</b>	<b>234.935,01</b>	<b>10,33</b>
	- Direktorat Pemanfaatan Aset	22.000,00	15.755,97	71,62	24.496,62	55,48	24.487,90	(0,04)	30.848,61	25,97	34.624,03	12,24	38.861,50	12,24
	- Direktorat Pembangunan Prasarana & Pusat Data & Sistem Informasi	5.500,00	4.802,05	87,31	6.066,50	26,33	5.850,93	(3,55)	6.572,22	12,33	6.965,55	5,98	7.382,43	5,98
	- Direktorat Lalu Lintas Barang	15.000,00	8.426,53	56,18	8.400,00	(0,31)	82.045,89	876,74	104.943,42	27,91	118.687,35	13,10	134.231,25	13,10
	- Biro Keuangan	19.000,00	1.191,27	794,18	1.500,00	25,92	1.273,11	(15,13)	1.405,96	10,44	1.477,50	5,09	1.552,68	5,09
II	<b>Unit Mandiri</b>	<b>1.211.657,50</b>	<b>1.255.543,89</b>	<b>103,62</b>	<b>1.406.251,88</b>	<b>12,00</b>	<b>1.778.578,64</b>	<b>26,48</b>	<b>2.039.904,36</b>	<b>14,69</b>	<b>2.188.930,27</b>	<b>7,31</b>	<b>2.351.875,14</b>	<b>7,44</b>
	- Kantor Pengelolaan Lahan	300.000,00	575.526,51	191,84	348.094,01	(39,52)	607.438,92	74,50	641.120,84	5,54	658.655,82	2,74	676.670,39	2,74
	- BUBU Hang Nadim	278.007,50	201.893,46	72,62	331.524,10	64,21	260.831,52	(21,32)	313.571,53	20,22	343.815,06	9,64	376.975,54	9,64
	- Badan Pengelola Pelabuhan	530.450,00	358.901,14	67,66	580.487,26	61,74	590.712,56	1,76	726.535,57	22,99	805.744,26	10,90	893.588,47	10,90
	- Rumah Sakit BP Batam	60.000,00	88.625,81	147,71	100.000,00	12,83	195.144,33	95,14	206.373,98	5,75	212.228,87	2,84	218.249,85	2,84
	- Kantor Pengelolaan Air & Limbah	42.000,00	29.628,60	70,54	44.746,51	51,02	123.271,19	175,49	150.930,57	22,44	167.007,13	10,65	184.796,11	10,65
	- Kantor Perwakilan Jakarta	1.200,00	968,37	80,70	1.400,00	44,57	1.180,13	(15,71)	1.371,87	16,25	1.479,13	7,82	1.594,77	7,82
III	<b>Jumlah (I+II)</b>	<b>1.273.307,50</b>	<b>1.329.809,77</b>	<b>104,44</b>	<b>1.475.715,00</b>	<b>10,97</b>	<b>1.938.578,70</b>	<b>31,37</b>	<b>2.233.190,58</b>	<b>15,20</b>	<b>2.401.868,20</b>	<b>7,55</b>	<b>2.586.810,15</b>	<b>7,70</b>

Sumber; Analisis Biro Keuangan BP Batam, 2019

# BAB 5

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BP Batam dalam RPJMN ke-IV 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pembangunan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, yang terpadu dan searah dengan rencana pembangunan nasional lima tahun mendatang guna menunjang tercapainya sasaran strategis RPJMN. Rencana Strategis BP Batam ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan di Kawasan Batam serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap sesuai dengan prioritas. Rencana Strategis BP Batam Tahun 2020-2024 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala BP Batam pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Dengan mengacu pada tugas, fungsi, kewenangan serta mandat yang diberikan ke BP Batam sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2007, visi “ BP Batam memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong”. Diperlukan pula dukungan politik yang kuat baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dukungan ini secara nyata diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Pusat. Selain itu diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal kerjasama (sinergi positif), sedangkan dukungan dari masyarakat adalah dalam hal menciptakan ketertiban dan keamanan.

Dalam operasionalisasinya, guna pencapaian visi, rumusan kegiatan serta indikator output dan outcome diperlukan sebagai penjabaran detail kegiatan maka setiap eselon II yang ada di lingkungan BP Batam harus menjabarkan kembali Rencana Strategis yang telah disusun ini ke dalam

Rencana Strategis Eselon II atau unit kerja, dengan menggunakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai rujukannya agar dapat dioperasionalkan berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing serta untuk menjamin adanya konsistensi. Penyusunan Rencana Strategis BP Batam telah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab. Secara sistematis rencana strategis ini diperlukan untuk 1) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, 2) Mengelola keberhasilan, 3) Perangkat manajerial, 4) Orientasi ke masa depan, 5) Adaptif, 6) Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, 7) Meningkatkan komunikasi, dan 8) Menangani keterbatasan sumber daya.

Proses penyusunan rencana strategis BP Batam dilakukan melalui suatu proses, dan untuk mencapai hasil – hasil yang diinginkan, pimpinan dan seluruh jajaran staf harus memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan proses perencanaan strategis dan secara konsisten memperhatikan pelaksanaan tujuan dan pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana strategis ini, maka diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mempertajam arah dan meningkatkan kelayakan kegiatan BP Batam dalam program tahunannya, baik substansi maupun pembiayaannya, sehingga BP Batam dapat meningkatkan efektivitas perencanaan program secara menyeluruh.

**LAMPIRAN**

Tabel Evaluasi Target dan ,Realisasi Renstra BP Batam 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Evaluasi	Alternatif Solusi	
					Target	Realisasi											
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya saing di Asia Tenggara	1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional	1.1. Meningkatkan Peran Kelembagaan yang profesional dalam mengatisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global	1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi	1.1.1 Persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	100 Dok	33 Dok	37 Dok	23 Dok	40 Dok	32 Dok	44 Dok	17 Dok	40 Dok	26 Dok	Peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi merupakan syarat utama dalam mencapai kinerja BP Batam secara keseluruhan, sehingga belum mencapai target yang diharapkan dari tahun 2015 s/d 2019 atau 50 % dari total keseluruhan.	Terealisasinya aturan dan regulasi yang tepat sasaran dan mudah dilaksanakan bagi para investor. Selain itu berbagai issue status pengelolaan kawasan KPBPB -Batam oleh pemerintah pusat harus segera ditetapkan dan dipublikasikan sehingga tidak membuat kerancuan dalam pemberian jaminan kepastian pengembangan KPBPB-Batam	
			1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.2.1 Tersusunnya grand design dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam	100%	0%	100%	0	100%	50	100%	100%	100%	100%	100%	BP Batam telah menyelesaikan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi pada tahun 2019	Melaksanakan hasil <i>mapping road map</i> BP-Batam sesuai dengan prinsip <i>good corporate</i> dan <i>good governance</i>
			1.2.2 Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89.99%	Jumlah unit yang telah melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja sebanyak 22 unit kerja atau dengan realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 100%	Mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja BP-Batam sesuai dengan prinsip <i>good corporate</i> dan <i>good governance</i>	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Evaluasi	Alternatif Solusi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2. Menjaring dan Mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 sektor industri	2.1.1 Nilai investasi real di 8 fokus industry yang dikembangkan KPBPB - Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	USD 359,417,326	USD 367,743,000	USD 400,000,000	USD 471,368,000	USD 558,001,149	USD 1,116,895,000	USD 700,000,000	USD 391,850,300	USD 900,000,000	USD 461.044.862	<p>Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB - Batam pada tahun 2015 s/d 2017 mencapai target yang ditetapkan akan tetapi pada tahun 2018 belum mencapai target sesuai Renstra BP Batam 2015-2019. Adapun pada nilai investasi PMA pada tahun 2018 diperoleh data hingga semester 1 sejumlah USD 391.850.300, memasuki semester 2 seiring dengan diterapkannya OSS (Online Single Submission), maka nilai investasi sejak Juli hingga Desember 2018 menggunakan mata uang rupiah sebesar Rp856.867.132.469.404 dan tidak dapat dipisahkan antara komitmen dan realisasi investasi. Total nilai kumulatif yang terkumpul hingga 2019 mencapai 51.2%</p>	<p>Peningkatan <i>easy doing business</i> di Batam, dengan pemasaran serta marketing dan informasi update terkait Batam. Selain itu transparansi informasi terkait pengelolaan dan ketersediaan lahan maupun insentif yang diberikan di KPBPB- Batam.</p>
				2.1.2 Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	15 Hari	3 Hari	4 Hari	3 Hari	5 Hari	4 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	<p>Untuk indikator waktu pelayanan perijinan investasi yang ada di BP Batam, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, target pada tahun 2019 waktu pelayanan perijinan investasi paling lama diselesaikan dalam 2 hari, namun pada realisasinya waktu pelayanan perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari</p>	<p>Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan operasional bagi investor dengan mengikuti perkembangan teknologi dalam pemudahan akses informasi bagi para investor dan calon investor.</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Evaluasi	Alternatif Solusi
					Target	Realisasi										
		3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhan yang berstandar International	3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1 Target Pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.6 trilyun di tahun 2019	Rp. 210,855,000,000	Rp. 204,814,943,449	Rp. 214,045,000,000	Rp. 240,072,427,067	Rp. 400,000,000,000	Rp. 397,966,466,740	Rp. 505,000,000,000	Rp. 401,496,581,183	Rp. 530,450,000,000	Rp. 359,220,285,813	Target Pendapatan pelabuhan laut dari tahun 2015 s/d 2017 diatas 90% dari target akan tetapi pada realisasi tahun 2018 menurun dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 19%. Total kumulatif dari target yang direncanakan hingga 2019 baru tercapai 86% .	Peningkatan pendapatan, melalui dilengkapinya sarana prasarana penunjang operasional kepelabuhanan yang modern serta pengembangan promosi dan pemasaran, selain itu pola kerjasama dalam pengembangan kepelabuhanan.
				3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari	7 Hari	3 Hari	4 Hari	3 Hari	4 Hari	2 Hari	3 Hari	2 Hari	3 Hari	2 Hari	Untuk indikator Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, target pada tahun 2019 waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer paling lama diselesaikan dalam 3 hari, pada realisasinya waktu pelayanan perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari	Peningkatan pelayanan sistem kerja operasional dan pemasaran terkait kepelabuhanan di Batam
				3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai 1.1 Trilyun di tahun 2019	Rp. 113,855,000,000	Rp. 149,764,572,295	Rp. 125,534,000,000	Rp. 172,572,126,662	Rp. 220,889,468,429	Rp. 236,963,120,913	Rp. 252,396,289,155	Rp. 247,485,731,789	Rp. 500,000,289,155	Rp. 575,678,787,300	Target Indikator pendapatan Bandara dari tahun 2015 s/d 2019 melebihi target yang diharapkan akan tetapi pada tahun 2018 pendapatan bandara hanya 98% dari target yang diharapkan. Total kumulatif dari target hingga 2019 mencapai 98%.	Peningkatan pendapatan melalui pembukaan strategi marketing dan pemasaran, maupun pola kerjasama bandara udara. Maupun peningkatan tarif baru dari berbagai layanan yang ada.
				3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat container dan cargo bandara Hang Nadim max 45 Menit	45 Menit	45 Menit	30 Menit	Indikator waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim selalu memenuhi target atau dengan besar persentase 100%.	Peningkatan pelayanan sistem kerja operasional							

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Evaluasi	Alternatif Solusi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan-kawasan investasi yang berwawasan investasi	4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1 Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 Milyar di Tahun 2019	Rp. 90,245,000,000	Rp. 89,438,091,619	Rp. 95,717,000,000	Rp. 62,370,419,851	Rp. 96,217,000,000	Rp. 65,144,167,896	Rp. 100,946,000,000	Rp. 72,554,487,099	Rp. 60,000,000,000	Rp. 88,625,814,870	Pendapatan Rumah Sakit dari tahun 2015-2019 belum memenuhi target, akan tetapi pada tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan%	Pelaksanaan percepatan operasional pada bangunan gedung baru rumah sakit, serta membuka jenis-jenis pelayanan baru yang potensial bagi peningkatan pendapatan.
				4.1.2 Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 Milyar di Tahun 2019	Rp. 26,541,000,000	Rp. 24,455,735,355	Rp. 27,744,000,000	Rp. 30,986,364,202	Rp. 33,009,865,922	Rp. 28,222,663,926	Rp. 47,133,107,000	Rp. 26,776,468,337	Rp. 42,000,107,000	Rp. 29,628,604,683	Pendapatan Kantor Air pada Tahun 2015 s/d 2016 lebih dari 92% dari target yang diharapkan, akan tetapi pada tahun 2017 s/d 2019 mengalami penurunan pendapatan dari target yang diharapkan hal ini disebabkan beberapa pemasangan sarana prasarana masih dalam masa perbaikan dan belum terpasang sempurna pada area cakupan pelayanan baru di wilayah Batam. Total kumulatif hingga tahun 2019 ini baru mencapai 79% dari target pendapatan.	Peningkatan tarif air baru guna mencapai target yang direncanakan, perlu sosialisasi dan pembelajaran terhadap masyarakat lebih intensif serta studi yang komperhensif terkait rencana kenaikan tarif air. Selain itu perlu persetujuan dari DPRD Kota Batam.
				4.1.3 Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	100	85.1239	Minimal Class 3(Skala 1-4)	Class 3	Indikator terjaganya kualitas udara dan air yang baik, dalam hal ini data yang diperoleh hanya dari hasil uji kualitas air, yaitu masuk ke dalam Class 3 dari target Minimal Class 3 (Skala 1-4) dengan realisasi 100%. Sedangkan untuk hasil uji kualitas udara merupakan kewenangan Pemerintah Kota.	Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam pengukuran maupun data bagi parameter terciptnya kawasan yang sehat dan berwawasan lingkungan						
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>					<b>98.13%</b>		<b>97.00%</b>		<b>105.43%</b>		<b>90.35%</b>		<b>82.68%</b>			

**Tabel Issue Kerangka Kelembagaan Tahun 2020-2024**

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan kelembagaan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Penerbitan Peraturan Kepala BP Batam tentang Dewan Pengawas	Belum ditetapkannya batasan pembiayaan dan target kinerja dari Dewan Pengawas yang mempengaruhi struktur anggaran	Biro Hukum	Internal : - Biro Sumber Daya Manusia Dan Biro Hukum - Direktorat Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko  Eksternal : - KemenKeu - Bappenas	2020-2021
2	Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenjang karier ASN di BP Batam, terkait tidak adanya pembina SDM atau pendelegasian	Ditetapkannya BP-Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural SDM yang ber-status PNS belum diatur secara spesifik., menyebabkan jenjang karier PNS di BP Batam menjadi ambigu. (jumlah PNS di BP-Batam berjumlah 2075 pegawai).	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Internal: - Biro Hukum - Direktorat Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko  Eksternal : - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BAKN - Menpan & RB	2020-2021

**Tabel Issue Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024**

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Proses Kegiatan
1	Pembentukan PP baru tentang P.Tanjung Sauh dan P.Ngenang sebagai KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 50 juta TeUS di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun mengingat P.Tanjung Sauh dan P.Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, maka perlu ditetapkan P.Tanjung Sauh dan P.Ngenang sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam. Selain itu, Pemerintah pusat perlu segera menetapkan P.Tanjung Sauh sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian barat.	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN	Menunggu Hasil Konsultasi persetujuan dengan institusi/lembaga terkait atas pejabat pimpinan di BP Batam oleh Dewan Pengawas dan Presiden RI
2	Pembentukan PP baru yang berlaku Khusus di Wilayah KPBPB tentang keluar masuk barang kontainer	Harmonisasi hubungan kepelabuhanan dengan Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai terkait regulasi keluar masuknya barang container di Wilayah KPBPB Batam	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta - Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN - Beacukai	Menunggu Hasil Konsultasi persetujuan dengan institusi/lembaga terkait atas pejabat pimpinan di BP Batam oleh Dewan Pengawas dan Presiden RI

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Proses Kegiatan
3	Pembentukan Peraturan DK tentang rencana Strategis KPBPB Batam Bintan Karimun	Harmonisasi DK dalam menetapkan kawasan unggulan pada masing-masing KPBPB di Kepulauan Riau	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta - Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN - Bappenas	Menunggu Hasil Konsultasi persetujuan dengan institusi/lembaga terkait atas pejabat pimpinan di BP Batam oleh Dewan Pengawas dan Presiden RI
4	Pembentukan PP baru tentang Pengelolaan HPL P.Rempang dan P.Galang	Kepastian kewenangan pengelolaan Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait pengelolaan HPL sehingga terhambatnya pengembangan investasi di pulau tersebut	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta - Direktorat Usaha Fasilitas dan Lingkungan - Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN - Bappenas	Menunggu Hasil Konsultasi persetujuan dengan institusi/lembaga terkait atas pejabat pimpinan di BP Batam oleh Dewan Pengawas dan Presiden RI

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Proses Kegiatan
5	Pembentukan PP yang mengatur Hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Perlunya Regulasi yang mengatur hubungan unit kerja (antara BP Batam dengan Pemerintah Kota) terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, Perikanan di Kawasan DAM	Internal: - Direktorat Pengelolaan Lahan - Pusat Perencanaan Program Strategis - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta - Direktorat Infrastruktur Kawasan - Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN	Menunggu Hasil Konsultasi persetujuan dengan institusi/lembaga terkait atas pejabat pimpinan di BP Batam oleh Dewan Pengawas dan Presiden RI
6	Penerbitan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Laut	Belum ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Laut	Internal: - Biro Hukum - Badan Usaha Pelabuhan Laut - Pusat Perencanaan Program Strategis - Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta - Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal  Eksternal: - Menko Perekonomian - SekNeg - MenKum Ham - BPN	Dalam Proses di Kementerian Perhubungan

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Proses Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappenas</li> <li>- Kementerian Keuangan</li> <li>- Kementerian Perhubungan</li> </ul>	
7	Integrasi kawasan FTZ Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun dan penyederhanaan regulasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di empat kawasan Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang	Internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Kerja BP Batam</li> </ul> Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menko Perekonomian</li> <li>- Bappenas</li> <li>- Gubernur Kepri</li> <li>- DPRD Kepri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi wilayah dan kawasan</li> <li>2. Kick off Meeting</li> <li>3. FGD pihak terkait dan narasumber ahli.</li> <li>4. Penetapan integrasi Kawasan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri</li> <li>5. Sosialisasi.</li> </ol>
8	Penyederhanaan peraturan pelayanan perizinan BP Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan investasi di Batam</li> <li>2. Membenahi standar pelayanan guna menciptakan layanan yang mudah, cepat, transparan dan berkualitas.</li> </ol>	Internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Kerja BP Batam</li> </ul> Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi regulasi dan SOP pelayanan perizinan yang menghambat investasi</li> <li>2. Kick Off Meeting</li> <li>3. Koordinasi/FGD Harmonisasi kebijakan dengan pihak terkait dan nara sumber ahli.</li> <li>4. Penetapan SOP pelayanan perizinan yang efisien</li> <li>5. Sosialisasi.</li> </ol>
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi regulasi pembatasan pemasukan dan pengeluaran barang untuk perusahaan manufaktur</li> <li>2. Harmonisasi Peraturan Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan FTZ Batam Dengan Peraturan Menteri Terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung ketersediaan alat dan mesin, bahan baku yang dibutuhkan industri</li> <li>2. Meningkatkan volume ekspor</li> <li>3. Permasalahan kewenangan pengelolaan tata niaga. Sebagai wilayah FTZ, untuk memasukkan komponen bahan baku impor, Batam terlebih dahulu perlu melewati perizinan di Kementerian terkait.</li> <li>4. Adanya pembatasan kuota, seperti bahan baku untuk garam industri, harus melalui perizinan kementerian pusat, padahal sebagai wilayah FTZ bukan pabeanan. Banyak kewenangan lain yang kontra produktif terhadap kegiatan</li> </ol>	Internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Kerja BP Batam</li> </ul> Eksternal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Keuangan</li> <li>- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</li> <li>- Kemeterian terkait regulasi pemasukan mesin dan bahan baku industri ke kawasan FTZ.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi regulasi yang menghambat kegiatan produksi dan distribusi/ekspor</li> <li>2. Kick Off Meeting.</li> <li>3. Koordinasi/FGD dengan pihak terkait dan nara sumber ahli</li> <li>4. Penetapan SOP yang efektif dan efisien</li> <li>5. MOU para pihak</li> <li>6. Sosialisasi.</li> </ol>

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Proses Kegiatan
		produksi maupun distribusi.		
10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan ketentuan alokasi lahan yang efektif dapat mencapai sasaran sesuai perencanaan pembangunan kawasan FTZ Batam</li> <li>2. Revisi /mengubah Permohonan Alokasi Lahan Menjadi Permohonan Investasi</li> </ol>	Penyelesaian 7 ribu hektar lahan menganggur dari 700 proyek yang mangkrak yang hingga saat ini masih menghambat investasi di Batam	Internal: - Unit Kerja BP Batam  Eksternal: - BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi lokasi</li> <li>2. Penertiban dan evaluasi alokasi lahan</li> <li>3. Penyusunan RDTR/ Kawasan/Wilayah</li> <li>4. Koordinasi dengan pihak terkait dan nara sumber ahli.</li> <li>5. Penetapan lokasi dan SOP oleh 2 Pihak BP Batam dan BPN.</li> <li>6. Sosialisasi</li> </ol>
11	Penetapan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Dari Rempang Sampai Galang.	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan Perpres 87 tahun 2011, ada delapan pulau yang diamanatkan kepada BP Batam, tapi hingga saat ini belum dapat dikembangkan karena lahan di Rempang sampai Galang belum ditetapkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).	Internal: - Unit Kerja BP Batam  Eksternal: - Menko Perekonomian - BPN - Kemendagri - Kementerian ATR - Pemprov Kepri - Pemko Batam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi regulasi dan lokasi/ wilayah.</li> <li>2. Penertiban dan evaluasi alokasi lahan</li> <li>3. Koordinasi dengan pihak terkait dan nara sumber ahli.</li> <li>4. Penetapan Hak Pengelolaan Lahan</li> <li>5. Sosialisasi</li> </ol>

**Tabel Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Program atau Kegiatan Tahun 2020 – 2024**

(Dalam Miliar Rupiah)

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>INFRASTRUKTUR</b>		<b>587.00</b>	<b>536.60</b>	<b>561.60</b>	<b>565.00</b>	<b>575.20</b>	<b>2,825</b>
1	Program Pengembangan Bandar Udara Hang Nadim Batam	36.25	127.25	51	35.00	1.5	251
2	Program Pengembangan Jalan dan Drainase	265.75	325.35	207	120	207.2	1,125.3
3	Program Pengembangan Pelabuhan Laut	146.8	15	204.5	220.5	170	756.8
4	Program Pengembangan Air Baku, Limbah dan Lingkungan	138.2	69	99.1	189.5	196.5	692.3
<b>NON INFRASTRUKTUR</b>		<b>235.81</b>	<b>348.01</b>	<b>343.42</b>	<b>358.00</b>	<b>380.10</b>	<b>1,665.34</b>
1	Pengembangan SDM	44	60	150	75	35	364
2	Peraturan dan Regulasi	3.5	2	1.5	2	1.5	10.5
3	Marketing	14	18	14	16	18	80
4	Kajian Perencanaan dan Desain	67.71	58.01	35.92	31	30.6	223.24
5	Pemanfaatan Aset	63.6	121	90	105	203	582.6
6	Penyediaan Lahan	36	45	50	45	40	216
7	Pengembangan Teknologi Informasi	7	44	2	84	52	189
<b>TOTAL</b>		<b>822.81</b>	<b>884.61</b>	<b>905.02</b>	<b>923.00</b>	<b>955.30</b>	<b>4,490.74</b>

**Tabel Rencana Pembiayaan Program dan Kegiatan KPBPB Batam Tahun 2020-2024 Menurut Infrastruktur dan Non Infrastruktur**

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>INFRASTRUKTUR</b>													<b>2825.4</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM</b>								<b>36.25</b>	<b>127.25</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>1.5</b>	<b>251</b>
<b>A</b>	<b>Study dan kajian</b>												<b>12</b>	
1	Evaluasi master plan Bandara Hang Nadim	1	Paket	1					3.5				3.5	
2	Pembuatan RTBL kawasan Jasa Bandara	1	Paket		1					3.5			3.5	
3	Pembuatan RTBL kawasan Industri Bandara	1	Paket		1					2.5			2.5	
4	Review AMDAL kawasan bandara	1	Paket			1					1		1	
5	Review kajian sistem transportasi Batam	1	Paket					1				1.5	1.5	
<b>B</b>	<b>Penyiapan Lahan</b>												<b>120</b>	
1	Pematangan lahan kawasan industri High Tech	750	Ha		750					22.5			22.5	
2	Pembebasan lahan kampung Jabi dan lahan bandara	400	Ha	70	110	220			10	25	50		85	
3	Pemagaran kawasan operasi Bandara Hang Nadim	18200	M		18200				1.5	11			12.5	
<b>C</b>	<b>Pengembangan Fasilitas Bandara</b>												<b>119</b>	
1	Pembangunan jalan lingkungan Bandara	2000	M	800			1200		20			35	55	
2	Pembangunan Mesjid Bandara Hang Nadim	1500	M2		1500				0.25	15.75			16	
3	Pembangunan gedung kantor operasional Bandara	6000	M2		6000				1	47			48	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN DAN DRAINASE</b>								<b>265.75</b>	<b>325.35</b>	<b>207</b>	<b>120</b>	<b>207.2</b>	<b>1125.3</b>
<b>A</b>	<b>Jalan Arteri</b>												<b>478.8</b>	
1	Pembangunan lajur kedua jalan Hang Kesturi	8200	M	8200					65.6				65.6	
2	Pembangunan Jalur kedua jalan Hang Jebat (Besar-Nongsa)	5200	M					5200				41.6	41.6	
3	Pembangunan lajur kedua jalan Hang Lekir (Sambau-Nongsa)	10000	M					10000				80	80	
4	Pembangunan lajur ketiga jalan Yos Sudarso (Pel.BA-simp.Beng)	6500	M		6500				1	23			24	
5	Pembangunan jalan pantai dr KTM- Tanjung Uma	20000	M		8000		12000		2	78		100	180	
6	Pembangunan jalur ketiga jalan Soeprpto (simp.Panbil-Base camp)	10700	M			10700			2		40		45.6	
<b>B</b>	<b>Jalan Kolektor</b>												<b>283.5</b>	
1	Pembangunan jalur kedua jln.....(dutamas-orchid park)	2800	M		2800				1	20			21	
2	Pembangunan jalur kedua jln marina city	400	M	400					35				35	
3	Pembangunan jalan kawasan industri Kabil	25000	M		25000				1	29			30	
4	Pembangunan jalan kawasan industri Tanjung Uncang	25000	M		25000				1	29			30	
5	Pembangunan jalan kawasan CBD Batam Centre	25000	M		25000				1	29			30	
6	Pembangunan jalan Tanjung Gundap	10000	M		10000				1	39			40	
7	Pembangunan jalan Tj. Piayu - Tembesi	4400	M	4400					20				20	

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
8	Pembangunan jalan Bundaran Madani - Bengkong Sadai (WWTP)	2500	M	2500						25.5					25.5
9	Pembangunan Jalan Simp. KDA - Simp. Bank Indonesia	4000	M					4000						40	40
10	Pembangunan jalan Simp. Bank Indonesia - Bundaran Madani	1200	M			1200					12				12
<b>C</b>	<b>Jalan Lokal</b>														<b>78</b>
1	Pembangunan jalan lokal kawasan kampung Tua Tanjung Uncang	18750	M			18750					15				15
2	Pembangunan jalan lokal kawasan kampung Tua Bengkong	18750	M			18750					15				15
3	Pembangunan jalan lokal kawasan kampung tua Kabil	18750	M			18750					15				15
4	Pembangunan jalan lokal di kawasan bandara	10000	M						0.5	15.5					16
5	Pembangunan jalan kavling pekerja Sambau	8000	M						17						17
<b>D</b>	<b>Jembatan dan Jalan Layang</b>														<b>170</b>
1	Pembangunan jalan layang simpang UIB	1	Paket			1					110				110
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Sambau	1	Paket	1					50						50
3	Jembatan Marina City	1	Paket	1					10						10
<b>E</b>	<b>Drainase Primer</b>														<b>95</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Kabil	25000	M		25000				0.5	14.5					15
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Tanjung Uncang	25000	M		25000				0.25	4.75					5
3	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batam Centre	25000	M		25000				1	24					25
4	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Batu Ampar	5000	M	5000					20						20
5	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Kabil	1000	M	1000					4						4
6	Pembangunan jaringan drainase Kav. Sei Belunggut	1500	M	1500					6						6
7	Pembangunan jaringan drainase kawasan RS Bhayangkara	2500	M				2500						10		10
8	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bank BCA Jodoh	2500	M				2500						10		10
<b>F</b>	<b>Drainase Sekunder</b>														<b>20</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batu Aji	50000	M		50000				0.2	9.8					10
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bengkong	50000	M		50000				0.2	9.8					10
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PELABUHAN LAUT</b>								<b>146.8</b>	<b>15</b>	<b>204.5</b>	<b>220.5</b>	<b>170</b>		<b>756.8</b>
<b>A</b>	<b>Terminal Sekupang</b>														<b>327.8</b>
1	Pembangunan Terminal Penumpang Sekupang (Beton)	5170	M2		5170					15					15



No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pembangunan WTP Tembesi-Batam	600	L/Det				600					100		100
4	Pembangunan jaringan pipa Sei Busung Batam	11	Km					11					40	40
5	Pembangunan jaringan distribusi primer Tembesi - Batu Aji	11	Km		11					40				40
6	Pembangunan Wisata Waduk	1	Kegiatan	1					5					5
<b>C</b>	<b>KPLI/LIMBAH INDUSTRI B3</b>													<b>51.5</b>
1	Perluasan kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3 Kabil	40	Ha			40			1.5		40			41.5
2	Penataan kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) B3-lama Kabil	20	Ha	10					10					10
<b>D</b>	<b>Limbah cair rumah tangga</b>													<b>27</b>
1	Desalinasi Pel. Batu Ampar	1	Kegiatan			1					26.1			26.1
2	Kajian "One-Bill" system	1	Kegiatan	1					0.9					0.9
<b>NON INFRASTRUKTUR</b>														<b>1665.34</b>
<b>I</b>	<b>PENGEMBANGAN SDM</b>								<b>44</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>364</b>
<b>A</b>	<b>Pengembangan SDM Internal</b>													<b>134</b>
1	Seminar pariwisata Batam	5	Kegiatan	1					0.5					0.5
2	Kerjasama Lembaga Kursus tentang Pariwisata di Barelang	1	Kegiatan		1					5				5
3	Peningkatan pelayanan SDM Bandara & Pelabuhan kepada wisatawan (Penumpang)	1	Kegiatan	1					2					2
4	Program kerjasama dengan universitas terkait (RS Pendidikan)	1	Kegiatan	1					0.5					0.5
5	Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1	Kegiatan	1					0.5					0.5
6	Program kerjasama pengembangan kompetensi	1	Kegiatan	1					0.5					0.5
7	Pengembangan sertifikasi Kompetensi	10	Kegiatan	2	2	2	2	2	15	15	15	15	15	75
8	Pengembangan pendidikan lanjutan dalam dan luar negeri (S2, S3)	35	orang						10	10	10	10	10	50
<b>B</b>	<b>Pengembangan SDM Eksternal</b>													<b>230</b>
1	Pembangunan Techno Park Batam	2	paket			1	1				100	50		150
2	Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)	3	paket		1	1				15	25		10	50
3	Pengembangan program pendidikan Vokasi	2	paket	1	1				15	15				30
<b>II</b>	<b>PERATURAN DAN REGULASI</b>								<b>3.5</b>	<b>2</b>	<b>1.5</b>	<b>2</b>	<b>1.5</b>	<b>10.5</b>
1	Harmonisasi peraturan kawasan FTZ	1	Dok	1					0.5					0.5
2	Omnibus-law terkait a.l (CIQP, Perdagangan)	5	Dok	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
3	Deregulasi perda terkait aktivitas kawasan	2			1		1			0.5		0.5		1
4	Penyusunan Perka BP Batam mengenai IMB dan Amdal (Turunan Permen LH 27 th 2012)	5	Dok	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
5	Penyederhanaan perizinan Iboss	5	Dok	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
6	Peraturan Pentarifan Layanan IT (SBU)	1	Dok	1					0.5					0.5
7	Review PP No 6 th tentang PK BLU BP Batam	1	Dok	1					0.5					0.5
8	Penyusunan Peraturan pendukung e-commerce	1	Dok	1					0.5					0.5

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>III</b>	<b>MARKETING</b>									<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>80</b>
<b>A</b>	<b>Pemasaran dalam Negeri</b>														<b>41.5</b>
1	Event regional dan nasional	2	Kegiatan		1			1		2			2		4
2	e-sport competition	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		10
3	Pameran nasional	1	Kegiatan		1					1					1
4	Branding Batam	1	Kegiatan		1					1					1
5	Penyusunan story telling Batam	1	Kegiatan		1					0.5					0.5
6	Influencer dalam dan luar negeri untuk promosi Batam(Bidang Industri, jasa dan pariwisata)	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5		25
<b>B</b>	<b>Pemasaran Luar Negeri</b>														<b>38.5</b>
1	Pameran ke Negara Asia Pasifik	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		10
2	One on One ke Negara Asia Pasifik	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5
3	Excecutive Meeting ke Negara Asia Pasifik	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5
4	Market Sounding ke Negara Asia Pasifik	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	3	2.5	3	5	5		18.5
<b>IV</b>	<b>KAJIAN PERENCANAAN &amp; DESAIN</b>								<b>67.71</b>	<b>58.01</b>	<b>35.92</b>	<b>31</b>	<b>30.6</b>		<b>223.24</b>
<b>A</b>	<b>Kajian dan Feasibility study</b>														<b>42.74</b>
1	Grand Strategi Pariwisata Barelang	1	Paket			1					2				2
2	Reviu master plan system transportasi Barelang	1	Paket		1				1.5	5					6.5
3	Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi (KEK) MRO	1	Paket	1					1.5						1.5
4	Kajian Revitalisasi Ekonomi Batam dan implementasi roadmap	1	Paket	1					3.5						3.5
5	Pengembangan Master Plan Smart City	1	Paket	1					5						5
6	Kajian pengembangan energi terbarukan	1	Paket		1					5					5
7	Kajian alternatif penyediaan air baku	1	Paket	1					5						5
8	Analisis Pelaksanaan Daya Saing Investasi Kawasan Ekonomi di KPBPB Batam	2	Paket	1	1				0.75	0.75					1.5
9	Penyusunan Kajian Kuota Induk Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean di KPBPB Batam	3	Paket	1		1		1	0.35		0.6		0.6		1.55
10	Penyusunan Kajian insentif fiskal dan non fiskal dalam menarik Investasi di KPBPB Batam	1	Paket		1					0.5					0.5
11	Penyusunan Kajian pasokan kebutuhan pokok dalam menjaga stabilitas harga di Kota Batam	1	Paket		1					0.5					0.5
12	Penyusunan Kajian rantai pasok industri di kawasan KPBPB Batam	1	Paket			1					0.5				0.5
13	Penyusunan Kajian terhadap ketersediaan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan ketahanan energi di Kota Batam	1	Paket			1					0.8				0.8
14	Penyusunan Kajian Produktivitas Tenaga Kerja untuk mendukung Industri di KPBPB Batam	1	Paket			1					0.4				0.4
15	Penyusunan Kajian program vokasi yang diselaraskan terhadap kebutuhan Industri di Kota Batam	1	Paket		1					0.4					0.4
16	Pengembangan Kawasan Wisata Sekupang	1	Paket			1			0.56	0.56					1.12

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
17	Hallal Hub di Logistic Hub pada Kawasan Bandara	1	Paket			1			0.43	0.43				0.86
18	Pengembangan Kawasan Internasional Trade Expo (Batam Centre)	1	Paket			1			0.37	0.37				0.74
19	Penyusunan Masterplan KEK Kesehatan	1	Paket		1				0.7					0.7
20	Kajian Literatur Regulasi KPBPB Batam dan KEK	1	Paket		1				0.05					0.05
21	Kajian Pengembangan KEK Kesehatan	1	Paket			1				1				1
22	Kajian Pengembangan KEK Bandara	1	Paket			1				1				1
23	Penyusunan Masterplan KEK Rempang	1	Paket				1				1.5			1.5
24	Kajian Penyusunan Perumusan Program Kelembagaan KEK	1	Paket				1				0.05			0.05
25	Penyusunan Amdal Kawasan KEK Kesehatan	1	Paket				1				0.07			0.07
26	Penyusunan Amdal Kawasan KEK Bandara	1	Paket				1					1		1
<b>B</b>	<b>Outline Bisnis Case (OBC), Final Bisnis Case (FBC), Bisnis Plan</b>													<b>23</b>
1	Pembuatan OBC Pembangunan pelabuhan Kapal Pesiar Batam	1	Paket	1					2					2
2	Pembuatan FBC dan RFQ Pembangunan pelabuhan Kapal Pesiar Batam	1	Paket		1					5				5
3	kajian model pengembangan icon wisata	1	Paket		1					2				2
4	Perencanaan Kawasan pematangan lahan bandara	1	Paket	1					3					3
5	Busniness Plan (industri dirgantara, logistik aero city, MRO)	1	Paket	1					3					3
6	FBC dan Legalitas Transit Oriented Development	1	Paket	1					2					2
7	OBC Pembangunan Box Utility	1	Paket	1					2					2
8	OBC Kawasan Industri Halal	1	Paket		1					2				2
9	OBC pemanfaatan FO (Fibre Optic)	1	Paket		1					2				2
<b>C</b>	<b>Detail engineering design (DED)</b>													<b>157.5</b>
1	Penyusunan DED jalan Arteri Barelang	5	Paket	1	1	1	1	1	5	2	2	2	2	13
2	Penyusunan DED jalan Kolektor Barelang	25	Paket	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
3	Penyusunan DED Jembatan dan jalan layang	5	Paket	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	50
4	Penyusunan DED Drainase Primer	5	Paket	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	25
5	Penyusunan DED Drainase Sekunder	5	Paket	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	15
6	DED Ringroad	1	Paket	3					3					3
7	Reviu DED Data Center 2	1	Paket		1					1.5				1.5
<b>V</b>	<b>PEMANFAATAN ASET</b>								<b>63.6</b>	<b>121</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>203</b>	<b>582.6</b>
<b>A</b>	<b>Pemanfaatan aset gedung</b>													<b>550.6</b>
1	Pengembangan kuningan guest house jakarta	2	Kegiatan	1	1				3.1	5				8.1
2	Pengembangan Gedung C Rumah sakit	3	Kegiatan	1	1	1			35	50	50			135
3	Pengadaan Fasilitas Rumah Sakit	3	Kegiatan		1		1	1		50		50	100	200
4	Pengembangan sarana penunjang RSBP	3	Kegiatan	1	1			1	5	5			3	13
5	Pengembangan asrama haji	1	Kegiatan			1					30			30
6	Pengembangan gedung kantor BP	2	Kegiatan				1	1				35	100	135
7	Pengembangan gedung Parkir	2	Kegiatan		1	1			1.5	5				6.5
8	Pembangunan Gedung Expo Internasional	2	Kegiatan		1	1			1	2				3
9	Pengembangan aset Gedung Beringin	1	Kegiatan				1					10		10

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Target					Alokasi Anggaran ( Miliar Rupiah)					Total Alokasi
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
10	Pengembangan Gedung PCI	1	Kegiatan				1					10		10
<b>B</b>	<b>Pemanfaatan aset Kawasan</b>													<b>32</b>
1	Agrowisata temiang	1	Kegiatan	1					15					15
2	Taman Rusa	1	Kegiatan		1					2				2
3	Tumenggung Abdul Jamal	1	Kegiatan			1					10			10
4	Business Plan integrasi 24 aset BP Batam	1	Kegiatan	1					2					2
5	Pengembangan Eco-Tourism sei Ladi	1	Kegiatan		1					2				2
6	Pengembangan Kawasan Dam Duriangkang (Eco-tourism)	1	Kegiatan	1					1					1
<b>VI</b>	<b>PENYEDIAAN LAHAN</b>								<b>36</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>216</b>
<b>A</b>	<b>Penyiapan Lahan</b>													<b>181</b>
1	Pembebasan Lahan Batam (s.d HPL)		Ha						1	15	15	15	10	56
2	Pengurusan dan pengukuran HPL Batam		Ha						5	5	5	5	5	25
3	Pembebasan Lahan Rempang dan Galang		Ha						15	15	15	15	15	75
4	Pengurusan dan pengukuran HPL Rempang dan Galang		Ha						5	5	5	5	5	25
<b>B</b>	<b>Pematangan Lahan</b>													<b>35</b>
1	Pematangan lahan kawasan bandara		Ha							5	5	5	5	20
2	operasional pembebasan lahan bandara		Ha											0
3	relokasi pemukiman liar dari KKOP		Ha						10					10
4	Penyiapan lahan untuk pemanfaatan aset BP Batam		Ha								5			5
<b>VII</b>	<b>PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)</b>								<b>7</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>52</b>	<b>189</b>
<b>A</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Peralatan</b>													<b>34</b>
1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	Aplikasi	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	13
2	pengadaan peralatan dan fasilitas	1	Paket				1					20		20
3	penyiapan standarisasi tata kelola dan peraturan	1	Kegiatan				1					1		1
<b>B</b>	<b>Pengembangan Data Centre</b>													<b>155</b>
1	OBC, FBC data center tahap-2	1	Paket	1					5					5
2	Pembangunan Gedung data center tahap- 2	2	Kegiatan		1		1			40		60	50	150
<b>Jumlah Total</b>									<b>822.81</b>	<b>884.61</b>	<b>905.02</b>	<b>923</b>	<b>955.3</b>	<b>4490.74</b>













NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )															
				2020								2021							
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR
<b>D</b>	<b>Jembatan dan Jalan Layang</b>			<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>
1	Pembangunan jalan layang simpang Bandara	1	Paket										100.00						
2	Pembangunan jalan layang simpang UIB	1	Paket																
3	Pembangunan jalan layang simpang Kepri Mall	1	Paket																130.00
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Sambau	1	Paket		50.00								30.00						
5	Jembatan Marina City				10.00														
<b>E</b>	<b>Drainase Primer</b>			<b>0.00</b>	<b>31.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Kabil	25,000	M		0.50									14.50					
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Tanjung Uncang	25,000	M		0.25									4.75					
3	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batam Centre	25,000	M		1.00									24.00					
4	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Batu Ampar	5,000	M		20.00														
5	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Kabil	1,000	M		4.00														
6	Pembangunan jaringan drainase Kav. Sei Belunggut				6.00														
7	Pembangunan jaringan drainase kawasan RS Bhayangkara																		
8	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bank BCA Jodoh																		
<b>F</b>	<b>Drainase Sekunder</b>			<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batu Aji	50,000	M		0.2					10.00			9.80						
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bengkong	50,000	M		0.2					10.00			9.80						

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )																
				2022								2023								
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	
<b>D</b>	<b>Jembatan dan Jalan Layang</b>			0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Pembangunan jalan layang simpang Bandara	1	Paket																	
2	Pembangunan jalan layang simpang UIB	1	Paket		110.00															
3	Pembangunan jalan layang simpang Kepri Mall	1	Paket																	
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Sambau	1	Paket																	
5	Jembatan Marina City																			
<b>E</b>	<b>Drainase Primer</b>			45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Kabil	25,000	M	15.00																
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Tanjung Uncang	25,000	M	5.00																
3	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batam Centre	25,000	M	25.00																
4	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Batu Ampar	5,000	M																	
5	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Kabil	1,000	M																	
6	Pembangunan jaringan drainase Kav. Sei Belunggut																			
7	Pembangunan jaringan drainase kawasan RS Bhayangkara												10.00							
8	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bank BCA Jodoh												10.00							
<b>F</b>	<b>Drainase Sekunder</b>			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batu Aji	50,000	M	10.00															10.00	
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bengkong	50,000	M	10.00															10.00	

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )								JUMLAH
				2024								
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	
<b>D</b>	<b>Jembatan dan Jalan Layang</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>
1	Pembangunan jalan layang simpang Bandara	1	Paket									100.00
2	Pembangunan jalan layang simpang UIB	1	Paket									110.00
3	Pembangunan jalan layang simpang Kepri Mall	1	Paket									130.00
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Sambau	1	Paket									80.00
5	Jembatan Marina City											10.00
<b>E</b>	<b>Drainase Primer</b>			<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Kabil	25,000	M									30.00
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan industri Tanjung Uncang	25,000	M									10.00
3	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batam Centre	25,000	M									50.00
4	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Batu Ampar	5,000	M	15.00								35.00
5	Pembangunan jaringan drainase kawasan Pelabuhan Kabil	1,000	M	15.00								19.00
6	Pembangunan jaringan drainase Kav. Sei Belunggut											6.00
7	Pembangunan jaringan drainase kawasan RS Bhayangkara											10.00
8	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bank BCA Jodoh											10.00
<b>F</b>	<b>Drainase Sekunder</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
1	Pembangunan jaringan drainase kawasan Batu Aji	50,000	M							10.00		50.00
2	Pembangunan jaringan drainase kawasan Bengkong	50,000	M							10.00		50.00



















NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )															
				2020								2021							
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR
<b>III</b>	<b>MARKETING</b>			0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A</b>	<b>Pemasaran dalam Negeri</b>			0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Kerjasama dengan produksi film untuk menjual wisata alam barelang		Kegiatan																
2	Event regional dan nasional		Kegiatan										2.00						
3	batam menari		Kegiatan																
4	event bermuatan lokal (Panggung wayang sumatera)		Kegiatan																
5	Koordinasi dengan Pemko terkait event pariwisata		Kegiatan																
6	maraton event international		Kegiatan																
7	batam carnival		Kegiatan																
8	e-sport competition		Kegiatan		2.00								2.00						
9	Pameran nasional		Kegiatan										1.00						
10	Branding Batam		Kegiatan										1.00						
11	Penyusunan story telling Batam		Kegiatan										0.50						
12	Influencer dalam dan luar negeri untuk promosi Batam(Bidang Industri, jasa dan pariwisata)		Kegiatan		5.00								5.00						
<b>B</b>	<b>Pemasaran Luar Negeri</b>			0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pameran ke Negara Asia Pasifik		Kegiatan		2.00								2.00						
2	One on One ke Negara Asia Pasifik		Kegiatan		1.00								1.00						
3	Excecutive Meeting ke Negara Asia Pasifik		Kegiatan		1.00								1.00						
4	Market Sounding ke Negara Asia Pasifik		Kegiatan		3.00								2.50						
<b>IV</b>	<b>KAJIAN PERENCANAAN &amp; DESAIN</b>			0.00	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A</b>	<b>Kajian dan Feasibility study</b>			0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Grand Strategi Pariwisata Barelang	1	Paket		1.50								5.00						
2	Reviu master plan system transportasi Barelang	1	Paket		1.50														
3	Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi (KEK) MRO	1	Paket																
4	Kajian Revitalisasi Ekonomi Batam dan implementasi roadmap	1	Paket		3.50														
5	Pengembangan Master Plan Smart City	1	Paket		5.00														
6	Kajian pengembangan energi terbarukan	1	Paket										5.00						
7	Kajian alternatif penyediaan air baku	1	Paket		5.00														
8	Analisis Pelaksanaan Daya Saing Investasi Kawasan Ekonomi di KPBPB Batam	2	Paket		0.75								0.75						
9	Penyusunan Kajian Kuota Induk Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean di KPBPB Batam	3	Paket		0.35														
10	Penyusunan Kajian insentif fiskal dan non fiskal dalam menarik Investasi di KPBPB Batam	1	Paket										0.50						





NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )															
				2020								2021							
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR
11	Penyusunan Kajian pasokan kebutuhan pokok dalam menjaga stabilitas harga di Kota Batam	1	Paket										0.50						
12	Penyusunan Kajian rantai pasok industri di kawasan KPBPB Batam	1	Paket																
13	Penyusunan Kajian terhadap ketersediaan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan ketahanan energi di Kota Batam	1	Paket																
14	Penyusunan Kajian Produktivitas Tenaga Kerja untuk mendukung Industri di KPBPB Batam	1	Paket																
15	Penyusunan Kajian program vokasi yang diselenggarakan terhadap kebutuhan Industri di Kota Batam	1	Paket										0.40						
16	Pengembangan Kawasan Wisata Sekupang	1	Paket		0.56								0.56						
17	Hallal Hub di Logistic Hub pada Kawasan Bandara	1	Paket		0.43								0.43						
18	Pengembangan Kawasan Internasional Trade Expo (Batam Centre)	1	Paket		0.37								0.37						
19	Penyusunan Masterplan KEK Kesehatan	1	Paket		0.70														
20	Kajian Literatur Regulasi KPBPB Batam dan KEK	1	Paket		0.05														
21	Kajian Pengembangan KEK Kesehatan	1	Paket										1.00						
22	Kajian Pengembangan KEK Bandara	1	Paket										1.00						
23	Penyusunan Masterplan KEK Rempang	1	Paket																
24	Kajian Penyusunan Perumusan Program Kelembagaan KEK	1	Paket																
25	Penyusunan Amdal Kawasan KEK Kesehatan	1	Paket																
26	Penyusunan Amdal Kawasan KEK Bandara	1	Paket																
<b>B</b>	<b>Outline Bisnis Case (OBC), Final Bisnis Case (FBC), Bisnis Plan</b>			<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
1	Pembuatan OBC Pembangunan pelabuhan Kapal Pesiar Batam	1	Paket		2.00														
2	Pembuatan FBC dan RFQ Pembangunan pelabuhan Kapal Pesiar Batam	1	Paket										5.00						
3	kajian model pengembangan icon wisata	1	Paket										2.00						
4	Perencanaan Kawasan pematangan lahan bandara	1	Paket		3.00														
5	review master plan (regulasi)	1	Paket																
6	Busniness Plan (industri dirgantara, logistik aero city, MRO)	1	Paket		3.00														
7	FBC dan Legalitas Transit Oriented Development	1	Paket		2.00														
8	OBC Pembangunan Box Utility	1	Paket		2.00														
9	OBC Kawasan Industri Halal	1	Paket										2.00						
10	OBC pemanfaatan FO (Fibre Optic)	1	Paket										2.00						
<b>C</b>	<b>Detail engineering design (DED)</b>			<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							
1	Penyusunan DED jalan Arteri Bareleng	5	Paket		5.00								2.00						
2	Penyusunan DED jalan Kolektor Bareleng	25	Paket		10.00								10.00						
3	Penyusunan DED Jembatan dan jalan layang	5	Paket		10.00								10.00						
4	Penyusunan DED Drainase Primer	5	Paket		5.00								5.00						
5	Penyusunan DED Drainase Sekunder	5	Paket		3.00								3.00						
6	Perencanaan, DED dan Legalitas jembatan Batam-Bintan	1	Paket																
7	DED Pelabuhan	1	Paket																
8	DED Bandara	1	Paket																
9	DED Ringroad	1	Paket		3.00														
10	Reviu DED Data Center 2	1	Paket										1.50						











NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )															
				2020								2021							
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR
VI	<b>PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)</b>			0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	<b>Pengembangan Aplikasi dan Peralatan</b>			0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Aplikasi		2.00								4.00						
	- pengembangan website BP Batam																		
	- pengembangan aplikasi Bandara																		
	- pengembangan aplikasi pelabuhan																		
	- pengembangan aplikasi kepegawaian/HRM																		
	- pembuatan aplikasi objek wisata																		
	- pengembangan aplikasi pengaduan																		
	- integrasi dengan aplikasi lainnya																		
	- pengembangan aplikasi keuangan																		
	- pengembangan aplikasi rumah sakit																		
	- pengembangan aplikasi DS																		
	- pengembangan aplikasi portal BP Batam																		
2	pengadaan peralatan dan fasilitas		Paket																
	- pengembangan security operation center untuk aset BP Batam																		
	- penambahan server dan storage																		
	- penambahan jalur FO (fibre optic)																		
3	penyiapan standarisasi tata kelola dan peraturan		Kegiatan																
B	<b>Pengembangan Data Centre</b>			0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	OBC, FBC data center tahap-2	1	Paket		5.00														
2	Pembangunan Gedung data center tahap- 2	2	Kegiatan									40.00							
<b>JUMLAH</b>				<b>510.00</b>	<b>822.81</b>	<b>300.00</b>	<b>3.00</b>	<b>50.00</b>	<b>1,017.50</b>	<b>66.50</b>	<b>10.00</b>	<b>760.00</b>	<b>884.61</b>	<b>250.00</b>	<b>40.00</b>	<b>20.00</b>	<b>517.00</b>	<b>105.00</b>	<b>130.00</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )															
				2022								2023							
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR	RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO	PUPR
<b>VI</b>	<b>PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)</b>			0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>A</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Peralatan</b>			0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Aplikasi		2.00								3.00						
	- pengembangan website BP Batam																		
	- pengembangan aplikasi Bandara																		
	- pengembangan aplikasi pelabuhan																		
	- pengembangan aplikasi kepegawaian/HRM																		
	- pembuatan aplikasi objek wisata																		
	- pengembangan aplikasi pengaduan																		
	- integrasi dengan aplikasi lainnya																		
	- pengembangan aplikasi keuangan																		
	- pengembangan aplikasi rumah sakit																		
	- pengembangan aplikasi DS																		
	- pengembangan aplikasi portal BP Batam																		
2	pengadaan peralatan dan fasilitas		Paket										20.00						
	- pengembangan security operation center untuk aset BP Batam																		
	- penambahan server dan storage																		
	- penambahan jalur FO (fibre optic)																		
3	penyiapan standarisasi tata kelola dan peraturan		Kegiatan										1.00						
<b>B</b>	<b>Pengembangan Data Centre</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	OBC, FBC data center tahap-2	1	Paket																
2	Pembangunan Gedung data center tahap- 2	2	Kegiatan										60.00						
<b>JUMLAH</b>				<b>619.40</b>	<b>905.02</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>614.00</b>	<b>923.00</b>	<b>250.00</b>	<b>618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN ( dalam Rp miliar )							JUMLAH	
				2024								
				RM	PNBP	KPBU / KPS	PHLN	KSO	KSP	PEMKO		PUPR
<b>VI</b>	<b>PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)</b>			<b>0.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.00</b>
<b>A</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Peralatan</b>			<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
1	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Aplikasi		2.00							<b>13.00</b>
	- pengembangan website BP Batam											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi Bandara											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi pelabuhan											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi kepegawaian/HRM											<b>0.00</b>
	- pembuatan aplikasi objek wisata											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi pengaduan											<b>0.00</b>
	- integrasi dengan aplikasi lainnya											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi keuangan											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi rumah sakit											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi DS											<b>0.00</b>
	- pengembangan aplikasi portal BP Batam											<b>0.00</b>
2	pengadaan peralatan dan fasilitas		Paket									<b>20.00</b>
	- pengembangan security operation center untuk aset BP Batam											<b>0.00</b>
	- penambahan server dan storage											<b>0.00</b>
	- penambahan jalur FO (fibre optic)											<b>0.00</b>
3	penyiapan standarisasi tata kelola dan peraturan		Kegiatan									<b>1.00</b>
<b>B</b>	<b>Pengembangan Data Centre</b>			<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>
1	OBC, FBC data center tahap-2	1	Paket									<b>5.00</b>
2	Pembangunan Gedung data center tahap- 2	2	Kegiatan		50.00							<b>150.00</b>
<b>JUMLAH</b>				<b>730.00</b>	<b>955.30</b>	<b>0.00</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,549.14</b>

Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional)

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENTERIAN / LEMBAGA</b>														
	<b>1. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan yang akuntabel</b>													
	- Presentase unit kerja yang memiliki dokumen dan tata perencanaan yang berkualitas baik		80	80	80	85	85	Persen	188,086,677	126,145,665	126,145,665	126,145,665	126,145,665	
	<b>2. Meningkatnya kinerja SDM BP Batam dan kualitas pelayanan</b>								694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161	
	- Nilai survey kepuasan pelanggan masyarakat		>4	>4	>4	>4	>4	Skala Predikat (Baik)						
	<b>3. Meningkatnya peran hasil riset dan inovasi terhadap pengembangan usaha</b>								27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	
	- Presentasi hasil riset dan inovasi pengembangan usaha yang berhasil dikembangkan, ditindaklanjuti dan dilaksanakan		50	50	50	75	90	Persen						
	<b>4. Meningkatnya nilai real investasi dalam pengembangan KPBPB Batam</b>								1,317,448,979	537,331,530	537,331,530	537,331,530	537,331,530	
	- Presentasi hasil peningkatan real investasi yang berhasil merealisasikan investasi di daerah KPBPB Batam		10	10	10	10	10	Persen						
	<b>5. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana berstandar internasional</b>													
	- Hasil peningkatan pengembangan sarana prasarana yang berstandar internasional		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	Sertifikasi						
<b>PROGRAM 01: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>														
	<b>1. Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel</b>								856,910,147	847,495,013	847,495,013	847,495,013	847,495,013	
	- Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran		80	80	80	80	80	%	188,086,677	178,671,543	178,671,543	178,671,543	178,671,543	
	- Pencapaian kinerja laporan keuangan BP Batam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai Laporan Keuangan						
	<b>2. Meningkatnya Kinerja SDM</b>								641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	
	- Nilai Kinerja SDM BP Batam		90	90	90	90	90	Nilai SKP						
	<b>3. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>								27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit kerja		75	75	75	75	75	Persen						
<b>5113: Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis</b>														
	<b>1. Tersedianya dokumen analisa kebijakan strategis serta perencanaan program dan teknis pembangunan yang berkualitas</b>	Kota Batam												Pusat Perencanaan Program Strategis
	- Jumlah dokumen analisa ekonomi makro dan sektor strategis		2	2	2	2	2	Dokumen	24,752,994	24,752,994	24,752,994	24,752,994	24,752,994	
	- Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Sesuai Rencana		4	4	4	4	4	Kegiatan						
	- Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan		4	4	4	4	4	Dokumen						
	- Jumlah dokumen perencanaan program		1	1	1	1	1	Dokumen						
<b>5114: Pelayanan Kerumahtangaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa</b>														
	<b>1. Terpenuhinya kebutuhan kerumahtangaan dan kesekretariatan serta terlaksananya pengadaan barang dan jasa</b>	Kota Batam												Biro Umum
	- Pelaksanaan Layanan Umum, Keprotokolanan, Tata Usaha dan Sarana Prasarana		12	12	12	12	12	Bulan Layanan	112,867,389	102,950,209	102,950,209	102,950,209	102,950,209	
	- Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Rencana		5	5	5	5	5	Unit						
	- Pelaksanaan Layanan Manajemen Aset / Barang Milik Negara		12	12	12	12	12	Bulan Layanan						

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>5115: Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>		Kota Batam													Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>1. Terkelolanya Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana BP Batam Secara Profesional</b>								641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283		
	- Batas Nilai Minimum SKP Peg. BP Batam yang harus dievaluasi		75	75	75	80	85	Nilai SKP							
	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Sesuai dengan Rencana		8	8	8	8	8	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Grand Design dan Sistem Kepegawaian		1	1	1	1	1	Dokumen							
	- Jumlah dokumen aturan tata laksana sesuai rencana		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5116: Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>		Kota Batam													Biro Keuangan
	<b>1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel</b>								7,750,134	8,147,852	8,147,852	8,147,852	8,147,852		
	- Jumlah Layanan Pembayaran yang dilakukan Sesuai Prosedur		4	4	4	4	4	Layanan							
	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan		4	4	4	4	4	Kegiatan							
	- Jumlah dokumen perencanaan anggaran		3	3	3	3	3	Dokumen							
<b>5117: Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum</b>		Kota Batam													Biro Hukum
	<b>1. Tersedianya Regulasi yang Mendukung Kinerja BP Batam</b>								6,655,876	6,760,204	6,760,204	6,760,204	6,760,204		
	- Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan atau Regulasi yang Dibutuhkan BP Batam		5	5	5	5	5	Kegiatan							
	- Jumlah Layanan Bantuan Hukum		3	3	3	3	3	Layanan							
<b>5118: Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta</b>		Kota Batam													Kantor Perwakilan BP Batam
	<b>1. Meningkatnya Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah dan Swasta</b>								8,837,513	8,837,513	8,837,513	8,837,513	8,837,513		
	- Jumlah Kegiatan Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan		1	1	1	1	1	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh SPI		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5122: Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan</b>		Kota Batam													Satuan Pemeriksa Internal
	<b>1. Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur dan Lembaga BP Batam</b>								2,170,262	2,170,262	2,170,262	2,170,262	2,170,262		
	- Jumlah Kegiatan Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan		1	1	1	1	1	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh SPI		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5978: Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi</b>		Kota Batam													Pusat Harmonisasi Kebijakan
	<b>1. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pentarifan</b>								3,373,972	3,373,972	3,373,972	3,373,972	3,373,972		
	- Jumlah kegiatan penyelesaian dukungan teknis penyusunan dokumen pentarifan yang berkualitas		1	1	1	1	1	Dokumen							
	<b>2. Meningkatnya kinerja organisasi BP Batam</b>								590,642	590,642	590,642	590,642	590,642		
	- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		1	1	1	1	1	Dokumen							
	<b>3. Meningkatnya kinerja manajemen sistem informasi BP Batam</b>								19,831,288	19,831,288	19,831,288	19,831,288	19,831,288		
	- Jumlah kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		3	3	3	3	3	Kegiatan							
<b>5979: Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan</b>		Kota Batam													Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus
	<b>1. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan usaha, daya saing dan kerja sama KEK yang berkelanjutan</b>								3,986,927	3,986,927	3,986,927	3,986,927	3,986,927		
	- Jumlah dokumen perencanaan pengembangan usaha dan daya saing serta kerja sama KEK		3	3	3	3	3	Dokumen							

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
5980: Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol		Kota Batam													Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol
	<b>1. Meningkatnya jumlah investor/ negara yang tertarik berinvestasi di KPBPB Batam</b>														
	- Jumlah kegiatan publikasi kehumasan BP Batam		3	3	3	3	3	Kegiatan	22,579,467	22,579,467	22,579,467	22,579,467	22,579,467		
	- Jumlah kegiatan promosi investasi		3	3	3	3	3	Kegiatan							
	<b>2. Terlaksananya dukungan strategis pimpinan dan protokol</b>								1,882,400	1,882,400	1,882,400	1,882,400	1,882,400		
	- Pelaksanaan Layanan Keprotokolan		12	12	12	12	12	Bulan layanan							
<b>PROGRAM 06: PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS</b>									<b>1,369,974,857</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>	<b>537,331,530</b>		
	<b>1. Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam</b>								1,317,448,979	484,805,652	484,805,652	484,805,652	484,805,652		
	- Presentasi peningkatan nilai Investasi di Batam		10	10	10	10	10	Persen							
	<b>2. Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem</b>								52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878		
	- Persentase peningkatan Pendapatan BP Batam		20	20	20	20	20	Persen							
	<b>3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam</b>														
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		9	9	9	9	9	Aplikasi							
	<b>4. Meningkatnya Pendapatan BP Batam</b>														
	- Jumlah layanan yang terintegrasi		95	95	95	95	95	Nilai Kepuasan							
	<b>5. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha</b>														
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit usaha		75	75	75	75	75	Persen							
5123: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam		Kota Batam													Direktorat Pengelolaan Lahan
	<b>1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan di Batam</b>								19,766,881	19,662,414	19,662,414	19,662,414	19,662,414		
	- Jumlah kegiatan dalam rangka penyelesaian pembebasan lahan		4	4	4	4	4	Kegiatan							
5124: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut		Kota Batam													Badan Usaha Pelabuhan
	<b>1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Laut</b>								55,591,049	47,196,171	47,196,171	47,196,171	47,196,171		
	- Jumlah pelayanan bongkar muat cargo		4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Ton							
	- Jumlah pelayanan bongkar muat peti kemas		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Teus							
	- Jumlah Fasilitas Terminal Penumpang Pelabuhan Domestik		2	2	2	2	2	Unit							
5125: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi		Kota Batam													Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	<b>1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Bandar Udara</b>								124,719,635	113,872,621	113,872,621	113,872,621	113,872,621		
	- Jumlah Penumpang Bandar Udara		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Orang							
	<b>2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Manajemen Data Center, Sistem Informasi dan Data Pembangunan BP Batam yang Akuntabel</b>								22,764,192	20,208,069	20,208,069	20,208,069	20,208,069		
	- Jumlah Kapasitas Server yang Disewakan		120	120	120	120	120	Terabyte							
	- Jumlah Sistem dan Aplikasi yang Dikembangkan		3	3	3	3	3	Aplikasi							
	- Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		1	1	1	1	1	Unit							
5126: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan		Kota Batam													Badan Usaha Rumah Sakit
	<b>1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Sakit BP Batam</b>								141,088,526	131,928,034	131,928,034	131,928,034	131,928,034		
	- Jumlah Pasien yang Terlayani		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Orang							
5127: Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan		Kota Batam													Direktorat Infrastruktur Kawasan
	<b>1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Prasarana Pelayanan</b>								633,226,841	82,004,373	82,004,373	82,004,373	82,004,373		
	- Panjang Jalan yang Diperbaiki		58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	KM							
	- Luasan Pengawasan dan Penghijauan		193,444	193,444	193,444	193,444	193,444	M2							

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
5129: Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal		Kota Batam												Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
	<b>1. Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Barang di KPBPB Batam</b> - Jumlah Kegiatan Pembinaan Industri Besar dan Industri Kecil		1	1	1	1	1	Kegiatan	8,193,732	7,891,576	7,891,576	7,891,576	7,891,576	
	<b>2. Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perijinan dan Akuntabilitas Data Investasi di KPBPB Batam</b> - Waktu Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		2	2	2	2	2	Hari	3,107,210	3,107,210	3,107,210	3,107,210	3,107,210	
5130: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan		Kota Batam												Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
	<b>1. Meningkatnya Pengelolaan Air Baku dan Limbah di KPBPB Batam</b> - Jumlah kegiatan pendukung ketersediaan air baku		3	3	3	3	3	Kegiatan	260,710,446	17,210,494	17,210,494	17,210,494	17,210,494	
	- Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan limbah		5	5	5	5	5	Kegiatan						
	<b>2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset-Aset BP Batam yang Profesional dan Akuntabel</b> - Jumlah Aset yang Dikelola		7	7	7	7	7	Unit	31,885,948	31,885,948	31,885,948	31,885,948	31,885,948	
5134: Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi		Kota Batam												Direktorat Pengamanan Aset
	<b>1. Meningkatnya Keamanan Aset-Aset BP Batam</b> - Luasan Aset yang Diamankan		59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	M2	48,280,467	42,039,690	42,039,690	42,039,690	42,039,690	
5981: Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam		Kota Batam												Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
	<b>1. Tersedianya rekomendasi hasil kinerja dan pembinaan unit usaha</b> - Rekomendasi hasil kinerja dan pembinaan unit usaha		2	2	2	2	2	Dokumen	5,873,043	5,873,043	5,873,043	5,873,043	5,873,043	
5982: Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam		Kota Batam												Direktorat Evaluasi dan Pengendalian
	<b>1. Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perusahaan bidang perhubungan dan kerjasama perusahaan</b> - Rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perusahaan bidang perhubungan dan kerjasama perusahaan		1	1	1	1	1	Dokumen	3,894,987	3,894,987	3,894,987	3,894,987	3,894,987	
5983: Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam		Kota Batam												Direktorat Restrukturisasi
	<b>1. Tersedianya dokumen pengkajian strategi restrukturisasi unit usaha dan budaya unit usaha</b> - Jumlah dokumen pengkajian strategi restrukturisasi unit usaha dan budaya unit usaha		2	2	2	2	2	Dokumen	10,871,900	10,556,900	10,556,900	10,556,900	10,556,900	

Matriks Rencana Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2020-2024 (Operasional dan Non-Operasional)

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENTERIAN / LEMBAGA</b>								<b>3,626,885,004</b>	<b>3,084,826,543</b>	<b>2,635,426,543</b>	<b>2,185,626,543</b>	<b>1,879,126,543</b>		
	1. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan yang akuntabel							188,086,677	126,145,665	126,145,665	126,145,665	126,145,665		
	- Presentase unit kerja yang memiliki dokumen dan tata perencanaan yang berkualitas baik		80	80	80	85	85	Persen						
	2. Meningkatnya kinerja SDM BP Batam dan kualitas pelayanan							694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161	694,157,161		
	- Nilai survey kepuasan pelanggan masyarakat		>4	>4	>4	>4	>4	Skala Predikat (Baik)						
	3. Meningkatnya peran hasil riset dan inovasi terhadap pengembangan usaha							27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187		
	- Presentasi hasil riset dan inovasi pengembangan usaha yang berhasil dikembangkan, ditindaklanjuti dan dilaksanakan		50	50	50	75	90	Persen						
	4. Meningkatnya nilai real investasi dalam pengembangan KPBPB Batam							2,717,448,979	2,237,331,530	1,787,931,530	1,338,131,530	1,031,631,530		
	- Presentasi hasil peningkatan real investasi yang berhasil merealisasikan investasi di daerah KPBPB Batam		10	10	10	10	10	Persen						
	5. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana berstandar internasional													
	- Hasil peningkatan pengembangan sarana prasarana yang berstandar internasional		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	Sertifikasi						
<b>PROGRAM 01: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								<b>856,910,147</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>	<b>847,495,013</b>		
	1. Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel							188,086,677	178,671,543	178,671,543	178,671,543	178,671,543		
	- Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran		80	80	80	80	80	%						
	- Pencapaian kinerja laporan keuangan BP Batam		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai Laporan Keuangan						
	2. Meningkatnya Kinerja SDM							641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283		
	- Nilai Kinerja SDM BP Batam		90	90	90	90	90	Nilai SKP						
	3. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha							27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187	27,192,187		
	- Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit kerja		75	75	75	75	75	Persen						
<b>5113: Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis</b>		Kota Batam											<b>Pusat Perencanaan Program Strategis</b>	
	1. Tersedianya dokumen analisa kebijakan strategis serta perencanaan program dan teknis pembangunan yang berkualitas							24,752,994	24,752,994	24,752,994	24,752,994	24,752,994		
	- Jumlah dokumen analisa ekonomi makro dan sektor strategis		2	2	2	2	2	Dokumen						
	- Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Sesuai Rencana		4	4	4	4	4	Kegiatan						
	- Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan		4	4	4	4	4	Dokumen						
	- Jumlah dokumen perencanaan program		1	1	1	1	1	Dokumen						

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>5114: Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa</b>		Kota Batam													<b>Biro Umum</b>
	<b>1. Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan dan kesekretariatan serta terlaksananya pengadaan barang dan jasa</b>								112,867,389	102,950,209	102,950,209	102,950,209	102,950,209		
	- Pelaksanaan Layanan Umum, Keprotokolan, Tata Usaha dan Sarana Prasarana		12	12	12	12	12	Bulan Layanan							
	- Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Rencana		5	5	5	5	5	Unit							
	- Pelaksanaan Layanan Manajemen Aset / Barang Milik Negara		12	12	12	12	12	Bulan Layanan							
<b>5115: Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>		Kota Batam													<b>Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>
	<b>1. Terkelolanya Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana BP Batam Secara Profesional</b>								641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283	641,631,283		
	- Batas Nilai Minimum SKP Peg. BP Batam yang harus dievaluasi		75	75	75	80	85	Nilai SKP							
	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Sesuai dengan Rencana		8	8	8	8	8	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Grand Desain dan Sistem Kepegawaian		1	1	1	1	1	Dokumen							
	- Jumlah dokumen aturan tata laksana sesuai rencana		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5116: Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>		Kota Batam													<b>Biro Keuangan</b>
	<b>1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel</b>								7,750,134	8,147,852	8,147,852	8,147,852	8,147,852		
	- Jumlah Layanan Pembayaran yang dilakukan Sesuai Prosedur		4	4	4	4	4	Layanan							
	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan		4	4	4	4	4	Kegiatan							
	- Jumlah dokumen perencanaan anggaran		3	3	3	3	3	Dokumen							
<b>5117: Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum</b>		Kota Batam													<b>Biro Hukum</b>
	<b>1. Tersedianya Regulasi yang Mendukung Kinerja BP Batam</b>								6,655,876	6,760,204	6,760,204	6,760,204	6,760,204		
	- Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan atau Regulasi yang Dibutuhkan BP Batam		5	5	5	5	5	Kegiatan							
	- Jumlah Layanan Bantuan Hukum		3	3	3	3	3	Layanan							
<b>5118: Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta</b>		Kota Batam													<b>Kantor Perwakilan BP Batam</b>
	<b>1. Meningkatnya Kerjasama Antara Lembaga Pemerintah dan Swasta</b>								8,837,513	8,837,513	8,837,513	8,837,513	8,837,513		
	- Jumlah Kegiatan Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan		1	1	1	1	1	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh SPI		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5122: Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan</b>		Kota Batam													<b>Satuan Pemeriksa Internal</b>
	<b>1. Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur dan Lembaga BP Batam</b>								2,170,262	2,170,262	2,170,262	2,170,262	2,170,262		
	- Jumlah Kegiatan Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan		1	1	1	1	1	Kegiatan							
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti oleh SPI		1	1	1	1	1	Dokumen							
<b>5978: Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi</b>		Kota Batam													<b>Pusat Harmonisasi Kebijakan</b>
	<b>1. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pentarifan</b>								3,373,972	3,373,972	3,373,972	3,373,972	3,373,972		
	- Jumlah kegiatan penyelesaian dukungan teknis penyusunan dokumen pentarifan yang berkualitas		1	1	1	1	1	Dokumen							
	<b>2. Meningkatnya kinerja organisasi BP Batam</b>								590,642	590,642	590,642	590,642	590,642		
	- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		1	1	1	1	1	Dokumen							
	<b>3. Meningkatnya kinerja manajemen sistem informasi BP Batam</b>								19,831,288	19,831,288	19,831,288	19,831,288	19,831,288		
	- Jumlah kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		3	3	3	3	3	Kegiatan							

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
5979: Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan		Kota Batam													Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus
	1. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan usaha, daya saing dan kerja sama KEK yang berkelanjutan - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan usaha dan daya saing serta kerja sama KEK		3	3	3	3	3	Dokumen	3,986,927	3,986,927	3,986,927	3,986,927	3,986,927		
5980: Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol		Kota Batam													Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol
	1. Meningkatkan jumlah investor/ negara yang tertarik berinvestasi di KPBBP Batam - Jumlah kegiatan publikasi kehumasan BP Batam - Jumlah kegiatan promosi investasi		3	3	3	3	3	Kegiatan	22,579,467	22,579,467	22,579,467	22,579,467	22,579,467		
	2. Terlaksananya dukungan strategis pimpinan dan protokol - Pelaksanaan Layanan Keprotokolan		12	12	12	12	12	Bulan layanan	1,882,400	1,882,400	1,882,400	1,882,400	1,882,400		
<b>PROGRAM 06: PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS</b>									<b>2,769,974,857</b>	<b>2,237,331,530</b>	<b>1,787,931,530</b>	<b>1,338,131,530</b>	<b>1,031,631,530</b>		
	1. Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi di Batam - Presentasi peningkatan nilai Investasi di Batam		10	10	10	10	10	Persen	2,717,448,979	2,184,805,652	1,735,405,652	1,285,605,652	979,105,652		
	2. Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem - Persentase peningkatan Pendapatan BP Batam		20	20	20	20	20	Persen	52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878	52,525,878		
	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam - Jumlah layanan yang terintegrasi		9	9	9	9	9	Aplikasi							
	4. Meningkatkan Pendapatan BP Batam - Jumlah layanan yang terintegrasi		95	95	95	95	95	Nilai Kepuasan							
	5. Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha - Persentase penerapan hasil kajian/riset yang ditindaklanjuti dalam kegiatan unit usaha		75	75	75	75	75	Persen							
5123: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam		Kota Batam													Direktorat Pengelolaan Lahan
	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lahan di Batam - Jumlah kegiatan dalam rangka penyelesaian pembebasan lahan		4	4	4	4	4	Kegiatan	19,766,881	19,662,414	19,662,414	19,662,414	19,662,414		
5124: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut		Kota Batam													Badan Usaha Pelabuhan
	1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pelabuhan Laut - Jumlah pelayanan bongkar muat cargo - Jumlah pelayanan bongkar muat peti kemas - Jumlah Fasilitas Terminal Penumpang Pelabuhan Domestik		4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	Ton	255,591,049	447,196,171	263,796,171	47,196,171	47,196,171		
			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Unit							
5125: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi		Kota Batam													Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Bandar Udara - Jumlah Penumpang Bandar Udara		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Orang	424,719,635	413,872,621	313,872,621	214,672,621	113,872,621		
	2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Manajemen Data Center, Sistem Informasi dan Data Pembangunan BP Batam yang Akuntabel - Jumlah Kapasitas Server yang Disewakan - Jumlah Sistem dan Aplikasi yang Dikembangkan - Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara		120	120	120	120	120	Terabyte	22,764,192	20,208,069	20,208,069	20,208,069	20,208,069		
			3	3	3	3	3	Aplikasi							
			1	1	1	1	1	Unit							

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Satuan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
5126: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan		Kota Batam													Badan Usaha Rumah Sakit
	<b>1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Rumah Sakit BP Batam</b>								141,088,526	331,928,034	215,928,034	131,928,034	131,928,034		
	- Jumlah Pasien yang Terlayani		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Orang							
5127: Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan		Kota Batam													Direktorat Infrastruktur Kawasan
	<b>1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Prasarana Pelayanan</b>								1,033,226,841	482,004,373	382,004,373	382,004,373	254,104,373		
	- Panjang Jalan yang Diperbaiki		58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	KM							
	- Luasan Pengawasan dan Penghijauan		193,444	193,444	193,444	193,444	193,444	M2							
5129: Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal		Kota Batam													Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal
	<b>1. Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Barang di KPBPB Batam</b>								8,193,732	7,891,576	7,891,576	7,891,576	7,891,576		
	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Industri Besar dan Industri Kecil		1	1	1	1	1	Kegiatan							
	<b>2. Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perijinan dan Akuntabilitas Data Investasi di KPBPB Batam</b>								3,107,210	3,107,210	3,107,210	3,107,210	3,107,210		
	- Waktu Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		2	2	2	2	2	Hari							
5130: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan		Kota Batam													Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
	<b>1. Meningkatnya Pengelolaan Air Baku dan Limbah di KPBPB Batam</b>								760,710,446	417,210,494	467,210,494	417,210,494	339,410,494		
	- Jumlah kegiatan pendukung ketersediaan air baku		3	3	3	3	3	Kegiatan							
	- Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan limbah		5	5	5	5	5	Kegiatan							
	<b>2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset-Aset BP Batam yang Profesional dan Akuntabel</b>								31,885,948	31,885,948	31,885,948	31,885,948	31,885,948		
	- Jumlah Aset yang Dikelola		7	7	7	7	7	Unit							
5134: Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi		Kota Batam													Direktorat Pengamanan Aset
	<b>1. Meningkatnya Keamanan Aset-Aset BP Batam</b>								48,280,467	42,039,690	42,039,690	42,039,690	42,039,690		
	- Luasan Aset yang Diamankan		59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000	M2							
5981: Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam		Kota Batam													Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko
	<b>1. Tersedianya rekomendasi hasil kinerja dan pembinaan unit usaha</b>								5,873,043	5,873,043	5,873,043	5,873,043	5,873,043		
	- Rekomendasi hasil kinerja dan pembinaan unit usaha		2	2	2	2	2	Dokumen							
5982: Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam		Kota Batam													Direktorat Evaluasi dan Pengendalian
	<b>1. Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan ketentuan pengusahaan bidang perhubungan dan kerjasama pengusahaan</b>								3,894,987	3,894,987	3,894,987	3,894,987	3,894,987		
	- Rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan ketentuan pengusahaan bidang perhubungan dan kerjasama pengusahaan		1	1	1	1	1	Dokumen							
5983: Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam		Kota Batam													Direktorat Restrukturisasi
	<b>1. Tersedianya dokumen pengkajian strategi restrukturisasi unit usaha dan budaya unit usaha</b>								10,871,900	10,556,900	10,556,900	10,556,900	10,556,900		
	- Jumlah dokumen pengkajian strategi restrukturisasi unit usaha dan budaya unit usaha		2	2	2	2	2	Dokumen							